

S/156

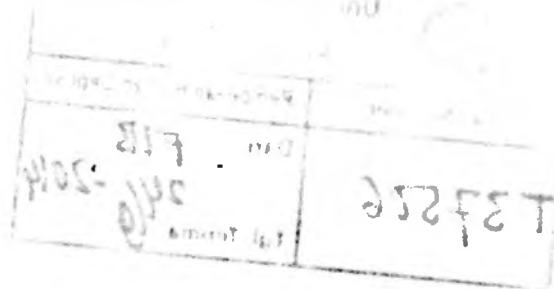


**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN  
STUDI KASUS DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**TESIS**

**WIJI SUWARNO  
NPM. 0706307084**



**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI  
DEPOK  
JULI 2009**





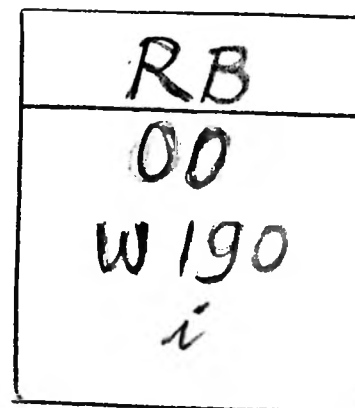
**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN  
STUDI KASUS DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Humaniora (M.Hum)**

**WIJI SUWARNO  
NPM. 0706307084**



**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI  
DEPOK  
JULI 2009**


*902*

## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Wiji Suwarno  
NPM : 0706307084  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Judul Tesis : Implementasi Kode Etik Pustakawan : Studi kasus  
di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa  
Tengah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Ketua : Fuad Gani, M.A. (  )  
Pembimbing : Laksmi, M.A. (  )  
Pembimbing : Ike Iswary Lawanda, M.S (  )  
Penguji : Zulfikar Zen, M.A (  )  
Penguji : Y. Sumaryanto, M. Hum (  )

Ditetapkan di : Depok

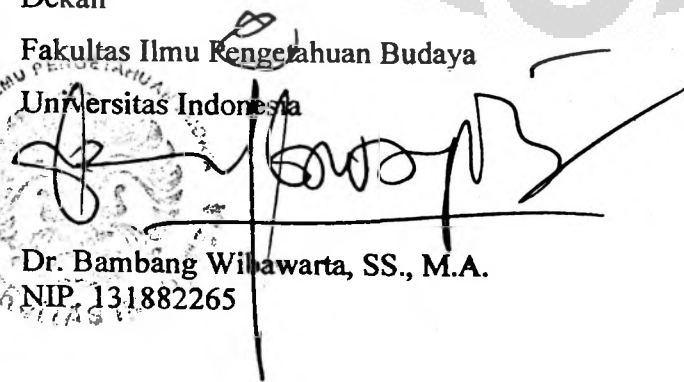
Tanggal : 9 Juli 2009

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wilawarta, SS., M.A.

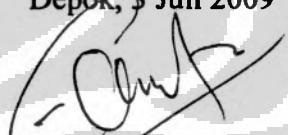
NIP. 131882265

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 3 Juli 2009



Wiji Suwarno

NPM. 0706307084

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Wiji Suwarno**  
**NPM : 0706307084**

**Tanda tangan:**



**Tanggal : 3 Juli 2009**

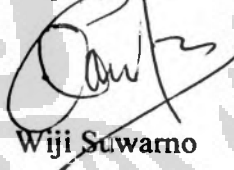
## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, limpahan hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora (M.Hum) Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa penyusunan Tesis ini bukan sesuatu yang mudah dan tidak semata-mata karena kerja penulis pribadi, melainkan banyak tangan-tangan dan pemikiran-pemikiran orang bijak yang membantu, menginspirasi, dan memotivasi penulis sehingga proses yang panjang, satu demi satu dapat terlewati dan akhirnya tersaji dalam bentuk tulisan ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Fuad Gani, selaku Ketua Departemen Ilmu Perpustakaan UI yang telah memberikan bimbingan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Ibu Laksmi dan Ike Iswary Lawanda, selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- Bapak Zulfikar Zen dan Y. Sumaryanto, selaku pembaca yang telah menyempatkan untuk mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang cukup berarti dalam penulisan ini.
- Kasubdit III Perpustakaan bantuan dan beasiswa Ditpertaids Departemen Agama Republik Indonesia, yang telah memberikan beasiswa S2 bidang Ilmu perpustakaan.
- Bapak Urip, selaku kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, dan Bapak/ ibu informan yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan tempat bagi penulis untuk melakukan penelitian, sekaligus membantu kelancaran dalam penelitian, sehingga terwujudnya penulisan ini berdasarkan data-data yang diperoleh.
- Ketua STAIN Salatiga, Bapak Imam Sutomo, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk studi lebih lanjut.

- Bapak Sulistyio-Basuki yang telah memberikan berbagai pengalaman dan wawasan yang menginspirasi penulis untuk dapat berkarya.
- Seluruh dosen dan pegawai Universitas Indonesia dan STAIN Salatiga, yang telah membantu saya dalam berbagai hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Seluruh rekan-rekan seperjuangan di S2 ini, yang dengan luar biasa membina semangat kekeluargaan dan berbagi pengalaman yang sangat berarti bagi penulis.
- Istri Ifonilla Yenianti dan buah hati Avesina Rif'an Maula, serta keluarga besar kami yang menjadi buah inspirasi dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan lamanya waktu dan panjangnya harapan.
- Dan akhirnya tidak lupa terima kasih untuk semua orang yang dalam hal ini tidak bisa disebutkan satu persatu, dari mulai dosen, karyawan, pustakawan, dan teman-teman, semoga bantuan yang diberikan selama ini menjadi amal yang diberkahi oleh Allah SWT, dan mendapatkan imbalan yang sesuai. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 3 Juli 2009



Wiji Suwarno

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiji Suwarno  
NPM : 0706307084  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

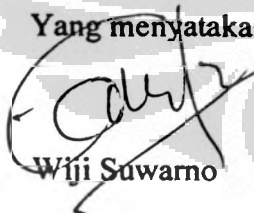
Implementasi Kode Etik Pustakawan: Studi kasus di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 3 Juli 2009

Yang menyatakan



Wiji Suwarno



## ABSTRAK

Nama : Wiji Suwarno  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Judul : Implementasi Kode Etik Pustakawan: Studi Kasus di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah.

Tesis ini membahas implementasi Kode Etik Pustakawan yang diterbitkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tahun 2006 di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (Perpusda). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik pustakawan dan budaya Jawa berjalan saling menguatkan, di mana pemahaman dan nilai-nilai terbangun melalui etika, agama yang diyakini, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja, sedangkan usaha implementasinya dilakukan dengan cara melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menaati peraturan yang berlaku. Penelitian ini berupaya memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, membantu sosialisasi kode etik, dan sekaligus menjadi masukan-masukan untuk IPI.

Kata kunci: Etika, Pustakawan, nilai-nilai kode etik, budaya.

## ABSTRACT

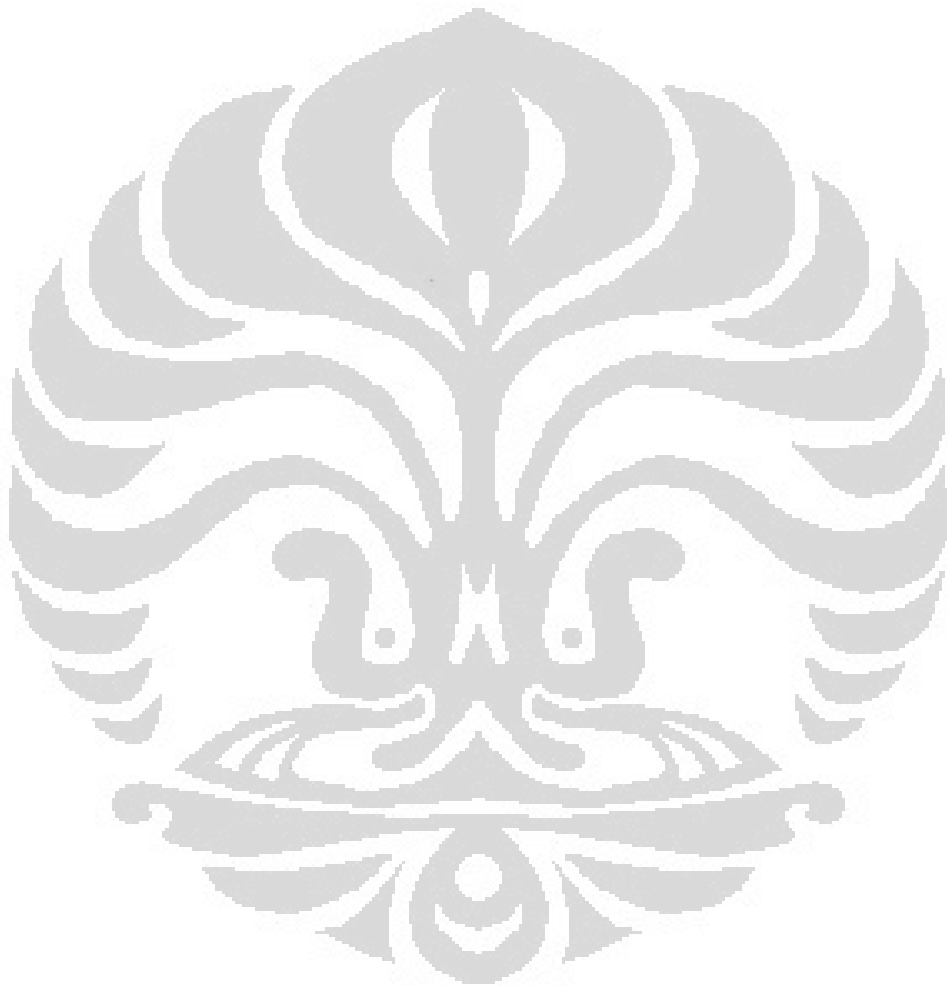
Name : Wiji Suwarno  
Study Program : Library science and Information  
Tittle : Implementation of librarian code of Ethics: Case Studies  
in Badan Arsip dan Perpustakaan Province of Central  
Java.

The thesis is to discuss about the implementation of librarian code of ethics constructed the Librarian Association of Indonesia (IPI) 2006 amongs librarians in Badan Arsip dan Perpustakaan Province of Central Java within the technical implementing unit. It is a qualitative research with the method of analysis of case studies. The result of this research indicates that librarian code of ethics and Javanesse culture are corroborete one another, which understanding and values are developed by ethics, religion, and culture in the daily live, particularly at job environment. The implementation efforts are carried out by doing the task perfectly and faithfully relied on regulation. This research is to become a donation for the knowledge development, to help socialization code of ethics , and to become recommendation to IPI.

Key word: Ethics, Librarian, code of ethics values, culture.

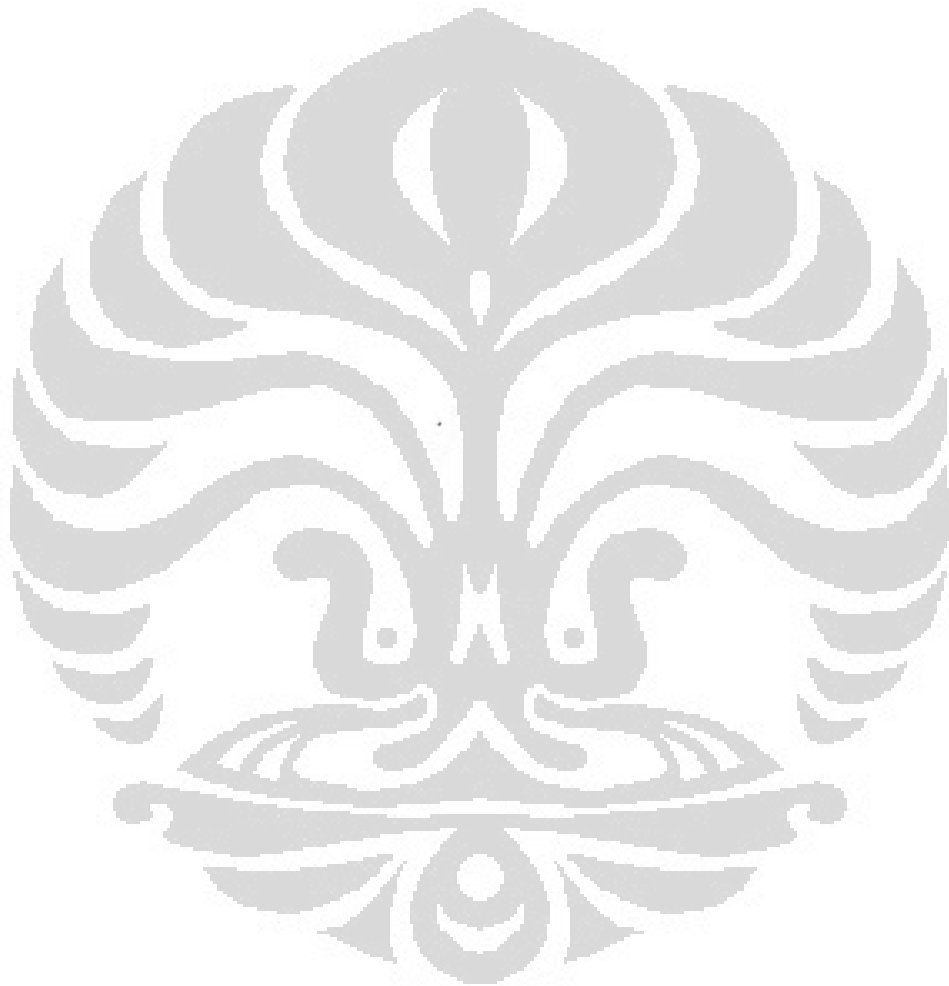
## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.2 Tingkatan budaya organisasi ..... 31  
Gambar 2.4 Struktur organisasi UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah ..39



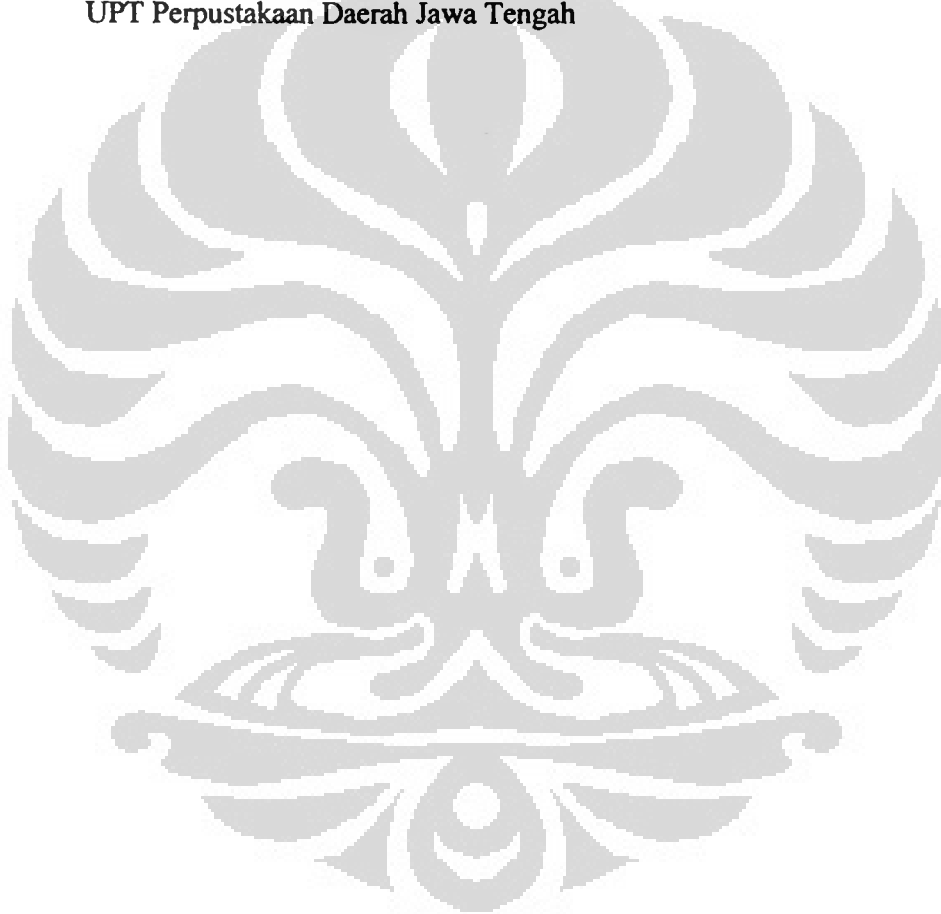
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Catatan lapangan ( <i>field research</i> ) .....	34
Tabel 2.4 Daftar nama pustakawan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal penelitian
- Lampiran 2. Kode etik pustakawan Indonesia tahun 2006
- Lampiran 3. Reduksi data wawancara
- Lampiran 4. Reduksi data observasi
- Lampiran 5. Catatan dan rekomendasi
- Lampiran 6. Cuplikan Peraturan Gubernur Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Batasan penelitian.....	4
1.3 Rumusan masalah .....	4
1.4 Tujuan penelitian .....	4
1.5 Manfaat penelitian .....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Etika, profesi, dan etika profesi .....	6
2.1.1 Etika .....	6
2.1.2 Profesi .....	10
2.1.3 Etika Profesi .....	12
2.2 Kode etik pustakawan .....	15
2.2.1 Pengertian kode etik .....	15
2.2.2 Sejarah .....	16
2.2.3 Tujuan .....	18
2.2.4 Fungsi .....	19
2.2.5 Substansi .....	20
2.2.5.1 Sikap dasar pustakawan.....	21
2.2.5.2 Hubungan dengan pengguna .....	23
2.2.5.3 Hubungan dengan antar pustakawan .....	25
2.2.5.4 Hubungan dengan perpustakaan .....	27
2.2.5.5 Hubungan dengan organisasi profesi .....	27
2.2.5.6 Hubungan dengan masyarakat .....	28
2.3 Aspek-aspek implementasi .....	29
2.3.1 Pemahaman (Asumsi) .....	29
2.3.2 Nilai-nilai .....	30
2.3.3 Usaha implementasi .....	30
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Sifat Penelitian .....	32
3.3 Pemilihan Informan .....	32

3.4	Prosedur penelitian .....	32
3.4.1	Tahap perencanaan penelitian .....	33
3.4.2	Tahap pelaksanaan penelitian .....	33
3.4.3	Tahap penulisan laporan penelitian .....	33
3.5	Waktu dan tempat penelitian .....	33
3.6	Metode pengumpulan data .....	33
3.6.1	Observasi .....	34
3.6.2	Analisis dokumen .....	34
3.6.3	Wawancara .....	34
3.7	Teknik analisis data .....	35
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1	Profil .....	37
4.1.1	Visi.....	37
4.1.2	Misi .....	37
4.1.3	Sejarah Singkat .....	37
4.1.4	Struktur Organisasi .....	39
4.1.5	Data Pustakawan .....	40
4.2	Data penelitian dan pembahasan .....	41
4.2.1	Pemahaman pustakawan tentang kode etik pustakawan. 41	
4.2.1.1	Pengertian kode etik .....	41
4.2.1.2	Pentingnya kode etik bagi pustakawan .....	43
4.2.2	Nilai-nilai kode etik pustakawan .....	44
4.2.3	Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah.....	45
4.2.4	Kendala-kendala Implementasi Kode Etik Pustakawan. 84	
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
5.1	Kesimpulan .....	88
5.2	Saran-saran .....	89
	<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>90</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Masalah etika bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan umat manusia, tetapi justru menjadi sesuatu yang amat penting untuk senantiasa diperhatikan. Mengingat, etika erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Keharmonisan interaksi antar individu dalam masyarakat tidak lepas dari etika yang sanggup menyelaraskan perbedaan yang terjadi. Sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menolong merupakan contoh simbol bahwa manusia memiliki etika. Tidak terkecuali dalam lingkup kerja perpustakaan, pustakawan sebagai salah satu pendukung hidupnya perpustakaan dituntut memiliki etika agar tercipta interaksi yang harmonis dan suasana kerja yang kondusif. Pustakawan adalah sebuah profesi. Pustakawan juga merupakan individu yang hidup dan melakukan segala kegiatan. Artinya, bahwa ketika sebutan sebagai pustakawan disandang, maka etika profesi pun melekat pada dirinya.

Masalah etika pada profesi pustakawan diatur dalam suatu kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Pustakawan (KEP). Kode etik ini mengikat kepada pustakawan sebagai anggota profesinya. Pustakawan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No 43, 2007). Artinya bahwa yang disebut pustakawan adalah orang yang benar-benar mengerti tentang ilmu perpustakaan, setidaknya pernah mendapat pelatihan tentang kepustakawanan yang kemudian diberi tugas dan tanggung jawab oleh lembaga yang merekrut (berwenang) untuk bekerja di perpustakaan sesuai dengan kualifikasi ilmu yang dimilikinya. Bahkan lebih luas lagi Hermawan dan Zen (2006:107), mengatakan bahwa pustakawan itu tidak saja terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, melainkan juga pegawai non-PNS.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan



tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Menurut Sulistyono-Basuki (2001), tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang gerak para profesional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya, dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak profesional. Maka, menurut Melvil Dewey, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan pustakawan terletak pada etika yang dimiliki (Bopp and Smith, 2001:29).

Di luar negeri penelitian tentang Kode Etik Pustakawan, pernah dilakukan oleh Kathy Hofman, seorang direktur eksekutif *Research Medical Library* pada Universitas Texas dan sekaligus ketua Komisi Tanggung Jawab dan Hak Profesional dari TLA (*Texas Library Association*) periode 2002-2005. Penelitian ini dilakukan kepada anggota TLA. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan bahwa kode etik mendapat tanggapan beragam dari para pustakawan, kode etik pustakawan belum dikenal secara menyeluruh oleh pustakawan anggota TLA dan karena belum dikenal, maka Kode Etik Pustakawan tidak dihiraukan pustakawan, sehingga yang seharusnya menjadi orientasi dalam tugas sehari-hari ini, belum efektif dilaksanakan. Bisa jadi kasus ini pun terjadi di tempat lain, tidak terkecuali di Perpustakaan Daerah (baca: Perpustakaan Daerah) pada Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah.

Menurut salah satu pustakawannya, Kode Etik Pustakawan sudah dimiliki Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan mayoritas pustakawannya sudah mengetahui bahwa kode etik tersebut ada. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, kode etik ini belum dapat dilaksanakan secara utuh, atau belum semua pustakawan melaksanakan kode etik ini. Sebagai contoh terdapat kasus pustakawan yang *stagnan* dengan kemampuannya. Ia tidak mau belajar mengetik dengan komputer karena beragam alasan, seperti: tidak relevan dengan bidang tugas yang diberikan kepadanya, merasa sudah tidak mampu, dan lain-lain. Maka ia memilih untuk bekerja apa adanya seperti yang biasa dilakukan. Padahal dalam kode etik dikatakan bahwa pustakawan dalam kaitannya dengan pengembangan diri, ia wajib berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan kemampuan diri.

Contoh kasus lain, terdapat pustakawan yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Misalnya komputer, pustakawan menggunakan

komputer untuk mengakses layanan internet di kantor selain untuk kepentingan tugas kantor, menggunakan komputer untuk mengetik tugas pribadinya, atau yang lainnya. Padahal kode etik menghendaki agar pustakawan menghindari memanfaatkan fasilitas kantor atau posisinya demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Berangkat dari kasus yang diungkapkan oleh salah satu pustakawan Perpustakaan Jawa Tengah dan dengan memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan Katty Hofman di atas, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Jawa Tengah. Implementasi di sini dimaknakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam upaya melaksanakan aturan atau mempraktikkan kewajiban-kewajiban tertulis yang terkandung dalam Kode Etik Pustakawan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi.

Beberapa alasan lain ketertarikan penulis ingin meneliti di Perpustakaan Jawa Tengah ini: *pertama*, menurut salah satu pustakawan Perpustakaan Jawa Tengah yang telah diwawancarai, mayoritas pustakawan menjadi anggota IPI, yang penulis asumsikan mengerti tentang Kode Etik Pustakawan sehingga diharapkan memperoleh informasi (data) dari informan yang relevan dengan tujuan penelitian ini. *Kedua*, Perpustakaan Jawa Tengah adalah perpustakaan umum yang memiliki pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang baik, yaitu D3 sampai S2 dari berbagai disiplin ilmu, sehingga akan memudahkan komunikasi antara peneliti dengan informan. *Ketiga*, karena Perpustakaan merupakan perpustakaan umum, maka pustakawannya adalah berasal dari berbagai daerah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga memungkinkan upaya pustakawan dalam mengimplementasikan kode etik ini bervariasi.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan pada:

Bagaimana implementasi Kode Etik Pustakawan di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan?
- b. Nilai-nilai apa saja yang muncul dari pemahaman pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan?
- c. Bagaimana usaha-usaha pustakawan dalam rangka mengimplementasikan Kode Etik Pustakawan?
- d. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kode etik pustakawan?

### **1.3 Batasan penelitian**

Untuk menghindari meluasnya ranah penelitian, maka penulis memberikan batasan penelitian pada kewajiban-kewajiban pustakawan dalam Kode Etik Pustakawan yang diterbitkan oleh IPI tahun 2006.

### **1.4 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi Kode Etik Pustakawan di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah terkait dengan pemahaman, nilai-nilai dan usaha (*effort*) yang dilakukan pustakawan, serta kendala-kendalanya, dalam rangka menjalankan rutinitas (budaya) kerja sehari-hari.

### **1.5 Manfaat penelitian**

Penelitian tentang Kode Etik Pustakawan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

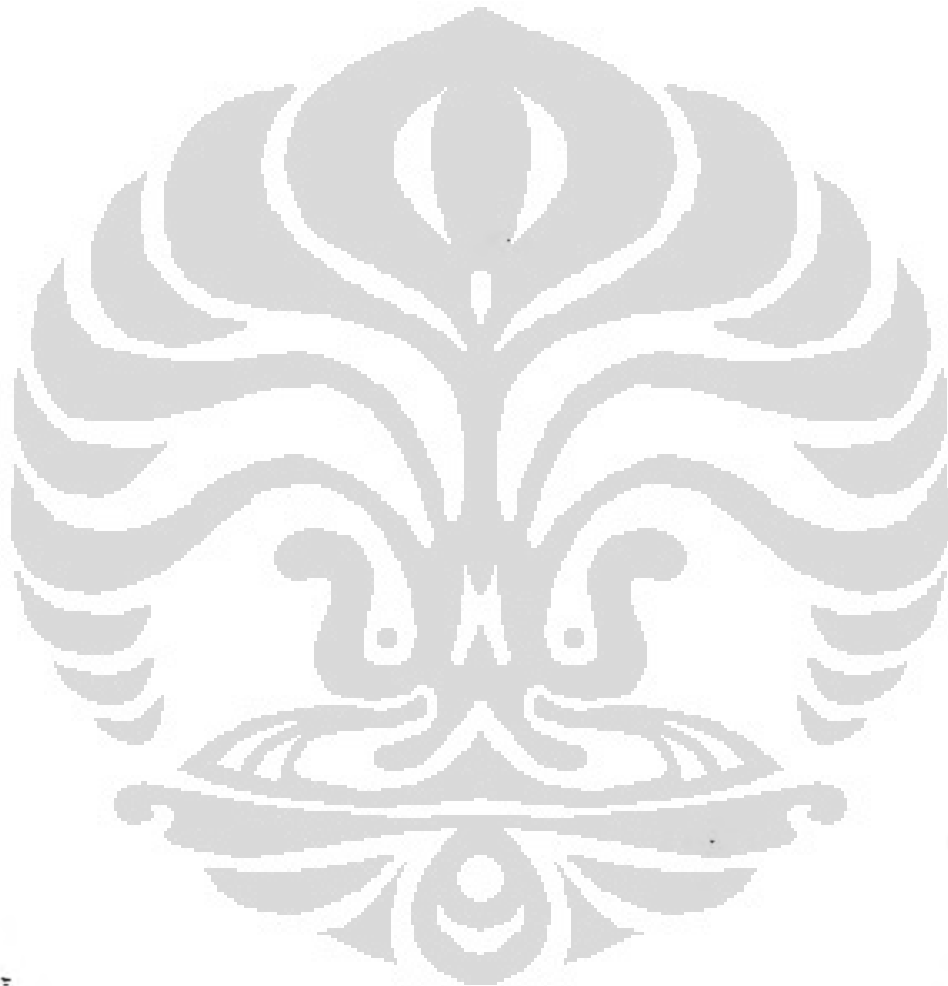
#### **1.5.1 Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah menambah kanzanah pengetahuan tentang Kode Etik Pustakawan yang selama ini belum dipelajari pada perkuliahan atau pendidikan formal lainnya, khususnya bagi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia.

### 1.5.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme kerja pustakawan, khususnya anggota IPI.
- b. Membantu IPI dalam sosialisasi Kode Etik Pustakawan.
- c. Menghasilkan masukan-masukan bagi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Kode Etik Pustakawan merupakan pijakan awal bagi para profesional di bidang perpustakaan (pustakawan) dalam melaksanakan tugasnya di tempat ia bekerja, di mana di dalamnya memberikan pedoman tingkah laku yang dapat menghindarkan diri dari tindakan yang tidak profesional. Dengan kata lain kode etik syarat dengan pemberlakuan etika yang secara naluriah dimiliki setiap individu. Untuk memahami kode etik pustakawan, kiranya perlu disampaikan mengenai etika dan hal lain yang berkaitan dengan profesi pustakawan ini. Berikut penjelasan mengenai etika, profesi, etika profesi, yang akhirnya mendudukkan persoalan pada munculnya sebuah kode etik dalam kehidupan profesi.

#### 2.1 Etika, profesi, dan etika profesi

##### 2.1.1 Etika

Kata etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti adat, kebiasaan, dan praktik. Dalam bahasa Inggris sering digunakan dengan istilah *ethics*. Velasquez (1987) mengemukakan bahwa etika memiliki kesamaan dengan perkataan benar atau salah.

Kurang dari satu dasawarsa yang lalu Velasquez, Andre, Shank, S.J dan Meyer, mempertanyakan mengenai definisi etika kepada pemustaka. Etika menjadi pembicaraan hangat di kalangan pustakawan. Dari penelitiannya Velasquez dan kawan-kawan mendapati pengertian etika sebagai berikut:

*"Ethics has to do with what my feelings tell me is right or wrong."*

*"Ethics has to do with my religious beliefs."*

*"Being ethical is doing what the law requires."*

*"Ethics consists of the standards of behavior our society accepts."*

(Velasquez dkk, 1987)

Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan benar dan salah. Etika adalah sesuatu harus dilakukan dengan berdasar nilai agama.

Beretika adalah melakukan sesuatu berdasarkan hukum dan etika itu sendiri terdiri dari standar tingkah laku yang diterima dalam lingkungan masyarakat.

Aristoteles menggunakan istilah ini mencakup ide karakter dan disposisi. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan pembuatnya itu sendiri.

Dalam literatur lain dikatakan oleh Sims (2003) bahwa *Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values.* Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa *ethics is a philosophical term derived from the Greek word "ethos," meaning character or custom.*

Etika merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan baik dan tidak baik, dan apa yang menjadi kewajiban moral. Etika dapat juga menyangkut seperangkat prinsip-prinsip moral maupun seperangkat nilai.

Menurut Bertens (2004:5) etika adalah suatu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan oleh manusia atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lebih dalam lagi Bertens (2004:6) mengartikan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban moral (akhlak). Dengan demikian etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

Namun tetap saja etika mempunyai fungsi yang sama dengan norma dan moralitas, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup. Tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan, inilah caranya, sedangkan etika harus mempersoalkan terlebih dahulu apakah harus melangkah dengan cara itu dan mengapa harus dengan cara itu. (Prasetyo,2008)

Untuk menjadikan seseorang itu memiliki etika yang baik, Tronto (1994:127-130) mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi titik tolaknya, yaitu: kepedulian sosial, sebagai unsur yang pertama. Unsur kedua yaitu motivasi menjaga, yang diasumsikan sebagai tanggung jawab. Unsur ketiga yaitu

pengabdian, yang diaktualisasikan dalam kerja, bahwa seseorang itu butuh untuk bekerja. Dari beberapa elemen ini kemudian muncul empat unsur etika yaitu:

- a. Penuh perhatian (*attentiveness*), yaitu dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, sifat penuh perhatian ini diperlukan sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain, terutama ketika seseorang membutuhkan bantuan.
- b. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu suatu bentuk kesolehan sosial dalam rangka menerima konsekuensi dari apa-apa yang dilakukan.
- c. Kemampuan (*competence*), yaitu merupakan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh setiap individu dalam rangka mempertahankan hidup.
- d. Kemampuan menanggapi (*responsiveness*), yaitu merupakan bentuk kemampuan bereaksi untuk menanggapi sesuatu hal yang muncul, dan menggugah keinginan untuk merespon keberadaannya.

Berbicara mengenai etika tidak lepas dari unsur moral yang memang melekat pada diri manusia sebagai individu. Menurut Haidt (2006) dalam tulisannya mengemukakan bahwa "moral" biasa mengacu pada beberapa kondisi, di antaranya adalah:

- a. Mengacu pada suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti kebiasaan suatu kelompok (agama, adat), atau kebiasaan dalam perilaku perorangan.
- b. Mengacu pada suatu kebiasaan berperilaku baik yang telah disepakati oleh semua orang dengan alasan yang rasional atau masuk akal.

Menurut Spaeman (1982:9) moral ini ada sebenarnya berangkat dorongan hati yang memiliki tujuan yang diposisikan sebagai suatu sumber energi dari dalam dan kemudian moral ini dilihat sebagai suatu jenis penekanan batin dari kebebasan yang tidak terbatas. Artinya bahwa moral ini merupakan sikap yang dimulai dari keinginan hati untuk tidak berbuat sebeb-as-bebasnya, tetapi ada penekanan untuk lebih menentukan sikap yang dianggap tidak menyalahi norma yang berlaku dalam lingkungan dimana individu itu hidup.

Secara etimologi, kata moral berasal dari kata Latin, *moralis* merupakan padanan dari kata *mos* atau *moris* dan kata *mores*. *Mos* atau *moris* berarti adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku dan kelakuan. (Said, 1996). Sedangkan *mores* berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Dengan

demikian, moral menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain. Moralitas yang sering disebut ethos ialah sikap manusia berkenaan dengan hukum moral yang didasarkan atas kebebasannya. Tindakan yang baik secara moral ialah tindakan bebas manusia yang mengafirmasikan nilai etis objektif dan yang mengafirmasikan hukum moral. Tindakan yang buruk secara moral adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai etis dan hukum moral.

Berbeda dengan etika, Lebih lanjut Said (1996) mengatakan bahwa moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai. Dan selanjutnya pemakaian kata etika lebih dititikberatkan pada soal-soal sistem norma. Dengan demikian etika ini didasarkan atas fakta yang terjadi di masyarakat. Sedangkan moral lebih menitikberatkan pada soal perbuatan manusia itu sendiri.

Kaitan antara etika dan norma adalah bahwa etika merupakan ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Etika, seperti yang disebut sebelumnya, merupakan bentuk pemikiran yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran itu mempunyai lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif (tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya). Ini artinya pemikiran seseorang tidak mutlak atau harus "monoton" pada satu arah saja, yang dapat mengakibatkan penafsiran tunggal yang cenderung kaku, egois. Itu sebabnya kadang-kadang pluralisme pemikiran tentang moral diperlukan karena:

- a. Pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya dan agama yang hidup berdampingan
- b. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional
- c. Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Norma moral adalah tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Ada perbedaan antara kebaikan



moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai anggota masyarakat sedangkan kebaikan pada umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja (Said, 1996), misalnya pustakawan pada pemustaka.

### 2.1.2 Profesi

Bukan suatu kerahasiaan jika untuk menjadi seorang yang profesional harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini berbeda dengan pekerjaan biasa (*occupation*).

Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *professus* yang makna semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan, pengakuan (Harefa,2004:121). Profesi berarti pula bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Profesi adalah pekerjaan, tetapi semua pekerjaan belum tentu suatu profesi. Suatu pekerjaan tidak mensyaratkan hal-hal khusus seperti halnya pendidikan, dan semata-mata bertujuan untuk mencari nafkah dan/ atau kekayaan materiil-duniawi. Bedanya dengan profesi, ada unsur pengabdian di dalamnya. Menurut Arifin (2008) dalam suatu artikelnya mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk menjelaskan pengertian profesi, yaitu:

#### 2.1.2.1 Pendekatan berdasarkan definisi

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

### 2.1.2.2 Pendekatan Berdasarkan Ciri

Dalam definisi professional tersirat keharusan suatu profesional yang mensyaratkan pengetahuan formal yang menunjukkan hubungan antara profesi dengan dunia pendidikan. Lembaga pendidikan ini merupakan lembaga yang mengembangkan dan meneruskan pengetahuan profesional.

Karena pandangan lain menganggap bahwa hingga sekarang tidak ada definisi yang memuaskan tentang profesi yang diperoleh dari buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri profesi. Arifin (2006) juga mengutarakan bahwa secara umum ada 3 (tiga) ciri suatu profesi, yaitu:

- a. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi.
- b. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Komponen intelektual merupakan karakteristik profesional yang bertugas utama memberikan nasihat dan bantuan menyangkut bidang keahliannya yang rata-rata tidak diketahui atau dipahami orang awam. Jadi memberikan konsultasi bukannya memberikan barang merupakan ciri profesi.
- c. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Dengan kata lain profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan sendiri.

Lebih lanjut Arifin (2006) menjabarkan profesionalisme dalam tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian "jasa profesi" ialah:

- a. bahwa kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil.
- b. bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat.
- c. bahwa kerja seorang profesional -- diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral -- harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi.

Ketiga watak kerja tersebut mencoba menempatkan kaum profesional (kelompok sosial berkeahlian) untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjual-belikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan umat manusia.

Istilah profesional erat pula kaitannya dengan profesionalisme. Pengertian sederhana profesional adalah berkaitan dengan profesi, yaitu memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (Supriyanto,2003:4). Kartosedono (2003:2) menambahkan bahwa tanggung jawab utama pelaksanaan tugas pustakawan profesional dituntut adanya keikhlasan, kejujuran, dan pengabdian dalam melayani masyarakat pemakai perpustakaan, serta mempunyai tanggung jawab pada publik, pustakawan profesional bekerja atas aturan etika profesional. Maister (1998:23) mengatakan bahwa dalam kata profesionalisme mengandung penekanan arti pada sebuah sikap, budi pekerti, dan tingkah laku dan bukan pada suatu paket kemampuan teknis yang canggih. Bersikap profesional berarti bersikap sesuai dengan koridor hukum serta aturan yang berlaku dan tentunya didukung oleh kemampuan intelektual yang bagus. Dengan demikian konsep profesionalisme dalam pengertian ini lebih pada usaha untuk bekerja, bersikap dan bertindak sesuai dengan etika profesi untuk menghindarkan diri dari sikap yang tidak profesional, atau dengan kata lain seorang pustakawan dikatakan tidak profesional apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

### 2.1.3 Etika Profesi

Istilah etika profesi terdiri dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Suatu profesi akan senantiasa eksis jika dalam operasionalnya menganut suatu etika, yang kemudian etika inilah yang menjadi pijakan bagi asosiasi atau organisasi profesi (sebagai wadah perkumpulan para profesional) yang bertujuan membela, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik dari nasabah, insititusi, badan induknya maupun dari profesi lainnya, serta keterlaksanaan tujuan profesionalnya.

Salah satu produk dari suatu organisasi profesi adalah etika profesi yang dituangkan pada kode etik profesi. Etika profesi ini merupakan bagian dari etika

sosial yaitu merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis apabila berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan (Magniz-Suseno, 1989). Keberadaan etika profesi menjadi barometer anggota profesi dalam rangka menjalin hubungan dengan kliennya atau dengan profesi yang lain. Rubin (2004:324) menyatakan bahwa etika bagi para profesional di bidang informasi merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap nilai-nilai dari pelayanan, termasuk di dalamnya adalah keharusan menghormati sesama, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat.

Etika profesi berisi norma-norma atau peraturan yang harus dipatuhi dan dihindari oleh anggota profesi pada waktu melakukan tugasnya, sehingga berlaku suatu "keharusan" dua pihak, yang disebut dengan hak dan kewajiban. Hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Supaya hak tersebut bisa terlaksana harus ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak tersebut. Kewajiban untuk memenuhi hak tersebut disebut dengan kewajiban (Zubair, 1995:59). Dengan demikian bagi anggota profesi wajib mematuhi norma etika profesi dan bagi yang melanggar norma yang berlaku tersebut, organisasi mempunyai hak memberikan sanksi sesuai peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Sanksi ini dapat berbentuk hukuman disiplin (ringan, sedang atau berat), administratif atau bahkan dapat menjadi suatu delik hukum (perdata atau pidana) tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Anggota profesi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi apabila yang bersangkutan dirugikan oleh orang atau lembaga lain sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kalau di dalam pengamalan profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan (honorarium) yang diterimakan, maka hal itu semata hanya sekedar "tanda kehormatan" (*honour*) demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja. Apalagi bila dikaitkan dengan berbagai macam persoalan, praktik nyata, maupun penyimpangan yang banyak kita jumpai di dalam aplikasi pengamalan profesi di lapangan yang jauh dari idealisme pengabdian dan tegaknya kehormatan diri (profesi).

Sementara itu pula, kaum profesional secara sadar mencoba menghimpun dirinya dalam sebuah organisasi profesi (yang cenderung dirancang secara eksklusif) yang memiliki visi dan misi untuk menjaga tegaknya kehormatan profesi, mengontrol praktik-praktik pengamalan dan pengembangan kualitas keahlian/ kepakaran, serta menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang telah disepakati bersama.

Dalam *Code of Professional Ethics* (APA,2003:4), suatu etika profesi menuntut memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral anggotanya yang berupa:

- a. *Respect for rights and dignity of the person*, yaitu prinsip yang selalu menghormati hak dan maratabat manusia
- b. *Competence*, yaitu kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni
- c. *Responsibility*, yaitu tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas.
- d. *Integrity*, yaitu tidak terpisah-pisah antara hak dan kewajiban, selalu ada keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya.

Prinsip etika profesi tersebut merupakan suatu standar yang dapat dilakukan oleh setiap orang sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Maka *the American Library Association* (ALA) memberikan rambu-rambu kompetensi dalam kode etiknya, yang mengandung suatu amanat bahwa kode etik sesungguhnya mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal sebagai berikut:

- a. Kecakapan profesional, yaitu bekerja keras untuk memelihara kecakapan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
- b. Kerjasama, jujur, adil, dan menghormati kepentingan orang lain.
- c. Bekerja secara profesional, membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dalam bidang informasi.
- d. Menghormati hak-hak orang lain, mengakui karya orang lain, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat semua orang.

(ALA, 2008)

## 2.2 Kode Etik Pustakawan

### 2.2.1 Pengertian

Kode etik dilihat dari asal kata (*etimologi*) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata *code*, diantaranya adalah: Pertama, tingkah laku, perilaku (*behaviour*), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Kedua, pengaturan atas undang-undang, tertulis yang harus diikuti.

Etik dalam bentuk tunggal memiliki makna sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat (*people's behaviour and attitudes*). Kata etik (*ethics*) dalam bentuk jamak bermakna sejumlah ketentuan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk (Hermawan dan Zen, 2006).

Berbagai pendapat mengenai pengertian kode etik:

- a. Frans Magniz-Suseno (1989) mendefinisikan bahwa kode etik adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktikannya.
- b. Dalam Harrolds Librarian's Glossary and Reference Books (Harold, 1995:518) dikemukakan bahwa kode etik adalah '*A document setting out the norms of professional conduct and behaviour required of members of a professional association*'. Berdasarkan definisi tersebut di atas berarti bahwa kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional.
- c. Dalam International Encyclopedia of Information and Library Science (Feather, 1997), kode etik masuk dalam "*code of professional conduct*", yaitu "*a set of standards of ethical behaviour expected of individual members of professional association.*"
- d. Sulityo-Basuki (2001) mendefinisikan Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik

menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi landasan perilaku anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka melaksanakan kewajiban profesionalnya di dalam kehidupan bermasyarakat

### 2.2.2 Sejarah

Mengingat pentingnya kode etik, asosiasi pustakawan menerbitkannya untuk digunakan sebagai landasan operasional bidang perpustakaan. Kode etik ini memiliki sejarah panjang dalam pembentukan, pengembangan dan sosialisasinya. Kepustakawanan berkembang lebih dahulu di negara-negara barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Sejalan dengan itu maka Kode Etik Pustakawan pertama kali muncul di negara barat dalam sebuah paper di *Pratt Institute Library School* tahun 1903. Dalam hal ini Mary A. Plummer (Feather, 1997) mengemukakan bahwa *doctors, lawyer, and ministers, college professors, officers of the army and navy, have a certain code which presupposes that they are gentlemen, and wish to remain so. Librarians and educators in general have their code still to make.*

Dikatakannya bahwa dokter, pengacara dan menteri, professor maupun pegawai militer pada umumnya, memiliki kode etik yang mengikatnya. Pelanggaran terhadapnya berarti melanggar prinsip. Tidak terkecuali pustakawan maupun tenaga pendidik, juga memiliki kode etik yang mengikatnya sebagai anggota profesi.

Di samping itu pernyataan serupa juga muncul dalam *Bulletin of the American Library association* dan *The Library Journal* dalam judul *Librarian's Canon of Ethics* oleh Bolton pada tahun 1909. pada tahun 1922 muncul sebuah proposal kode etik dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Proposal ini terdiri dari 30 bagian yang dianalisis secara

profesional dan ditampilkan oleh *Council of American Library Association* pada bulan Desember 1929.

Pada tahun 1939, kode etik ini ditampilkan secara lengkap di *ALA Bulletin*, terdiri dari lima bagian besar, yaitu:

- a. Hubungan pustakawan dengan pemerintah,
- b. Hubungan pustakawan dengan pemakai,
- c. Hubungan pustakawan dengan staf di perpustakaan
- d. Hubungan pustakawan dengan profesinya, dan
- e. Hubungan pustakawan dengan masyarakat

Kemudian naskah tersebut direvisi ulang oleh *Code of Ethics Committee of the ALA*. Menurut Hofman (2005:7) *American Library Association* (ALA) membuat kode etik ini pada tahun 1939, yang kemudian mengalami beberapa kali revisi, dan yang terakhir adalah tahun 1981, kemudian diadopsi lagi oleh dewan ALA tahun 1995. dalam tahun 2002, *Texas Library Association* (TLA) mengadopsi kode etik ini sebagai kode etik profesi.

Di Inggris perhatian terhadap kode etik pustakawan dimulai oleh *Library Association* (LA). Salah satu topik LA adalah masalah sensor tahun 1963. masalah ini berhubungan erat dengan kode etik sebagai landasan awal menuju kebebasan informasi. LA kemudian membentuk badan yang mendiskusikan tiga masalah, yaitu sensor, kode etik, dan kebebasan informasi. Hasil dari badan tersebut adalah *Code of Profesional Conduct* yang dipublikasikan pada bulan September 1983.

Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Kode etik pustakawan merupakan bagian yang terpisahkan dari AD/ART IPI dimulai sejak tahun 1993, 1997, yang diperbaharui pada 19 September 2002 pada kongres IPI ke IX di Batu, Malang, Jawa Timur, dan disempurnakan kembali pada tanggal 15 Nopember 2006 di Denpasar, Bali.



### 2.2.3 Tujuan

Menurut Hermawan dan Zen (2206), pada dasarnya tujuan kode etik suatu profesi adalah sebagai berikut:

*Pertama*, menjaga martabat dan moral profesi. Kode etik profesi sering disebut sebagai kode kehormatan profesi, sebab di dalamnya memuat aturan-aturan moral yang mengatur perilaku yang semestinya dilakukan oleh anggota profesi agar terhindar dari *dekadensi* moral yang menurunkan martabat dirinya sebagai anggota masyarakat. Maka, salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moralnya. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi, akan berimbas pada baiknya citra atau *image* yang tinggi di masyarakat.

*Kedua*, memelihara hubungan anggota profesi. Kode etik dibuat juga untuk mengatur hubungan antara anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antara sesama anggota profesi. Satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan mendukung keberhasilan bersama.

*Ketiga*, meningkatkan pengabdian anggota profesi. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdian mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.

*Keempat*, meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban-kewajiban agar para anggota profesi berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

*Kelima*, melindungi masyarakat pemakai. Profesi seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang

tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama.

Kode etik pustakawan adalah kewajiban yang harus dilakukan pustakawan dalam melakukan kegiatannya. Pada sisi lain, kode etik ini dapat pula sebagai jaminan profesi terhadap pengguna jasa pustakawan. Berikut tujuan yang tertuang dalam pasal (2) kode etik pustakawan Indonesia tahun 2006, yaitu:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan;
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;
- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
- d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

#### 2.2.4 Fungsi

Russel Browden, yang dikutip oleh Hermawan dan Zen (2006:100) menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan di Inggris adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi.
- b. Mendorong anggota untuk mematuhi "*LA's Charter and Byelaws*"
- c. Menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi atau asosiasi pustakawan.
- d. Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu (1) senantiasa mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya; (2) menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi, pelatihan, atau tugas pustakawan lainnya.
- e. Tugas utama anggota adalah melayani pelanggan (*client*)
- f. Menempatkan anggota dengan kewajiban untuk memfasilitasi terhadap alur informasi dan ide-ide dan melindungi serta mendorong hak setiap individu

untuk bebas dan hak akses yang sama terhadap sumber informasi tanpa diskriminasi dan dalam batas-batas hukum

- g. Anggota harus memberikan kemampuan mereka yang terbaik dalam kewajiban kontrak yang harus dibayar kepada yang mempekerjakannya
- h. Anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi atas ras warna kulit, kepercayaan atau jenis kelamin
- i. Anggota tidak boleh membocorkan rahasia atau membocorkan setiap bahan pustaka yang harus dirahasiakan.
- j. Menjamin setiap tindakan dan keputusan anggota semata-mata berdasarkan pertimbangan profesional.

Sedangkan Fankel, seperti yang dikutip oleh Bjorner (1991:321) mengemukakan bahwa fungsi kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktik
- b. Sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut
- c. Memberi kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi
- d. Memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat
- e. Melindungi pengaruh profesi
- f. Menghentikan tindakan yang tidak etis dengan menyediakan sanksi atau dengan melaporkan tindakan yang tidak etis tersebut.
- g. Menyediakan sistem untuk mendukung profesi terhadap permintaan yang tidak logis dari orang luar.
- h. Merupakan forum keputusan dalam debat antar anggota atau antara anggota dengan orang luar.

#### 2.2.5 Substansi

Kode Etik Pustakawan Indonesia memiliki substansi yang dijabarkan dalam berbagai kewajiban yang dimiliki pustakawan, yaitu hubungannya dengan pribadi yang dijabarkan dalam sikap dasar pustakawan, pengguna, antar pustakawan,

perpustakaan, organisasi profesi dan dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat lebih jelas dengan pemaparan sebagai berikut:

#### 2.2.5.1 Sikap dasar pustakawan

Kode etik pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh IPI pada tanggal 15 November 2006 menuangkan beberapa sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan, yaitu:

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Tugas pustakawan adalah melayani pemustaka dengan baik. Maka dalam kode etik ini pustakawan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat pemustaka untuk kemudian memberikan layanan sesuai dengan harapan pemustaka.

- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Pustakawan adalah orang yang telah memiliki ilmu di bidang perpustakaan. Ini artinya ia memiliki kompetensi di bidang perpustakaan yang harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu, terutama bidang kepustakawanan. Seperti yang dikatakan oleh Hermawan dan Zen (2006) bahwa kewajiban ini dimaksudkan agar pustakawan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mengerti perkembangan dan kemajuan bidang profesinya, sehingga dapat dikatakan bahwa pustakawan di Indonesia ini selalu *up to date*, tidak ketinggalan perkembangan informasi dan pengetahuan yang memang senantiasa berkembang.

- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Pustakawan adalah manusia yang hidup sebagai makhluk pribadi dan sosial. Kaitannya dengan profesi pustakawan, pustakawan selain bertanggung jawab terhadap dirinya, ia bertanggung jawab dengan profesi pustakawan yang

disandangnya. Sikapnya sebagai seorang pustakawan harus dibedakan dengan sikapnya sebagai pribadi. Seperti yang dikemukakan oleh Hemawan dan Zen (2006) bahwa Kewajiban pustakawan ini menyiratkan makna bahwa pustakawan Indonesia harus bertindak profesional dalam tugasnya. Artinya, Ia harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesional. Pustakawan harus mengerti *the right place and the right time* dalam tugasnya. Ia harus mengerti benar kapan saatnya serius dan kapan tidak serius dan mengerti benar dimana dan bagaimana seharusnya bersikap.

d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional.

Pustakawan sebagai seorang yang profesional dituntut bersikap dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap tugas yang dibebankan dilakukan atau dikerjakan secara profesional, begitu pula ketika memutuskan sesuatu harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme.

e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Pustakawan bukan profesi yang profit. Keuntungan yang didapat pustakawan adalah dari jasa profesi yang telah dilakukannya. Hal ini mengisyaratkan sebagai larangan kepada pustakawan untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang menyebabkan terganggunya nama baik profesi pustakawan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Kode Etik Pustakawan Indonesia menghendaki pustakawan berlaku jujur, bersih dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan, dan juga agar fasilitas yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin (Hemawan dan Zen, 2006).

- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Pustakawan adalah individu yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian pustakawan tidak lepas dari interaksinya dengan orang lain. Untuk menjaga martabatnya dan profesinya pustakawan dituntut untuk dapat berinteraksi dan melayani masyarakat dengan baik, santun dan bijaksana.

#### 2.2.5.2 Hubungan dengan pengguna/ pemustaka

Sesungguhnya kepentingan utama pustakawan ialah pemustaka yang dulu istilah ini dikenal dengan istilah pengguna, klien. Kewajiban pustakawan kepada masyarakat yang dimuat dalam Kode Etik Pustakawan yang dikeluarkan IPI meliputi:

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak perorangan atas informasi disini bermakna sebagai hak seseorang (pemustaka) mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, dan kemudian menjadi tugas pustakawan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya. Pelayanan di sini dapat bermakna bahwa pustakawan memberikan pelayanan atas prinsip pelayanan prima (cepat, tepat, mudah, murah, tertib, dan tuntas), pelayanan dilakukan dengan sopan dengan berprinsip 4 (empat) S, yaitu senyum, salam, sopan dan santun (Hermawan dan Zen, 2006). Artinya pemustaka adalah orang yang harus diberikan pelayanan dengan baik tanpa harus membedakan ras, agama, status sosial, ekonomi dan lain-lain ketika ia mencari informasi di perpustakaan. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pemustaka ini benar-benar menunjukkan keprofesionalan pustakawan dalam bekerja dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan. Pemustaka juga dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya untuk kepentingannya tanpa harus diketahui oleh pustakawan sebagai pengelola informasi di perpustakaan. Dengan demikian pustakawan dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang telah diakses oleh pemustaka, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Melindungi hak privasi dan kerahasiaan yang disebut di sini bermakna bahwa pemustaka memiliki hak untuk dilindungi segala privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dengan demikian pustakawan dituntut untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan tersebut. Dengan kata lain pustakawan harus menyembunyikan atau tidak mengumumkan sesuatu yang bersifat rahasia terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pemustakaya.

- d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Sejalan dengan pustakawan yang memiliki kewajiban melindungi hak privasi pemustaka, pustakawan harus pula mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Artinya bahwa informasi yang dikelola oleh pustakawan, terutama yang menyangkut karya seseorang baik sendiri maupun bersama-sama yang lain, berupa buku, majalah, kaset, disket, CD dan program komputer, dan lain sebagainya adalah karya yang memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi. Untuk itu pustakawan harus konsekuen dengan profesinya untuk melindungi hak cipta penulisnya dengan mencegah oknum-oknum yang ingin menggunakan karya tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan Undang-undang.

### 2.2.5.3 Hubungan antar pustakawan

Pada pasal 5 kode etik pustakawan dicantumkan mengenai hubungan antar pustakawan sebagai berikut:

- a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Poin ini nampaknya satu makna dengan pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan tentang sikap dasar pustakawan. Dengan demikian kaitannya dengan hubungan antar pustakawan dapat diartikan dengan cara bekerjasama dengan pustakawan lain, pustakawan berusaha berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya.

- b. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Sejalan dengan pemikiran pada poin a, antara pustakawan satu dengan lainnya saling memberikan masukan atas kinerja dan hasil kerja yang telah dilaksanakan, sehingga ke depan dapat meningkatkan kompetensinya baik secara individu maupun kelompok dan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja yang lebih memuaskan.

- c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan.

Makna yang tersirat pada kewajiban ini adalah bahwa pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati, adil dan berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, rasa persaudaraan, dan tanggung jawab, sehingga tumbuh rasa senasib dan sepenanggungan.



- d. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

Pustakawan adalah manusia sama halnya profesi yang lainnya. Manusia memiliki tingkat kesadaran yang lebih baik dibanding makhluk Tuhan yang lainnya. Untuk itu sebagai pustakawan, kode etik menghendaki agar pustakawan memiliki kesadaran yang tinggi, kesetiaan, dan memberikan yang terbaik kepada Korps atau kelompok profesinya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan pustakawan itu sendiri.

- e. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Selain hal yang disebut tadi, sesama rekan kerja pustakawan berkewajiban saling menegur, mengingatkan jika terjadi kekeliruan atau penyimpangan yang dapat merugikan nama baik diri, profesi. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap nama baik lembaga tempat bekerja. Sikap saling mendorong dalam peningkatan prestasi dan karir juga sangat dianjurkan, sehingga akan meningkat pula kualitas diri dan profesinya yang kemudian akan diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan bersama.

Makna yang tersirat pada kewajiban ini adalah bahwa pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati, dan adil. Sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, rasa persaudaraan, dan tanggung jawab, sehingga tumbuh rasa senasib dan sepenanggungan baik di dalam dinas maupun di luar kedinasan. Selain hal yang disebut tadi, sesama rekan kerja pustakawan berkewajiban saling menegur, mengingatkan jika terjadi kekeliruan atau penyimpangan yang dapat merugikan nama baik diri, profesi, apatah lagi nama baik lembaga tempat bekerja, dan juga saling mendorong dalam peningkatan prestasi dan karir sehingga akan meningkat pula kualitas diri dan profesinya yang kemudian akan diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan bersama.

#### 2.2.5.4 Hubungan dengan perpustakaan.

- a. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan.

Perpustakaan adalah tempat bekerja seorang pustakawan. Maju tidaknya perpustakaan bergantung kepada kompetensi pustakawannya dalam bekerja dan merealisasikan program-programnya.

- b. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan.

Semakin baik suatu perpustakaan, maka perpustakaan itu akan semakin menarik minat untuk dikunjungi oleh pemustaka. Untuk itu pustakawan sebagai pengelola informasi ini dituntut untuk aktif dan bertanggung jawab mengembangkan perpustakaan agar di masa depan perpustakaan menjadi pilihan utama pemustaka dalam mencari informasi.

- c. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Tidak ada perpustakaan yang lengkap dan tidak ada pustakawan yang mampu meng-cover semua kebutuhan pemustaka seorang diri. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pustakawan untuk bisa bekerja sama dengan perpustakaan dan pustakawan lain agar perpustakaan yang satu melengkapi perpustakaan yang lain tanpa membedakan jenis perpustakaan yang ada.

#### 2.2.5.5 Hubungan dengan organisasi profesi

Kewajiban pustakawan hubungannya dengan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia telah mengatur mengenai iuran yang harus diberikan pustakawan kepada organisasi profesinya (IPI). Iuran ini digunakan sebagai dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan IPI.

- b. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) merupakan organisasi yang menjadi penggerak kegiatan pustakawan di Indonesia. Sebagai organisasi, IPI memiliki program kegiatan yang melibatkan anggotanya. Kode etik menganjurkan pustakawan untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan penuh rasa tanggung jawab.

- c. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Pustakawan adalah individu yang syarat dengan kepentingan pribadi. Konsekuensi ketika pustakawan telah bergabung dengan organisasi, maka ia dituntut untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadinya.

#### 2.2.5.6 Hubungan dengan masyarakat

Kewajiban pustakawan hubungannya dengan masyarakat mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Kewajiban ini berarti pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, moral dan bekerja sama dengan berbagai organisasi lain untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan nama baik profesi, instansi tempat bekerja, bahkan bangsa dan negara.

- b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang berbudaya. Masyarakat memiliki tradisi yang mencirikan eksistensinya. Pustakawan yang hidup di dalamnya dapat dikatakan menjadi bagian dari budaya tersebut. Kewajiban ini mengisyaratkan agar pustakawan memberikan nilai tambah bagi kebudayaan di masyarakat.

## **2.2 Aspek-aspek implementasi Kode Etik Pustakawan**

### **2.2.1 Pemahaman (Asumsi)**

Berbicara mengenai kode etik, tidak dapat lepas dari organisasi pembuatnya. Kode etik berada dalam wilayah suatu organisasi yang memiliki anggota yang berperan untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pelaksanaan terhadap nilai-nilai oleh anggota organisasi yang diawali dari suatu pemahaman inilah yang menurut Scheine (2002) disebut sebagai suatu budaya organisasi.

Pemahaman atau asumsi menjadi panduan bagi anggota organisasi untuk memandang atau memahami sesuatu. Asumsi dasar tersebut sulit untuk didebat maupun diubah, sebab menyangkut struktur kognitif yang menjadi unsur paling dalam dari suatu budaya. Scheine (2002) berpendapat bahwa pola yang mendasari asumsi dasar itu dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan kognitif bagi individu dan kelompok.

Sebagai salah satu jenis asumsi, Passer dan Smith (2007) mengatakan pemahaman adalah hal penting dalam proses terbentuknya budaya, sebab pemahaman merupakan suatu proses yang didahului dengan proses menilai sesuatu dengan indera. Penginderaan ini sebagai stimulan yang dapat menimbulkan respon bagi seseorang. Dengan demikian proses penginderaan ini merupakan pendahuluan dari pemahaman dan akan berlangsung setiap saat pada waktu individu menerima suatu stimulus, yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sesuai dengan apa yang ditangkap oleh alat inderanya. Tidak berbeda jauh dengan pendapat yang dikemukakan oleh Walgito (1992:69) bahwa pemahaman merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang ditangkap oleh alat indera sehingga merupakan sesuatu yang berarti dalam diri individu.

Matlin (1999:114) mengatakan bahwa pemahaman ini sebenarnya merupakan interpretasi dari apa yang didapat, kemudian mengorganisasikan dan memberi makna kepadanya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka pemahaman dapat dikatakan adalah sebagai suatu pengertian atau pemaknaan terhadap objek yang diterima oleh indera manusia (individu).

### 2.2.2 Nilai-nilai

Nilai-nilai adalah kesadaran tertinggi individu yang merupakan seperangkat konsep yang hidup di dalam pikiran individu manusia dalam suatu kelompok, yang dianggap bernilai dan berharga sehingga menjadi pedoman hidup. Nilai-nilai ini yang menentukan benar, salah, baik atau buruk. Nilai-nilai pendukung adalah nilai-nilai yang sudah dimiliki atau tersebar kepada seluruh anggota suatu kelompok (Hatch, 1997).

Kode etik merupakan hasil pemikiran pustakawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, yaitu IPI, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman sikap atau tingkah laku dalam melaksanakan tugas profesinya. Ini artinya kode etik memiliki nilai-nilai yang telah disepakati oleh anggota profesi, dan disosialisasikan kepada pustakawan untuk dipahami dan dilaksanakan.

### 2.2.3 Usaha implementasi

Usaha (*effort*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan sesuatu yang telah direncanakan. Dalam hal ini usaha muncul dari pemahaman terhadap suatu objek, yaitu Kode etik pustakawan yang memunculkan nilai-nilai yang menuntut untuk dilaksanakan.

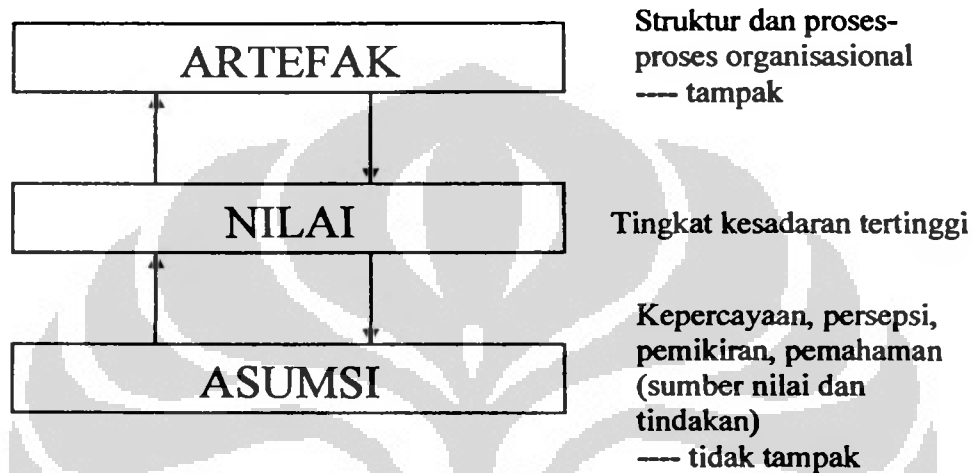
Searchrm (2009) mendefinisikan *Implementation is the carrying out, execution, or practice of a plan, a method, or any design for doing something.* Artinya bahwa implementasi adalah pelaksanaan, menindaklanjuti suatu rencana, suatu metode atau desain ke dalam suatu tindakan. Ungkapan *any design for doing some thing* mengandung pesan adanya suatu mekanisme, yang dimulai dari memikirkan, menilai sampai melakukan. Ini artinya implementasi bukan sekedar aktivitas semata tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian antara pemahaman, nilai-nilai, serta usaha-usaha implementasi ini merupakan suatu siklus yang saling terkait. Usaha-usaha yang terwujud dalam suatu tindakan, sesungguhnya merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai yang didapat dari pemahaman terhadap suatu objek.

Siklus antara pemahaman, nilai dan usaha atau tindakan ini dijelaskan oleh Hatch (1997) ketika membahan budaya organisasi, yang secara umum

mengatakan bahwa pemahaman yang dimaksud disini digolongkan dalam *assumption*, nilai-nilai termasuk dalam *value*, dan usaha yang dapat dikatakan sebagai suatu perilaku termasuk dalam kategori *artefact*.

Untuk memperjelas proses ketiganya, yaitu asumsi (pemahaman), nilai dan artefak (perilaku) ini, dapat digambarkan dalam bagan tingkatan budaya sebagai berikut:



Gambar 1.2. Tingkatan Budaya

Sumber: Hatch (1997:211)

Dari bagan di atas, dijelaskan oleh Hatch (1997) bahwa sesuatu yang dapat diamati, didengar dan dirasakan atau dengan kata lain dapat diindera adalah artefak. Artefak ini mencakup atribut organisasi, arsitektur gedung, teknologi, bahasa untuk berkomunikasi, perilaku atau usaha, fakta-fakta, simbol, ritual, mitos, ciptaan-ciptaan dan lain-lain. Menurut Stueart (2002) Artefak adalah manifestasi yang nampak dari asumsi-asumsi budaya yang mendasar. Ini artinya artefak dapat dikatakan suatu simbol yang merupakan inti dari kehidupan suatu kelompok atau organisasi. Artefak mudah dibedakan dan relatif mudah dipahami. Usaha pustakawan dalam rangka menjalankan Kode Etik Pustakawan merupakan salah satu contoh artefak yang ada di perpustakaan.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengingat terdapatnya variabel yang membutuhkan penjabaran melalui penyelidikan langsung kepada informan. Penelitian kualitatif ini merupakan suatu proses menggali keterangan atau informasi yang dijadikan suatu data tentang suatu kejadian, mengurai fakta, berdasarkan gejala yang diamati.

Suatu perilaku akan menjadi jelas jika diamati dari dekat dan mendalam. Seperti yang dikemukakan oleh Gorman and Clayton (2005:3) bahwa *the key assumption made by qualitative researches is that the meaning of events, occurrences and interactions can be understood only through the eyes of actual participants in specific situations*. Dengan demikian, kunci dari penelitian kualitatif adalah memaknai suatu peristiwa atau fenomena, kejadian dan interaksi yang dipahami melalui pengamatan langsung dari situasi-situasi yang khusus.

### 3.2 Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *eksploratif-deskriptif*, yaitu mengeksplorasi pendapat, tanggapan, atau usaha pustakawan dan mendeskripsikan hasil pengumpulan data yang didapat dari informan.

### 3.3 Pemilihan informan

Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu menentukan informan yang telah ditentukan kriterianya, yaitu pustakawan yang bekerja di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, menjadi anggota IPI, memiliki pendidikan minimal S1 ilmu Perpustakaan, serta memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

### 3.4 Prosedur penelitian

Prosedur merupakan langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini prosedur penelitiannya terdiri dari tiga tahap, yaitu:

#### **3.4.1 Tahap perencanaan penelitian**

Yaitu tahap di mana sebuah penelitian dipersiapkan. Pada tahap ini peneliti mengoleksi beberapa judul, kemudian mengonsultasikannya dengan pembimbing. Setelah salah satu judul tersebut dipilih dan di setujui pembimbing, selanjutnya peneliti menyusun latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan maupun manfaat penelitian, serta beberapa alternatif metode, sampai akhirnya diterima dan disepakati pembimbing sebagai acuan untuk melakukan penelitian.

#### **3.4.2 Tahap pelaksanaan penelitian**

Yaitu tahap di mana sebuah penelitian dilakukan atau dilaksanakan. Pada tahap ini, peneliti langsung meneliti ke lapangan, yaitu di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses pengumpulan data atau informasi tentang implementasi kode etik pustakawan, yang kemudian diolah dan dianalisis menurut metode yang telah ditentukan.

#### **3.4.3 Tahap penulisan laporan penelitian**

Yaitu tahap di mana sebuah penelitian telah selesai dilakukan. Pada tahap peneliti menyusun laporan dalam bentuk tertulis yang dikemas menjadi sebuah tesis yang terdiri latar belakang masalah, tinjauan pustaka, laporan hasil penelitian, analisis data, sampai dengan kesimpulan.

(Arikunto, 2004)

#### **3.5 Waktu dan tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan bulan Februari-April 2009 di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, dengan waktu kegiatan terlampir.

#### **3.6 Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data ini adalah cara suatu data diperoleh sehingga menjadi bahan kajian. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:



### 3.6.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki oleh penulis. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi lapangan baik pada saat pra-penelitian maupun saat penelitian berlangsung, serta pengamatan terhadap perilaku informannya sebagai data pendukung.

Dalam rangka pengumpulan data ini, observasi yang dilakukan didukung dengan pencatatan-pencatatan terhadap perilaku informan yang teramati pada jam kerja yang dilakukan bersamaan dengan proses wawancara dengan menggunakan suatu catatan lapangan (*field notes*).

Tabel 1.3. Catatan lapangan (*fields notes*)

Kode	Kegiatan	interpretasi
(kode untuk menentukan kategori)	(pertanyaan, jawaban, dan kegiatan lain)	Penjelasan data-data kegiatan

### 3.6.2 Analisis dokumen

Analisis dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengamati data-data tercatat yang kemudian digunakan sebagai data mengenai sesuatu hal tentang lokasi penelitian, profil perpustakaan tempat penelitian, struktur organisasi, lokasi penelitian dan data informan penelitian dan lain-lain

### 3.6.3 Wawancara

Metode wawancara adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan. yang terbagi dalam beberapa tahap. *Pertama* adalah identifikasi informan sebagai dasar pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan tentang identitas ini dimaksudkan sebagai langkah awal mengetahui kompetensi informan di bidang ilmu perpustakaan, khususnya pengetahuan mengenai bidang kerja dan kode etik pustakawan. Tahap *kedua* adalah pertanyaan umum seputar kode etik pustakawan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman informan terhadap kode etik pustakawan. Tahap *ketiga* adalah pertanyaan mengenai nilai-nilai yang dapat diambil dari pemahaman pustakawan terhadap kode etik. Tahap *keempat* adalah pertanyaan mengenai usaha-usaha apa saja yang

dilakukan pustakawan dalam rangka mengimplementasikan kode etik pustakawan dan kendala-kendala yang ditemui. Tahap *kelima* adalah pertanyaan terbuka mengenai harapan, kritik, atau usulan bagaimana sebaiknya kode etik ini diposisikan. Pertanyaan ini dimaksudkan memberikan peluang kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terstruktur dengan alat bantu rekam berupa *tape recorder*, maupun alat bantu lain.

### 3.7 Metode analisis data

Untuk melakukan analisis data digunakan metode studi kasus untuk mengungkap kasus-kasus terkait dengan hal yang terjadi di lapangan mengenai implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia, yang kemudian disampaikan oleh informan secara verbal dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan menggambarkan pula bagaimana perilaku pustakawan dalam usahanya menerapkan kode etik ini yang secara langsung dapat diamati selama melakukan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara apa adanya, baik yang berupa data dari hasil observasi, wawancara, atau komentar (tanggapan) maupun kritik saran yang disampaikan informan. Menurut Poerwandari (2007:191) interpretasi adalah upaya memahami data secara lebih ekstensif sekaligus mendalam yang beranjak dari apa yang secara langsung dikemukakan oleh informan, untuk mengembangkan struktur-struktur dan hubungan-hubungan bermakna yang tidak ditampilkan dalam teks (data mentah atau transkripsi wawancara).

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, menurut Irawan (2007) adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi.
- b. Mencatat data dalam bentuk teks (mentranskrip hasil wawancara) dengan apa adanya (*verbatim*).
- c. Memberikan kode (*coding*), agar data dapat diorganisasikan, sistematis dan rinci, sehingga memunculkan gambaran tentang topik yang sedang diteliti.

- d. Mengkategorikan data, yaitu menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu kategori.
- e. Penyimpulan/ interpretasi awal (sementara) terhadap setiap kategori data. Di sini perlu ditambahkan sedikit catatan dari peneliti sebagai reaksi terhadap data yang diperoleh. Dari hasil interpretasi ini dapat dilakukan kembali pengumpulan data dan melakukan kembali prosesnya.
- f. Triangulasi data, yaitu memadukan, membandingkan antara satu sumber data dengan data yang lain.
- g. Penyimpulan akhir, yaitu kesimpulan yang diambil setelah dirasa data sudah jenuh.



## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah**

Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah adalah perpustakaan umum yang memberikan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat propinsi Jawa Tengah. Hal ini tertuang dalam visi dan misinya yang dikemukakan sebagai berikut:

##### **4.1.1 Visi**

Terwujudnya masyarakat membaca dan belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi

##### **4.1.2 Misi**

Misi Perpustakaan Daerah pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Menciptakan dan mengembangkan kebiasaan membaca masyarakat
- b. Pemerataan memperoleh informasi bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah
- c. Mengembangkan kemitraan ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
- d. Mengembangkan jaringan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- e. Tersimpan dan tersebarluaskannya terbitan hasil karya masyarakat Jawa Tengah dan tentang Jawa Tengah.

##### **4.1.3 Sejarah Singkat**

Berdasarkan surat Keputusan Menteri P.P dan K RI No. 18165/keb tertanggal 23 Juli 1951 didirikan Perpustakaan Negara Semarang pada tanggal 1 Agustus 1951. Perpustakaan ini merupakan Perpustakaan Negara yang kedua di Indonesia setelah Perpustakaan Negara Yogyakarta.

Pada awal berdirinya, Perpustakaan ini menempati bekas gedung *Openbare leezaal Bibliotek* di Jl. Bojong (Jl. Pemuda No.147 Semarang). Sejak memiliki

gedung sendiri, perpustakaan mulai mandiri dan tidak tergantung pada instansi lain. Untuk meningkatkan peran perpustakaan sebagai sumber belajar seumur hidup, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 01990/1978, di mana perpustakaan Negara menjadi Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0950/0/1979 tanggal 29 Mei 1979 yang menetapkan Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Perpustakaan Wilayah tipe A.

Sejalan pembangunan nasional, perkembangan IPTEK dan semakin meningkatnya minat baca masyarakat Jawa Tengah. Gedung di Jl. Pemuda No. 147 Semarang tidak dapat menampung semua kegiatan penyelenggaraan perpustakaan, maka dibangunlah gedung perpustakaan baru yang lebih representatif di Jl. Sriwijaya No. 9A Semarang. Yang diresmikan penggunaannya tanggal 20 Maret 1987 oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bp. Soepardjo Roestam.

Dengan keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditingkatkan statusnya menjadi Perpustakaan Daerah dan merupakan satuan organisasi Perpustakaan Nasional yang berada di daerah.

Dengan keputusan Presiden No. 50 tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi yang merupakan instansi vertikal seorang Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI.

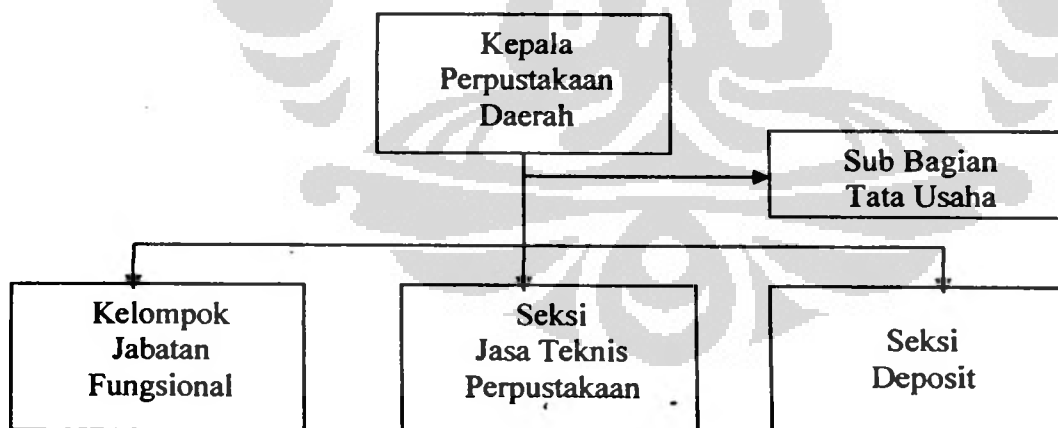
Dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dikeluarkanlah Perda No.9 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi kantor di lingkungan Pemerintahan Daerah maka Perpustakaan Nasional Provinsi Jawa Tengah diubah menjadi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai kantor yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten /kota serta peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah maka diadakan perubahan struktur organisasi dan tata kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah no 7 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah maka kantor Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah digabung dengan kantor Badan Arsip.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi

Penelitian ini melihat secara khusus salah satu unit kerja pada Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, yaitu UPT Perpustakaan, yang secara khusus memiliki struktur organisasi sendiri di bawah Badan Arsip dan Perpustakaan sebagai institusi induknya. Adapun struktur organisasi UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah terdiri dari kepala perpustakaan, sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional, seksi jasa teknis perpustakaan dan seksi deposit. Adapun garis kewenangan dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut:



Gambar 2.4 : Struktur Organisasi UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah  
(Sumber: Kepegawaian UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah)

#### 4.1.5 Data Pustakawan

UPT Perpustakaan (Perpusda) di bawah Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah memiliki pustakawan yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari pustakawan madya, pustakawan muda, pustakawan penyelia, pustakawan muda, pustakawan pertama dan pustakawan pelaksana. Adapun data pustakawan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Daftar nama pustakawan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Kondisi Maret 2009)

NO	NAMA	GOL/ RUANG	JABATAN
1	Drs. Sandiman	IV/a	Pustakawan Madya
2	Dra. Icuk Sukemi	IV/a	Pustakawan Madya
3	Sumarni, S.Sos	IV/a	Pustakawan Madya
4	Triyono, SH, SIP	III/d	Pustakawan Muda
5	Nugroho Sismartanto, S.Sos	III/d	Pustakawan Muda
6	Zulaekhah, SH.	III/d	Pustakawan Muda
7	Dra. Eko Sulistyowati	III/d	Pustakawan Muda
8	Drs. Bambang Agus Pamuji	III/d	Pustakawan Muda
9	Dra. Nana Kirana W	III/d	Pustakawan Muda
10	Woro Budi Astuti, S.Sos	III/c	Pustakawan Muda
11	Ngatmi	III/c	Pustakawan Penyelia
12	Bambang Hermawan	III/c	Pustakawan Penyelia
13	Ngatini	III/c	Pustakawan Penyelia
14	Sri Sukarni	III/c	Pustakawan Penyelia
15	Christiva Getasari, S.sos	III/c	Pustakawan Muda
16	Endang Wahyu Listiati, S.Sos	III/c	Pustakawan Muda
17	Nur Cahyati, S.sos	III/c	Pustakawan Muda
18	R. Trisno Budiarsi, S. Sos	III/c	Pustakawan Muda
19	Tri Widayanti, SS.	III/c	Pustakawan Muda
20	Hening Pujiastuti DW, S.Sos	III/c	Pustakawan Muda
21	A. Suwartono	III/c	Pustakawan penyelia
22	Suwarti	III/c	Pustakawan penyelia
23	Menik Sri Sugiharti, S.Sos	III/b	Pustakawan Muda
24	Satyarini Dyah Harjanti, S.Sos	III/b	Pustakawan Pertama
25	Wiwik Riyanti, S.Sos	III/b	Pustakawan Pertama
26	Dahlia Mahkota Riana S, S.Sos	III/b	Pustakawan Pertama
27	Trisila Iriani	III/b	Pustakawan Pelak.lanj
28	Tri Karyanti	II/c	Pustakawan Pelaksana
29	Dyah Nugraheni, SS	II/c	Pustakawan Pelaksana

## **4.2 Data penelitian dan pembahasan**

Data penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi kepada pustakawan-pustakawan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah selaku informan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) informan yang disamarkan dengan nama tokoh pewayangan, yaitu: Informan pertama disamarkan dengan nama Arjuna, informan kedua diberi nama Srikandi, informan ketiga diberi nama Sembadra, dan informan keempat diberi nama Bima.

Data penelitian ini sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut pemahaman, nilai-nilai, dan tindakan atau usaha (*effort*) yang dilakukan pustakawan dalam rangka mengimplementasikan Kode Etik Pustakawan Indonesia di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah.

### **4.2.1 Pemahaman Pustakawan tentang kode etik pustakawan**

Pemahaman merupakan proses kognitif dalam rangka memberikan makna terhadap suatu objek. Dalam konteks sebuah organisasi, pemahaman atau asumsi ini menjadi keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota organisasi. Karenanya pemahaman ini kemudian menjadi panduan bagi anggota organisasi untuk memandang atau memahami sesuatu. Scheine (2002) memandang bahwa pemahaman atau asumsi dasar tersebut sulit untuk didebat maupun diubah, sebab menyangkut struktur kognitif yang menjadi unsur paling dalam dari suatu budaya. Berikut ini disajikan hasil wawancara yang menyangkut pemahaman pustakawan mengenai Kode Etik Pustakawan Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

#### **4.2.1.1 Pengertian kode etik**

Kode etik sudah sejak lama dikenal di kalangan pustakawan. Namun hal tersebut belum bisa menjadi jaminan bagi pustakawan untuk mengetahui pengertian kode etik itu sendiri. Ketika wawancara dilakukan Arjuna, Srikandi, Sembadra dan Bima, memberikan definisi kode etik sebagai berikut:

“Kode etik adalah rambu-rambu untuk pustakawan. Begini, Profesi itu kan banyak bidangnya ya. Ada dokumentasi, ada arsip, ada perpustakaan. Kan



pekerjaannya ini hampir sama. Nah dengan adanya kode etik ini menghindari agar tidak *overlap*.” (Arjuna)

“Kode etik adalah aturan-aturan yang diberlakukan untuk pustakawan untuk kelancaran tugas sebagai pustakawan” (Srikandi)

“Kode etik adalah aturan-aturan kepastakawanan yang harus dilaksanakan oleh pustakawan. Sebenarnya kita sudah melaksanakan kode etik itu lho. Kita kan punya etika. Jadi menurut saya tanpa kode etik pun kita sudah bekerja berdasarkan etika kok. *Aku ra ngerti tapi bareng moco yo wis ngono* (aku tidak mengerti tapi setelah baca ya, seperti itu) berarti saya sudah melakukan.” (Sembadra)

“Kode etik adalah aturan atau rambu yang ditujukan pada pustakawan, agar pekerjaannya sesuai dengan jabatannya yang proporsional dan profesional dan untuk menjaga nama baik mereka” (Bima)

Menurut Arjuna kode etik pustakawan ini tidak populer di mata pustakawan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Propinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan belum ada sosialisasi yang maksimal dari IPI sebagai organisasi yang berkepentingan. Kode etik sebagai pengatur pekerjaan agar tidak *overlap* dimaksudkan sebagai penghindaran dari pekerjaan yang tumpah tindih kegiatan antara arsip dan perpustakaan yang mana sejak diterbitkannya PP No.41 tahun 2007 antara arsip dan perpustakaan digabung dalam satu instansi yang disebut Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah.

Menurut Srikandi, Kode Etik Pustakawan berfungsi sebagai suatu aturan untuk kejelasan kerja diantaranya agar jelas dalam melayani pengguna dan berinteraksi dengan masyarakat. Pemberlakuan kode etik ini, menurutnya bergantung IPI yang berkomitmen untuk membuat pustakawan menjadi lebih profesional.

Menurut Sembadra, Pada tingkat pelaksanaannya, kode etik sesungguhnya berdasar etika yang telah dimiliki oleh individu pustakawan. Namun demikian kode etik ini tetap diperlukan sebagai alat untuk mengatur pustakawan dalam bekerja. Hanya saja, menurut Sembadra, kode etik jarang disentuh atau bahkan dibaca dan dipahami oleh pustakawan. Hal ini dipahami sebagai kesalahan dalam sosialisasi.

Menurut Bima, Kode etik hendaknya tidak dipahami secara tekstual (*letter lux*), karena diyakini bahwa kode etik akan berubah sesuai dengan tuntutan zaman, dan fleksibel dalam rangka menjaga martabat pustakawan.

Dengan demikian secara umum menurut informan penelitian ini, kode etik dipahami sebagai aturan atau rambu-rambu yang diperuntukkan bagi pustakawan agar dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan professional. Sebagaimana yang dituangkan dalam UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bahwa kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.

#### 4.2.1.2 Pentingnya kode etik bagi pustakawan

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menegaskan bahwa kode etik adalah sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan (IPI, 2006:43). Dengan kata lain kode etik ini penting bagi pustakawan agar dapat bekerja secara teratur, dan professional. Pertanyaannya, apa pentingnya kode etik ini bagi pustakawan di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah?

“Keberadaan kode etik adalah sesuatu yang penting, tapi harus disosialisasikan dengan gencar agar kode etik tidak hanya akan menjadi teks semata, melainkan bisa menjadi alat yang bisa mengatur pustakawan dalam bekerja” (Arjuna)

“Kode etik diperlukan bagi pustakawan, agar pustakawan memiliki kerja yang jelas, pelayanan terhadap pengguna lebih teratur, hubungan dengan masyarakatnya juga lebih baik, sehingga kode etik memang perlu adanya”. (Srikandi)

“Kode etik tetap diperlukan oleh pustakawan selama bekerja agar pola kerjanya teratur. Tapi toh seandainya kode etik itu tidak ada pustakawan sesungguhnya sudah melaksanakannya” (Sembadra)

“Kode etik sangat dibutuhkan oleh pustakawan dalam arti, menjaga nama baik pustakawan yang selama ini belum banyak orang tahu ataupun kenal. Dengan adanya kode etik ini sedikit demi sedikit bisa mengangkat citra pustakawan itu melalui beberapa pengembangan-pengembangan tugas kerja di perpustakaan.” (Bima).

Dengan demikian kode etik ini pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja sebagai pedoman tingkah laku pustakawan dan sebagai sarana kontrol sosial yang berimbas pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada perpustakaan sehingga mengangkat citra pustakawan.

#### 4.2.2 Nilai-nilai kode etik pustakawan

Bertens (2004) mengatakan bahwa untuk menjelaskan pengertian nilai bukan menjadi perkara yang mudah. Setidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan sesuatu yang diinginkan. Maka menurutnya nilai adalah *the address of a yes*, sesuatu yang ditujukan untuk berkata ya.

Nilai-nilai menurut Hatch (1997) merupakan konsep yang hidup di dalam pikiran manusia dalam suatu kelompok, yang dianggap memiliki makna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai ini yang kemudian menentukan benar, salah, baik atau buruk. Kelompok yang dimaksud dalam konteks ini adalah kelompok pustakawan yang tergabung dalam Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang telah bermufakat untuk menciptakan suatu pedoman sikap yang dikenal dengan kode etik pustakawan. Dalam membuat pedoman sikap ini tentu berdasarkan nilai-nilai yang sudah dipahami oleh penyusunnya. Persoalan yang perlu digali adalah persoalan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik itu. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan menyangkut nilai-nilai kode etik pustakawan:

“Dalam kode etik mungkin ada unsur loyalitas, kerjasama, karena di dalamnya ada kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, profesi, dan lain-lain. Kalau di pemerintahan ya loyalnya kepada pimpinan dan instansi tempat bekerja. Ada lagi nilai yang belum disebutkan yaitu solidaritas...soalnya kode etik menuntut kita saling menghormati antar pustakawan” (Arjuna)

“Kode etik mengandung nilai-nilai yang kompleks... ada kerjasamanya, ada motivasinya” (Srikandi)

“Nilai-nilai dalam kode etik diantaranya nilai loyal dan kebersamaan, tergantung bagaimana kita menerjemahkan. Karena kode etik ada unsur

etiknya, maka kode etik ini identik *karo* (dengan) sikap sopan-santun” (Sembadra)

“Nilai-nilai kode etik yang saya tangkap adalah sebagaimana pernah dikatakan bahwa aturan-aturan tidak kaku ....bisa fleksibel selama tidak melanggar isi kode etik tersebut. Mungkin kita juga bisa kerjasama antar perpustakaan satu dengan yang lain, atau dalam segala hal lah yang berhubungan dengan ilmu perpustakaan dan informasi atau kepustakawanan. Kita juga bisa... dalam arti saling. Dalam arti saling, artinya kalau dibutuhkan baik kapasitasnya sebagai pustakawan maupun bukan, ketika dimintai bantuan oleh siapa saja, sebisa mungkin kita bantu, atau boleh dibilang ini harus tenggang rasa, gitu.” (Bima)

Dengan demikian nilai-nilai dalam kode etik pustakawan ini menurut para informan yang telah diwawancarai adalah loyalitas, kebersamaan, motivasi, kerja sama, tenggang rasa, saling menolong, dan solidaritas.

#### **4.2.3 Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah.**

Implementasi adalah suatu tindakan yang menerapkan suatu kaidah atau nilai atau norma tertentu yang telah dipahami dan menjadi standar dalam bertindak atau bersikap. Dalam konteks penelitian ini, Kode Etik Pustakawan adalah aturan atau rambu-rambu yang menjadi standar pelaksanaan tugas bagi pustakawan. Adapun implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### **4.2.3.1 Sikap Dasar Pustakawan**

Sikap dasar adalah sikap mental yang melekat pada diri individu yang mencerminkan watak seseorang. Sikap dasar penting untuk dilaksanakan oleh pustakawan sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi diri. Penelitian ini bertujuan menggali upaya (*effort*) yang dilakukan pemustaka.

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Tugas pustakawan secara umum adalah sebagai *public services* (pelayan masyarakat). Artinya segala perilaku maupun proses yang terjadi di perpustakaan sudah seharusnya berorientasi pada pengguna (*user oriented*). Ketika memberi pengarahan kepada mahasiswa JIP pada saat kunjungan ke IRC Jakarta, satu kata

kunci untuk keberhasilan pelayanan perpustakaan, menurut Dragovich (2007), kepala pada *Regional Resources Information Officer*, adalah *listen to your users* atau dengarkan keinginan pengguna. Maka nilai jual perpustakaan terletak pada pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik inilah yang sebenarnya diharapkan pemustaka pada umumnya, sehingga mereka merasa dihargai, dihormati, dan diperhatikan pustakawan. Pertanyaannya apakah sudah dilaksanakan dengan baik tugas itu? Untuk itu, penelitian ini mencoba menggali upaya-upaya yang dilakukan pustakawan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan pengguna pada khususnya.

“Sebenarnya rutinitas kerja ini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna. Misalnya saya. Saya kan di bagian pengolahan ini berusaha mengolah buku atau koleksi lain secepat dan setepat mungkin, sehingga nanti memudahkan pengguna untuk mengaksesnya.” (Arjuna)

Sebagai contoh Arjuna yang ditugaskan di bidang pengolahan, mengolah buku sesuai dengan ilmunya dan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin agar segera dapat diakses dengan mudah oleh pemustaka. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis ketika masuk ruangan Arjuna. Penulis melihat Arjuna sedang sibuk dengan pekerjaannya di depan komputer. Penulis dipersilahkan masuk, Arjuna menemui sebentar, kemudian meminta untuk menungguinya beberapa saat sambil ia merapikan meja kerja dan susunan buku yang sedang diolahnya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Srikandi:

“Kalau pekerjaan rutin ya memang tiap hari dilakukan, karena itu tugas pokok ya. Ini kan juga untuk pengguna. Coba kalau kita gak kerja ya, ... kebetulan saya kan di penerbitan majalah. Kalau majalah gak terbit gimana coba, padahal majalah ini juga dibuat untuk pengguna. Ya gitu tugas saya ya mengumpulkan naskah atau malah cari naskah, kaya *panjenengan* saya mintai, kan siapa tahu *panjenengan* punya tulisan yang bisa ikut meramaikan majalah Visi Pustakawan ini.” (Srikandi)

Menurut Srikandi, sejauh ini ia berusaha tetap melakukan pekerjaan rutin sebagai bentuk tanggung jawab kepada pengguna. Sebagai contoh, Srikandi yang salah satu tugasnya bidang penerbitan majalah, berusaha aktif mengumpulkan dan mencari naskah yang akan diterbitkan, disamping tugasnya di bidang layanan

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengamatan, bahwa pada waktu wawancara berlangsung, terlihat di atas meja kerja Srikandi terdapat tumpukan kertas yang ketika penulis bertanya, beliau membenarkan.

“Apa sedang sibuk bu, ini kok sepertinya siap kerja keras?” (Penulis)

“oooo ini to, enggak, ini beberapa artikel yang sudah masuk untuk penerbitan Juni nanti. *Panjenengan* punya tulisan po?, kita bisa terima dari mana saja kok, asal nanti layak terbit ya kita terbitkan.” (Srikandi)

Demikian pula dengan Sembadra yang menjawab pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa:

“Kalau saya, kerjakan yang di depan mata dulu. Soalnya kalau sudah di tunda-tunda biasanya gak selesai-selesai. Cuma memang pada prinsipnya pemustaka lebih harus diperhatikan ketimbang aspek lain. Itu idealnya....misalnya begini, kalau kelihatan ada pengguna yang bingung kita tanya, “*mas atau mbak...ada yang bisa saya bantu*”, misalnya. Atau kalau dia tanya ya kita jawab. Biasanya itu nanya posisi bukunya.” (Sembadra)

Menurut Sembadra, terkait dengan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya, Sembadra, sebagaimana Arjuna dan Srikandi, maka ia berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sebagai contoh, Sembadra yang bertugas di bidang layanan, secara rutin memberikan layanan kepada pemustaka dengan mempermudah pemustaka dalam rangka mengakses informasi.

“Nah tugas saya di sini kan membantu kepala badan, lebih dekat lagi adalah kepala UPT atau pimpinan di sini, dan tentu membantu tugas-tugas lain yang bisa saya kerjakan. Misalnya, tugas pokok saya kan di Audio Visual, tapi saya juga harus membantu menata buku di rak, mengajar, dan lain-lain, dan juga saya tetap berusaha melaksanakan tugas apapun yang dibebankan pada saya. Jadi itu, selama ini ya saya berusaha untuk selalu dalam koridor pustakawan, berusaha tidak melampaui batas atau porsi tugas saya, dan berusaha semampu saya untuk tetap dalam tugas-tugas pustakawan. Itu semua kan demi kepentingan pengguna juga kan?” (Bima)

Menurut Bima, ia berusaha melaksanakan tugas penuh tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya demi kepentingan pemustaka. Sebagai contoh, Bima bertugas di bidang layanan Audio Visual (AV), yaitu tugas berupa layanan CD Rom, penyimpanan informasi dalam bentuk digital. Sifat pelayanannya

adalah *free*, tidak dipungut biaya, dan bagi pemustaka yang kesulitan menggunakannya mendapat bimbingan dari Bima dan rekannya.

Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis pada saat menunggu Bima beberapa saat sebelum wawancara. Pada waktu itu Bima sedang melayani pengunjung yang pada saat itu adalah mahasiswa UNDIP yang sedang mencari data untuk penyelesaian tugas. Jadi dalam rangka menjalankan tugasnya, para informan memiliki semangat kerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, karena menurut penulis yang berkapasitas sebagai peneliti sekaligus pemustaka, mendapat pelayanan dengan baik, merespon kebutuhan penulis dengan baik, dan menunjukkan sikap yang humanis.

Dengan demikian terkait dengan kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan pengguna ini pustakawan berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan kebutuhan pemustakaya. Kondisi ini sesungguhnya telah mencerminkan kompetensi profesional sebagaimana yang ditetapkan oleh *Special Library Association* (SLA) yang dikutip oleh Sudarsono (2009,43) diantaranya yaitu menyediakan akses pada sumber daya informasi yang ada, baik yang terbit di luar atau yang diciptakan lembaga sendiri, mendayagunakannya dengan menggunakan sarana yang sesuai.

b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Kode etik pustakawan Indonesia menghendaki agar seluruh pustakawan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme (Hermawan dan Zen, 2006). Kewajiban ini dimaksudkan agar pustakawan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan pustakawan, dapat dilakukan secara formal atau informal, sendiri maupun bersama-sama.

“Untuk saya ya yang paling kelihatan ya seminar. Tapi seminarnya macem-macem. Kadang ada yang berhubungan dengan TI, internet, bahasa, macem-macem. Rata-rata itu. Ya mungkin lihat di internet ada seminar,

saya ikut gitu. Untuk mengikuti perkembangan ya baca-baca artikel, tulisan tentang perpustakaan, *browsing* di internet, gitu.” (Arjuna)

“Ya ikut-ikut seminar, kadang kalau ada bedah buku ya saya ikut. Untuk pemerataan ya gantian. Di sini dibuat jurnal kok mas. Siapa saja yang belum. Tapi ya disesuaikan dengan kompetensinya dan syarat-syaratnya. Jadi gak kok cuma *wong kuwi-kuwi terus* (orang itu-itu terus) to. Sampai-sampai peserta lain tanya “lho yang lain pada kemana kok sampeyan terus yang berangkat?”lha kan juga gak enak to. Terus kalau di sini siapa yang berangkat itu mempertanggungjawabkan hasilnya kok. Dia presentasikan hasil yang didapat. Menurut saya di sini teratur kok untuk urusan itu.” (Srikandi)

“Lho nek itu ya paling ikut seminar, diklat atau malah baca-baca sendiri kan lebih manfaat. Enak lho kalau sering ikut seminar tu. Ikut tapi yo kudu *tenanan* (serius) gitu. Lumayan kan bisa jadi obat jenuh kerja tapi juga dapat ilmu. Jadi ndak Cuma *melo-melo thok* (sekedar ikut aja). Nek aku mangkat ya harus dengerin benar-benar, kan percuma kalau sudah berangkat kok cuma ngantuk. Apa yang didapat coba?, lha kalau aku mendingan tidak usah berangkat saja. Lho ada orang yang cuma titip tanda tangan aja. Maksudnya dia itu sudah ditugaskan berangkat, tapi dia tidak berangkat. Dia malah titip tanda tangan sama temennya yang berangkat. Tapi untungnya aku tidak pernah nitip juga belum pernah dititipi. (Sembadra)

“Kalau kuliah gak ya, terus terang saya sudah jenuh. Mungkin bisa saja kuliah tapi nanti lah. Sekarang itu saya berusaha ikut seminar, TOT, loka karya dan lain-lain. Dengan saya ikut itu kan saya bisa ngomong ya, terutama pada saat mengajar. Dulu saya itu untuk komputer nol sama sekali. Kemudian saya belajar yang akhirnya bisa saya manfaatkan untuk ngajari orang lain juga. Jelas ini kan menambah pengetahuan to.” (Bima)

Dengan demikian dalam rangka mempertahankan kompetensi dan mengikuti perkembangan, para informan mengikuti kegiatan yang hampir sama jenisnya antara satu informan dengan yang lainnya, diantaranya adalah seminar, TOT, loka karya, diklat, dan lain-lain. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, selain melaksanakan tugas rutinnnya, sebagian dari informan juga mengajar baik pada *event* pendidikan pemakai maupun pada saat pembinaan perpustakaan di berbagai daerah.

Untuk menguatkan informasi ini, pihak kepegawaian memiliki data-data kegiatan yang telah diikuti oleh pustakawan di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah ini. Selanjutnya data tersebut dilampirkan pada bagian akhir penulisan ini.



- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Kewajiban ini mengisyaratkan bahwa seorang pustakawan harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya, dapat memisahkan kepentingan pribadi dan profesi. Sebagai seorang profesional, pustakawan harus dapat membagi antara berbagai kepentingan, sehingga timbul keseimbangan kerja.

Menurut Arjuna, dalam rangka membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi, ia memiliki pandangan bahwa membedakan sikap hidup pribadi dengan profesi dapat dilihat dari kesesuaian perilaku dengan aturan. Artinya bila aturan dilanggar ini menandakan bahwa seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada profesi. Misalnya saja ketika dihadapkan dengan kasus ada anggota keluarga atau teman dekat yang meminta tolong dipinjamkan buku di luar prosedur, sebut di luar jam buka atau jumlahnya lebih dari ketentuan.

“Kalau saya tentunya harus sesuai prosedur lah. Kalau umpamane kepepet ya pakai kartu saya atau gimana gitu, tapi yang penting prosedural”.  
(Arjuna)

Demikian pula dengan Srikandi yang diumpamakan menghadapi persoalan yang sama dengan Arjuna.

“Saya kan tidak di bagian layanan. Ya dulu sempat di layanan, tapi hanya 2 (dua) tahun, yang setelah itu saya dipindah ke Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, sampai sekarang ngurusi soal penerbitan majalah. Nah kalau saya yang di pelayanan boleh lah pinjam tapi atas nama saya, atau pada intinya peminjaman ini terkontrol. Kita berusaha gak membedakan apakah itu saudara, teman atau bukan, yang kita lihat itu adalah mereka yang butuh informasi di perpustakaan itu adalah *user* kita, begitu saja.” (Srikandi)

Berbeda dengan pertanyaan yang diajukan kepada Sembadra yang berupa kasus pernah atau tidaknya dihadapkan pada suatu pilihan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan profesi. Sembadra menanggapi dalam rangka membedakan sikap hidup profesi dengan pribadi, ia memilih melaksanakan tugas dahulu dibanding dengan kepentingan pribadinya. Hal ini dikatakan pada saat diberi pilihan antara tugas piket dengan kepentingan pribadi atau keluarga, ia

memilih selama bisa ditolelir, kepentingan keluarga bisa dilakukan setelah melaksanakan piket, karena piket tidak dilaksanakan setiap minggu, tetapi digilir atau jika ada kepentingan yang lebih mendesak, piket bisa digantikan oleh rekan yang lain.

“Pernah. Yang paling sering itu kalau pas piket hari minggu. Namanya piket, kan tidak semua masuk kantor kan. Lha enaknya piket ini dihitung lembur, dan itu digilir kok, artinya bisa juga pas bagian kita tapi ada kepentingan, bisa juga digantikan orang lain. Ya namanya tugas ya tetap harus mau, meski kadang-kadang itu bareng dengan agenda keluarga, sing *jagong* (menghadiri undangan) lah, sing ke tempat mbahe lah. Ya...saya pilih piket dulu. Kan tidak setiap minggu piket” (Sembadra)

Menurut Bima, dalam rangka memilih sikap hidup profesi dengan pribadi, Ia berpandangan bahwa bersikap tegas berdasarkan aturan yang berlaku dengan memberikan penjelasan seperlunya untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman, itu lebih baik daripada diam tanpa mencari solusi. Hal ini dikatakan pada saat dihadapkan dengan pilihan antara keluarga dengan profesi, antara prosedural dengan tidak prosedural.

“Sumpah mas, aku belum pernah kok yang namanya pinjam itu hanya via telepon, atau yang lainnnya, kalau pinjam ya ke perpustakaan. Kan ada kartu pinjamnya. Ya misalnya itu terjadi ya kita kasih penjelasan dulu lah ke saudara atau teman kita tadi, bahwa itu gak benar. Paling tidak kita minimalisir lah kesalahan-kesalahan itu, sehingga tidak jadi beban pikiran. Kalau saya merasa punya beban, saya selalu omongkan. Misalnya saya disuruh ini, tapi saya gak bisa, ya saya terus terang gak bisa”. (Bima)

Dengan demikian secara keseluruhan, para informan dalam penelitian ini menimbang kepentingan mana yang tidak bisa ditunda dan kepentingan mana yang bisa ditunda. Namun pada prinsipnya mereka berkomitmen untuk mementingkan kepentingan profesi dibanding kepentingan pribadi. Menurut pengalaman yang mereka utarakan, kepentingan keluarga diasumsikan lebih fleksibel, sehingga bisa ditunda pelaksanaannya.

Untuk kasus ini diantara informan ada yang bertugas keluar kantor selama beberapa hari. Misalnya, tanggal 14 -16 April 2009 di Klaten dalam rangka seleksi bahan pustaka, tanggal 5 Mei mengajar bimbingan teknis (bintek) di Ungaran, dan terakhir tanggal 28 Mei mengikuti seminar nasional di UNIKA

Semarang. Ini artinya mereka meninggalkan kepentingan yang lain untuk kepentingan profesi.

d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional.

Selaras dengan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia terus meningkat. Populasi pengguna jasa informasi, dari hari ke hari juga terus meningkat, bervariasi, multi aspek, mereka meminta pemenuhan kebutuhan informasi dengan segera. (Hermawan dan Zen, 2006). Tentu saja hal ini menuntut pustakawan bekerja secara profesional, mengaji dan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat. Secara khusus tujuan peningkatan kompetensi pustakawan, adalah untuk meningkatkan profesionalisme sebagai pelayan informasi yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pengguna jasa perpustakaan.

Menurut Arjuna Sikap profesional melekat pada pelaksanaan kerja, mengingat pekerjaan yang dilakukannya membutuhkan ilmu-ilmu khusus, artinya tidak semua orang bisa melakukan. Sebagai contoh di bidang pengolahan tempat Arjuna bertugas Ia menentukan kelas klasifikasi buku-buku berdasarkan ilmu yang telah diperolehnya.

“Kalau profesionalismenya tentang kerjaan ya mestinya begitu. Seperti saya mengolah buku kan mesti punya pengalaman, pendidikan, ada ilmu tentang klasifikasi gitu, lha tanpa itu kan tidak bisa. Kalau semua sikap yang ditanyakan ya...susah jawabnya. Lha apa kira-kira guyon (bercanda) itu juga di nilai profesional tidaknya?” (Arjuna)

Begitu juga dengan Srikandi yang berpandangan bahwa sikap profesional hanya dapat dilakukan dengan bekerja sebaik-baiknya dan sesuai kemampuan. Adapun untuk menilai sudah atau belum profesionalnya, bukan diri sendiri yang menilai melainkan orang lain yang melihat proses dan hasil kerjanya.

“Yang pasti saya bekerja sebaik-baiknya dan semampu saya lah. Soal profesional tidaknya biar orang yang menilai” (Srikandi)

Menurut Sembadra, dalam rangka menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional, Ia berpendapat bahwa sikap profesional sesungguhnya tidak diukur dari intensitas kerja yang dilaksanakan,

tetapi dari baik atau buruknya penilaian pemustaka terhadap pelayanan yang diberikan.

“Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Soalnya kan kita kerja yang penting kerja. Soal profesional atau ndaknya kan belakangan. Seperti kata saya tadi, yang penting kan pengguna merasa terlayani dengan baik, itu sudah profesional.” (Sembadra)

Berbeda dengan Bima, yang mengatakan bahwa salah satu ciri bersikap profesional adalah taat aturan dan tidak sewenang-wenang memberikan keputusan, kecuali diberikan mandat untuk memutuskan.

“Nah itu dia. Profesionalisme itu kan gampang ngomong adalah tindakan yang sesuai aturan kan. Jadi ya saya berusaha untuk taat aturan lah. Biar dikata orang saya sombong gak apa-apa lah yang penting saya gak menyalahi aturan.

Ada contoh gini mas, ada koleksi yang terpinjam satu atau dua hari, bahkan sampai berhari-hari itu ada, kita gak munafik itu ada. Tapi selaku petugas referens ya saya hanya bisa menghimbau, tidak memaksa, karena saya memang tidak punya wewenang untuk memaksa. Lha kecuali ada hitam di atas putih dari pimpinan untuk segala sesuatunya, maka saya baru bisa berbuat itu. Tapi saya sebagai pegawai yang sambil kuliah, sambil apa kan... kadang saya pinjam buat saya sendiri, dan mungkin teman lain juga ada yang seperti itu.” (Bima)

Dengan demikian profesional dipahami oleh informan penelitian ini adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan berdasar keahlian dan kemampuannya sehingga konsumen (pemustaka) mendapatkan pelayanan yang baik. Untuk melakukan hal yang profesional itu adalah dengan taat aturan, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya, dan bekerja semampunya. Seperti yang dikemukakan oleh Arifin (2009) bahwa sikap profesional adalah sikap yang tidak saja didasari oleh kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan saja, tetapi juga didasari unsur semangat pengabdian di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja.

e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Tidak mengambil keuntungan dari posisinya ini identik dengan menghindarkan diri dari memanfaatkan fasilitas yang disediakan karena kedudukannya untuk keuntungan pribadi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kode

etik menghendaki agar pustakawan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (Hermawan dan Zen, 2006). Dengan demikian diharapkan pustakawan dapat bekerja dengan jujur, bersih dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam rangka mengimplementasikan kewajiban ini Arjuna, Srikandi, Sembadra dan Bima memiliki pandangan sebagai berikut:

“Untuk kepentingan saya pribadi tidaklah. Belum...belum pernah. Tapi ya kalau memanfaatkan komputer, ngetik makalah ya saya pakai. tapi ya itu untuk kepentingan kantor. Kalau saya ngajar, terus makalah dibuat disini kan juga untuk kepentingan lembaga to. Singkatnya gini lah, selama tidak mengganggu kelancaran kerja pokok di kantor, gak apa-apalah ya. Lha kalau mengganggu ya tidaklah”. (Arjuna)

Berdasarkan pengamatan, dalam masa penelitian ini tidak melihat Arjuna menggunakan komputer untuk kerja lain selain pengolahan. Ada 3 komputer di ruangan Arjuna, yang difungsikan untuk alat bantu klasifikasi yang terhubung dengan internet, *input data*, dan proses pelabelan.

“Kalau memang fasilitas itu dipakai tapi tidak mengganggu aktivitas sih ya gak apa-apa.. tapi kalau sangat mengganggu kepentingan pekerjaan pokok ya gak usah dipakai. Ya menjaga diri sendiri lah. Lha kalau cuma minta kertas 5 atau 10 lembar ya gak apa-apalah. “*Dari pada gak ada kerja aku tak nyelesaikan tugas kuliahku*” gitu gak apa-apa, asal memang tidak mengganggu kelancaran pekerjaan”. (Srikandi)

Sejauh pengamatan selama penelitian, Srikandi pernah memperbolehkan penulis menggunakan kertas untuk *print out* artikel yang akan penulis kirimkan untuk majalah Visi Pustakawan, walaupun akhirnya penulis mengurungkan niat untuk menggunakannya karena file makalah tersebut tidak bisa dibuka di komputer kantor tersebut.

“Ya dikit-dikit pernah lah. Misalnya bawa buku ke rumah. *Buku-bukune dinggo dhewe* (buku-bukunya dipakai sendiri), terus ngembalikannya lama, itu *kerep* (sering). Hehehehe... Lho kalau soal pinjam lebih gitu saya malah dulu ditawari, “Mbak sampeyan butuh apa, catat aja, nanti saya carikan”. Lha saya kan senang. Jadi buku yang baru diolah dan belum dilayankan itu sudah saya pinjam dulu. Kembali ya tetep kembali, tapi *yo rodo suwe* (agak lama), yang penting kan kembali. Hehehe kebetulan pustakawan di sini tidak punya mobil dinas. Jadi tidak masalah. Tapi kalau untuk pakai mobil rame-rame, mau ada kepentingan *jagong* (undangan) misalnya, nah itu

sering. Artinya bukan untuk pribadi kan... Lha kalau mau pinjam untuk kepentingan pribadi kan banyak mobil rental, sekarang paling 160 an ribu gitu. Lumayan murah kan? Selain itu juga memang ada aturan kalau mau pinjam mobil kantor harus dengan *drivernya*, pakai surat...malah *kakean* (kebanyakan) kerjaan.” (Sembadra)

“Selama itu masih dalam tugas kantor, saya menggunakan fasilitas kantor. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi Lha misalnya saya ngajar, ini kan juga untuk kepentingan kantor. Walaupun saya materi bikin sendiri, saya anggap saya masih dalam koridor tugas kantor. Kalau untuk kepentingan pribadi sih saya berusaha untuk meminimalisir. Contohnya mobil kantor ya. Selama ini juga gak pernah jalan-jalan sendiri gitu. kalau ada kepentingan ya bareng-bareng sama teman-teman itu. Selama saya bisa mengatasi sendiri saya berusaha untuk tidak menggunakan fasilitas kantor ya”. (Bima)

Dengan demikian secara umum informan dalam penelitian ini mengakui masih menggunakan fasilitas kantor meskipun minimal, tetapi tetap berusaha untuk menghindarkan diri memanfaatkan fasilitas kerena posisinya tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian, tidak melihat adanya indikasi pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pribadi informan.

- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Pustakawan adalah bagian dari masyarakat, sekaligus sebagai abdi masyarakat dalam hal pelayanan informasi. Kaitannya dengan pelayanan ini, kode etik menghendaki agar pustakawan bersikap sopan dan bijaksana kepada masyarakat pemustaka khususnya dan umumnya adalah kepada siapa saja yang berinteraksi dengannya.

Ketika dihadapkan kepada suatu kasus, misalnya pustakawan sedang sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba ada pemustaka yang ingin mencari informasi. Kondisi seperti ini memerlukan ketenangan jiwa untuk dapat berinteraksi dengan bijaksana. Pertanyaannya adalah apakah berlaku sopan itu masih bisa dilakukan?.

Arjuna berpendapat bahwa sesungguhnya pelayanan yang santun itu berdasar pada etika yang dimiliki individu. Ketika etika ada, sesibuk apa pun orang akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sebagai contoh ketika menerima penulis sebagai tamu sekaligus pemustaka, Arjuna bersikap bersahabat,

penulis disambut baik dan memberikan informasi dengan cukup komunikatif dan sesekali disertai gurau yang membuat suasana menjadi lebih akrab.

“Kalau soal sopan itu sih sudah dilakukan ya. Kita kan punya etika, jadi paling tidak kita melayani berdasarkan etika yang kita punya. Jadi kalau itu sih sudah dilaksanakanlah”. (Arjuna)

Sejalan dengan pemikiran Arjuna, Srikandi pun memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda, yaitu:

“ Anu mas....sebenarnya kan kode etik ini kalau saya lihat sudah dilaksanakan semua. Cuma saya sendiri gak sadar bahwa saya sudah melaksanakan kode etik. Wong yang penting itu kan bekerja sebaik-baiknya, bergaul dengan teman juga yang baik, melayani pengguna dengan baik, ya itu aja. Ya to....asal gak menyakiti orang, merugikan orang, kita hidup nyaman dan aman ya sudah. Kan gitu to..? (Srikandi)

Menurut Sembadra untuk melayani pemustaka dengan santun dan tulus yang terpenting adalah menghargai orang lain, tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan pengamatan, perilaku Srikandi selama berjalannya penelitian ini, ia menunjukkan sikap yang baik. Pada saat wawancara dengan Srikandi dan ada rekan Srikandi yang menyela pembicaraan karena ada suatu kepentingan, bahasa yang digunakan antara keduanya menunjukkan sikap saling menghargai. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa yang halus. Cara mengungkapkan gurauan pun menggunakan bahasa yang demikian.

“Melayani saja sesuai dengan prosedur, terus kita anggap pemustaka itu sahabat, jadi kan bisa lebih terbuka. Kalau ada orang pinjam atau mengembalikan atau ngopi buku, kan ada aturannya, ya ... kita taati, gitu aja. Tapi ada repotnya juga, misal buku itu sudah tersebar di luar sana, tapi kita belum punya, dan ada pengguna yang nyari. Walah *isin tenan iku* (sangat malu). Seperti kemarin itu. *Jan* pengalaman tenan itu” (Srikandi)

Menurut Sembadra untuk melayani pemustaka dengan santun dan tulus yang terpenting adalah berusaha melaksanakan pelayanan di perpustakaan dengan baik sesuai prosedur, dan menunjukkan sikap bersahabat. Hal ini ditunjukkan Sembadra dengan sikapnya yang santun dan bersahabat selama wawancara berlangsung.

“Selama ini kebetulan saya ditugaskan di layanan mas. Mungkin sebelum dibuka layanan AV ini saya di layanan selama dua tahun. Kebetulan juga di sini memang tidak seramai yang disirkulasi. Kita sebagai orang Jawa khususnya, ya ada *unggah-ungguh*nya. Pengguna kan senang kalau kita sopan, menghargai mereka. Gitu kan. Ya itu yang berusaha saya lakukan, dan saya berusaha untuk selalu memberikan layanan yang sebaik mungkin”  
(Bima)

Menurut Bima untuk melayani pemustaka harus bersikap santun dan berusaha memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Sebagai contoh Bima yang selama ini ditugaskan di layanan AV menggunakan istilah *unggah-ungguh* (tata karma) dalam melayani pemustaka. Dengan demikian pemustaka akan merasa dihargai dan cenderung mencintai perpustakaan baik langsung maupun tidak langsung. Sikap ini tercermin ketika penulis selesai wawancara dengan Bima, dengan sikap yang ramah dan bersahabat mengajak penulis berkeliling ke berbagai ruangan dan menunjukkan dan menjelaskan ruangan-ruangan kerja di Perpustakaan.

Berdasarkan pengamatan terkait dengan informasi ini, saat itu kurang lebih jam 14.00 WIB, wawancara dengan Bima sudah selesai dilakukan, dan kemudian langsung berkeliling ke berbagai ruangan termasuk pada bagian pelayanan di UPT. Terakhir transit adalah di ruang sirkulasi.

Di ruang sirkulasi ini di samping terjadi aktivitas pelayanan seperti biasa, ada aktivitas lain, yaitu proses *stock opname* bahan perpustakaan, sehingga ada sebagian rak buku yang tidak bisa di akses. Di ruang sirkulasi ini ada 4 (empat) pustakawan di meja sirkulasi. Satu diantaranya ada yang kelihatan lelah. Namun demikian masih bisa menyapa ramah ketika ada pemustaka yang akan meminjam buku. Melihat fenomena yang demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional yang diterbitkan SLA salah satunya masuk dalam kriteria ini yaitu tetap luwes dan berfikir positif (Sudarsono,2008:41).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik dalam konteks melayani pengguna dengan santun, sesungguhnya sudah dilaksanakan. Dengan rujukan budaya Jawa yang mengedepankan *unggah-ungguh* (tata krama) dalam pergaulan atau hubungan antar sesama, nilai-nilai sopan, santun dan saling menghargai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan penulis



bahwa selama penelitian para informan selalu bersikap bersahabat kepada penulis, dan memperlakukan pemustaka lain dengan sopan, santun dan bersahabat.

#### 4.2.3.2 Hubungan dengan Pengguna

Pengguna atau *user* adalah orang yang menggunakan fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi yang berupa buku maupun jenis lainnya. Pengguna dalam istilah Undang-undang No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan dikenal dengan istilah pemustaka, yaitu perseorangan atau kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Kode etik pustakawan mengatur hubungan antara pustakawan sebagai pengelola perpustakaan dengan pemustaka sebagai orang yang menggunakan jasa perpustakaan, menyangkut perilaku yang seharusnya dilakukan oleh pustakawan.

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-undang RI No. 43 tahun 2007 mendefinisikan perpustakaan sebagai institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Karya-karya tersebut merupakan informasi yang terawasi dan dapat dicari oleh siapapun yang diatur sesuai dengan kebijakan institusi masing-masing.

Konsep perpustakaan sebagai tempatnya informasi ini tidak lepas dari campur tangan pustakawan sebagai pengelolanya, yang kemudian perannya diatur dalam kode etik pustakawan. Lalu bagaimana hak aksesnya? Arjuna, Srikandi, Sembadra dan Bima memberikan pernyataan sebagai berikut:

**“InFormasi di perpustakaan itu kan pada prinsipnya bebas akses ya. Jadi sesuai dengan prinsip itu, bagi saya siapapun itu berhak atas informasi yang ada di perpustakaan, terlepas untuk apa informasi itu akan dipergunakan, kan gitu” (Arjuna)**

Srikandi yang merespon kewajiban tersebut dengan berusaha tidak membatasi akses terhadap informasi, dan bahkan memberikan informasi secukupnya kepada pemustaka yang membutuhkan.

“Orang kan punya hak azasi ya mas... kalau di perpustakaan haknya mendapatkan informasi. Kalau ada yang tanya yo tak jawab, kalau ada yang baru yo diinformasikan. Contohnya kan kalau ada buku baru kita pasang di rak *display*. Terus, kita yo anu kok mas...kita gak peduli orang mau cari informasi yang gimana gitu, yang kita batasi kan jumlah buku yang dipinjam. Makanya informasi itu ya bebaskan aja...hehehe. Maksudnya, pengguna itu bebas cari informasi, kita gak usah membatasi, lagian memang kita juga kan gak bisa ngasih batasan “*eh..mbak sampeyan gak usah cari itu ya..hehehe*”, kan gak gitu to. Jadi ya bebas ajalah. Tugas kita kan melayani, menjawab kalau ada yang bertanya” (Srikandi)

Sejalan dengan pemikiran Srikandi, Sembadra lebih spesifik mengatakan:

“Ya bebaskan...hehehe, ndak *mbatesi*. Tugase kita itu kan mengelola informasi biar siap akses. Kita juga menghindari berkata “*yen informasi iki* (kalau informasi ini) tidak ada”. Jadi kalau misalnya ada pengguna yang bertanya tentang informasi tertentu yo kita berusaha mencarinya. Kalau ndak ada di sini ya telpon ke perpustakaan lain yang kira-kira ada. Misalnya ada pengguna yang cari tentang buku tertentu yang pas kita ndak punya. Ya kita cari tahu ke UNDIP misalnya. Kalau ada, paling tidak kita arahkan pengguna untuk ke UNDIP. Ya kita bantu sebisa mungkin lah.” (Sembadra)

Menurut Sembadra, pada prinsipnya perpustakaan melayankan informasi ini bebas tak terbatas, artinya pengguna tidak terikat oleh jumlah ketika mengakses informasi di perpustakaan. Dalam hal ini pustakawan juga membantu pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Jika koleksi itu ada di tempat tertentu, maka tugas pustakawan adalah mengarahkan pengguna tersebut mengaksesnya di perpustakaan yang dimaksud.

Demikian juga Bima, merespon kewajiban tersebut sebagai berikut:

“Ya....membantu penggguna yang kesulitan mencari informasi. Kan ada itu pengguna yang bingung cara menelusur, nah yang begitu kita bantu. Tapi selama ini, seperti yang pernah saya bilang, saya akan bekerja semaksimal mungkin sebagai pelayan masyarakat.”( Bima)

Informasi ini diperkuat dengan hasil pengamatan penulis sebelum wawancara dilakukan. Penulis melihat Bima memberikan bimbingan kepada

mahasiswa UNDIP cara menelusur informasi yang ada di CD Rom. Cukup lama penulis mengamati sehingga siswa tersebut mandiri dalam pencarian informasi.

Dengan demikian terkait dengan hak perorangan atas informasi, pustakawan menyediakan akses tak terbatas dengan cara membebaskan pemustaka mencari informasi, menghindari kata “tidak ada”, dan membantu pemustaka yang kesulitan mencari informasi.

- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Sударsono (2009) mengedepankan peran pustakawan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun koleksi sumber daya informasi yang dinamis berbasis kebutuhan informasi pengguna. Kesan yang muncul adalah Informasi diberikan keistimewaan dalam pengelolaannya, hal ini memang seharusnya dilakukan karena informasi adalah dasar suatu ilmu pengetahuan. Menurut Rowley dan Farrow (2000:6) informasi adalah data yang bermanfaat, yaitu data yang telah melalui pengolahan untuk suatu tujuan tertentu. Data tersebut kemudian dikomunikasikan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.

Masyarakat pemustaka merupakan sasaran utama perpustakaan dalam menyajikan informasi. Untuk itu perpustakaan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada pemustaka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Namun demikian kode etik memberikan rambu-rambu bahwa informasi yang diperoleh pemustaka bukan lagi menjadi tanggung jawab pustakawan, karena informasi tersebut sudah menjadi hak individu pemustaka.

Perumpamaan yang disebutkan, jika terjadi suatu kasus pemanfaatan informasi yang diperoleh digunakan untuk tindak kriminal, mendapat tanggapan sebagai berikut:

“Ya itu di luar tanggung jawab perusahaan... hehehe... Lha itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kita hanya menyajikan. *Wong* informasi yang diperoleh aja kita gak tahu.” (Arjuna)

“Ooo itu, yang penting kan bukan kita yang ngasih informasinya. Kalau dia yang mendapatkan sendiri informasi itu kan seperti tak bilang tadi kita gak

membatasi akses pengguna nyari informasi. Ya itu di luar tanggung jawab kita.” (Srikandi)

“Ya itu mah diluar tanggung jawab kita dong. Masa tiap pengguna mau ditanya “kamu tadi dapat informasi apa?” lha kalau penggunanya cuma satu atau dua orang, bisa aja. Padahal di Perpustakaan ini penggunanya kan ratusan, *walah kok kurang emen gawean* (kok seperti orang yang kurang kerjaan). Hehehe gitu to?” (Sembadra)

“Selama ini mungkin gini mas...mungkin lebih pas kalau diarahkan ke seleksi ya. Jadi ketika seleksi kita sudah memilih buku baik yang dari katalog penerbit maupun *browsing* internet atau dari sumber yang lainnya. Kalau kira-kira ada buku yang melanggar norma-norma, kita berusaha menghindar untuk tidak kita beli. Jadi tanggung jawab kita itu di situ sebenarnya. Kalau sudah diakses kan itu sudah jadi miliki pemustaka. Jadi tanggung jawab bukan ada pada kita lagi.” (Bima)

Dengan demikian pemanfaatan informasi yang diperoleh pemustaka diluar tanggung jawab pustakawan, karena sifatnya akses terhadap informasi adalah bebas tak terbatas, sehingga kontrol terhadap informasi yang diakses pun sulit dilakukan. Selain hal tersebut pustakawan tidak mengetahui informasi yang diakses pemustaka. Tetapi untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan informasi itu, sebaiknya dilakukan seleksi atau sensor yang maksimal pada saat pengadaan.

- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

*Special Library Association* (SLA) sebagaimana yang dikutip oleh Sudarsono (2009) menetapkan kompetensi bagi profesional informasi abad 21 diantaranya adalah melindungi privasi pengguna dan menjaga kesadaran dan tanggap atas tantangan baru terhadap privasi ini. Hal ini selaras dengan kehendak kode etik yang mewajibkan pustakawan melindungi hak privasi pengguna atas informasi yang dicarinya.

Contoh kasus diutarakan kepada beberapa pustakawan yang menjadi informan, yaitu umpama ada pemustaka yang ingin mengetahui informasi yang telah diperoleh pemustaka lain, apa yang dilakukan oleh pustakawan?

“Belum ada yang gitu tu pak. Tapi umpama ada ya tergantung informasi yang kita tahu itu apa. Kalau informasinya bahaya ya tentu tidak diberitahu. Tapi kalau informasi sifatnya umum, ya saya kira gak apa-apa.” (Arjuna)

“Pas saya di pelayanan dulu ya kadang-kadang, terutama yang sudah pada kenal. Ya *akeh-akehe karo guyon* (kebanyakan disampaikan dengan bercanda) “*Aku mau golek tentang KB kok malah entuk reproduksi to* (saya tadi mencari informasi tentang KB kok yang saya dapat malah tentang reproduksi). Hehehe.. ya gitulah kadang-kadang yo lucu yen dipikir. Tapi ya yang gitu-gitu itu biasanya mereka. Bener enggaknye yo gak tahu. tapi pada prinsipnya yen rahasia yo kita gak sebar. Ning opo enek sing rahasia to...sejauh saya tahu yo di perpustakaan gak ada yang rahasia.” (Srikandi)

“Ndak apa-apa, kita kasih tahu saja. Hehehe ndak...ndak gitu. Kenyataannya itu pengguna ndak ngasih tahu dia dapat apa itu ndak ngasih tahu. Itu kan dah jadi haknya to. Kalau perpustakaan ngasih kebebasan itu buat informasi yang masih orisinil (original) dari perpustakaan.” (Sembadra)

“Selama saya menjadi pustakawan, apalagi di Perpustakaan ini, saya belum pernah menemukan sesuatu yang rahasia, gitu. Lha gak tahu kalau di luar pustakawan ya, rasanya belum ada yang rahasia, dalam arti “informasi ini jangan sampai keluar lho” ini belum pernah ada. Jadi selama informasi ini yang saya tahu bukan dirahasiakan, emmmm.... Ya saya akan memberikannya kepada mereka yang butuh. Kalau memang di Perpustakaan ini ada yang rahasia, saya secara pribadi saya belum pernah tahu.” (Bima)

“Kalau begini pak, ada si A yang sudah mencari informasi di perpustakaan. Lalu ada si B yang bertanya tentang informasi yang diperoleh si A. gimana tu pak?” (Penulis)

“Kalau saya, informasi di sini masih multi tafsir. Tetapi kalau konteksnya perpustakaan, tidak ada yang rahasia sih saya pikir. Kan prinsipnya perpustakaan itu menyajikan informasi yang dikelola, kan gitu. Lha tetapi kalau pustakawan itu ditanya tentang informasi apa yang diperoleh orang, ya...jarang orang yang bilang, “ini lho pak informasi yang saya dapat”. Umpama ada yang bilang, ya teman-teman kita aja. Selama ini belum ada sih yang tanya ke saya seperti itu. Tapi umpama ada yang tanya, ya tentunya saya gak lah...gak ngasih tahu, wong itu sudah jadi privasi orang itu kan.” (Bima)

Menurut Arjuna menyatakan setuju terkait dengan privasi akses informasi. Sebab semua pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi, dan memiliki hak pula atas informasi yang diperoleh. Maka untuk pustakawan yang mengetahui informasi tertentu yang diperoleh pemustaka harus dirahasiakan, kecuali mendapatkan ijin dari yang bersangkutan.

Seperti halnya Arjuna, maka menurut Srikandi menyatakan setuju jika privasi pribadi tetap dijaga, tetapi pada prinsipnya untuk perpustakaan sendiri tidak merahasiakan informasi yang dikelolanya.

Menurut Sembadra memberikan komentar bahwa sebenarnya memberikan informasi sifatnya membantu pengguna itu baik selama informasi itu belum menjadi milik orang lain, karena di perpustakaan tidak ada informasi yang perlu dirahasiakan. Jika pustakawan mengetahui hasil akses pemustaka, maka informasi itu sudah menjadi hak milik pribadi pemustaka yang harus dijaga rahasianya.

Bima mengartikan informasi rahasia adalah informasi yang sudah diperoleh pemustaka, karenanya sudah menjadi hak milik pribadi. Untuk itu pustakawan pun wajib menjaga kerahasiaannya, sebab status informasinya sudah berbeda dengan informasi di perpustakaan yang belum diakses oleh pemustaka.

Dengan demikian terkait dengan privasi akses informasi ini karena semua pengguna memiliki hak untuk mendapatkan informasi, dan berhak pula atas informasi yang diperoleh. Maka untuk pustakawan yang mengetahui informasi tertentu yang diperoleh pemustaka harus merahasiakannya, kecuali mendapatkan ijin dari yang bersangkutan walaupun pada prinsipnya untuk perpustakaan sendiri tidak merahasiakan informasi yang dikelolanya, karena sebenarnya memberikan informasi sifatnya membantu pengguna itu baik selama informasi itu belum menjadi milik orang lain

d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Informasi telah menjadi material yang strategis bagi setiap institusi atau perusahaan. Sehingga setiap institusi/perusahaan memerlukan unit pengolahan informasi tersendiri dengan menerapkan berbagai teknologi pengolahan informasinya. (Martin, 1995).

Ketika teknologi informasi semakin berkembang, perpustakaan pun dituntut untuk mengikuti perkembangannya, termasuk di dalamnya adalah pustakawan. Ilmu pengetahuan yang *up to date* memungkinkan pustakawan mengerti status informasi yang akan dilayankan. Artinya bahwa ada informasi yang bebas untuk

diakses dan ada pula informasi yang perlu pengaturan hak aksesnya. Inilah yang disebut dengan hak milik intelektual.

Sejauh ini yang apa yang dilakukan oleh pustakawan di Perpustakaan Jawa Tengah terkait dengan hak milik intelektual ini?

“Menghormati dan menghargai ya....kalau saya ya melayankan tadi itu kan sudah menghormati dan menghargai to. Kalau gak menghargai ya gak usah diproses dan dilayankan. Saya kan di bagian pengolahan, jadi buku ya diolah sebagaimana mestinya sehingga bisa dilayankan, juga membatasi akses terhadap koleksi, gitu. Pernah sih dulu kita tidak melayankan suatu jenis buku. Itu waktu jamannya pak Harto itu. kan buku merahnya Soekarno, apa itu...di bawah bendera revolusi atau apa gitu, itu ndak boleh beredar. Nah fungsi kode etik ini kan ya untuk memfilter itu tadi kan. Jadi sekiranya informasi itu ndak layak ya tidak kita layankan.” (Arjuna)

Menurut Arjuna terkait dengan menghormati hak intelektual, mengatakan bahwa bentuk mengakui dan menghargai hak milik intelektual adalah dengan mengelola suatu karya dengan baik sehingga siap akses.

“Tergantung mas....maksudnya tergantung keperluane. Kalau foto kopi buku, artikel, boleh, tapi gak berupa buku kaya aslinya. Paling kan lembaran-lembaran gitu. Ya kita anu mas.... Kita kan juga harus mempertimbangkan hak cipta. Jadi yo...paling fotocopy gitu itu. Lha soal nanti dia mau plagiat itu ya *Allahu a'lam*. Skripsi, tesis di sini juga gak banyak, malah belum diolah ya'e.” (Srikandi)

Menurut Srikandi terkait dengan pengakuan hak milik intelektual adalah dengan cara tidak memberikan foto copy yang sama seperti bentuk aslinya. Artinya pemustaka tidak diperkenankan menggandakan buku atau karya intelektual lain sebagai bentuk plagiatisme.

“Nah itu urusannya dengan hak cipta kali ya. Tapi kalau menggandakan untuk pribadi, pendidikan itu kan ndak apa-apa. Pokoke kan tidak untuk bisnis. Nah kalau untuk bisnis kan sudah lain urusannya to.” (Sembadra)

“Dalam aturannya kan tidak boleh?” (Penulis)

“Betul...diaturan itu kan ndak boleh. Sekarang kan tergantung kebijakan. Kebijakannya kan orang boleh copy tapi identitasnya harus lengkap, seperti dimintai fotocopy KTP, isi formulir, dan sebagainya.” (Sembadra)

Menurut Sembadra terkait dengan pengakuan hak milik intelektual, mengatakan tugas perpustakaan adalah melayani informasi yang seluas-luasnya, tetapi harus tetap memegang kaidah hak kekayaan intelektual guna menghindari plagiatisme. Namun demikian masih ada toleransi jika kepentingan menggandakan adalah untuk pendidikan. Sembadra berpendapat pula bahwa kendala penegakan hak cipta ini adalah pada kebijakan pimpinan.

“Selama ini yang saya tahu. Saya kan di referens ya. Koleksi referens ini kan tidak bisa dibawa pulang. Sesuai arahan dari pimpinan juga, koleksi referens hanya untuk pengguna yang datang dan untuk copy ya di persilahkan. Untuk fotocopy data ini kan tidak satu buku gitu. Lha kan gak mungkin to kalau satu atau dua lembar itu kemudian di jual. Kita ini punya suatu kebijakan, dalam arti misal ada orang mau fotocopy satu buku gitu, ya kita tidak ijin. Kemudian sekarang ini kalau untuk fotocopy di kita sudah ada prosedurnya, harus sudah ada ijin dari kepala, ada hitam di atas putih untuk tidak memanfaatkan koleksi yang di copy itu untuk komersil, hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kita punya data pernyataan dari pengguna, kalau sekarang disebut pemustaka itu.” (Bima)

Menurut Bima terkait hak milik intelektual, memberikan pernyataan bahwa hak milik intelektual sejalan dengan kebebasan mendapatkan informasi dan erat pula kaitannya dengan hak cipta. Maka kebijakan, foto kopi terhadap karya seperti tesis, skripsi, tidak diperkenankan untuk digandakan.

Dengan demikian terkait dengan pengakuan hak milik intelektual pustakawan yang tugas utamanya melayani pemustaka harus tetap memegang kaidah hak kekayaan intelektual guna menghindari plagiatisme. Namun demikian masih ada toleransi jika kepentingan menggandakan adalah untuk pendidikan.

#### **4.2.3.3 Hubungan Antar Pustakawan**

Pustakawan adalah suatu profesi yang memiliki wadah dalam kehidupan organisasinya. Ini artinya pustakawan tidak hidup sendiri, melainkan terdiri dari individu-individu yang memiliki arah yang sama dalam profesi. Untuk melaksanakan kewajiban membina hubungan antar pustakawan ini, Hermawan dan Zen (2006) pustakawan harus menumbuhkan kesadaran bahwa suatu profesi ini ibarat suatu keluarga. Pustakawan sebagai rekan sejawat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghargai, menghormati dan bertanggung jawab.



- a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Menurut Sudarsono (2009:40) Keunggulan dalam profesi dapat diartikan kompetensi personal yang meliputi sikap, keterampilan, dan kemampuan perorangan untuk bekerja efektif dan memberikan sumbangan positif bagi organisasi. Hal ini yang perlu dikembangkan oleh pustakawan di Indonesia. Pertanyaannya apa yang dilakukan pustakawan untuk menyikapi ini?

“Kalau stimulus untuk itu ada. Biasanya pimpinan menyodorkan pemberitahuan atau pengumuman kalau ada diklat atau seminar atau sejenisnya kepada kita melalui kepala bagian masing-masing. Seperti misalnya di sini kepada pak Jatmo, kemudian pak Adib yang nanti diteruskan ke pustakawan. Kalau ada mau ya dipertimbangkan siapa yang paling sesuai dengan kompetensinya. Itu kalau kegiatannya memang untuk pustakawan. Tapi kalau yang sifatnya administrasi ya ndak mungkin untuk kita to pak. Misalnya kalau ada penelitian di bidang kepustakawan gitu, pasti ditawarkan. (Arjuna).

“Ya ikut-ikutan seminar, kadang kalau ada bedah buku ya saya ikut, gitu. Kalau pimpinan sih oke-oke aja sih kelihatannya. Malah kadang ada penunjukan dari pimpinan buat yang berangkat.” (Srikandi)

“Lho nek itu ya paling ikut seminar, diklat atau malah baca-baca sendiri kan lebih manfaat. Enak lho kalau sering ikut seminar tu. Ikut tapi yo kudu *tenanan* (serius) gitu. Lumayan kan bisa jadi obat jenuh kerja tapi juga dapat ilmu.” (Sembadra)

“Diantaranya ya dengan mengikuti pelatihan bidang tenaga teknis perpustakaan, seminar, diklat, dan lain-lain. Lha saya kan lulusan S1 perpustakaan. Di sini pustakawan ini rata-rata *empasing* kok. Yang punya Ijazah S1 perpustakaan itu paling cuma 5 (lima) orang waktu itu. Nah yang terakhir itu ada mbak Nugrahaeni, kelihatannya sudah selesai, cuma wisuda atau belumnya saya belum tahu. Lha saya juga matur sama pimpinan, kalau memang nanti saya ikut pelatihan dan hasilnya tidak memuaskan, mungkin pimpinan akan mempertimbangkan lagi untuk kesempatan berikutnya. Kan gitu konsekuensi logisnya. Nah sampai sekarang saya tetap berusaha di koridor perpustakaan.” (Bima)

Menurut Arjuna, Srikandi, Sembadra dan Bima terkait pengembangan pengetahuan dan keterampilan, Ia mengikuti seminar, diklat, dan sejenisnya, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan dimotivasi pula oleh pimpinan yang membuka ruang untuk pengembangan SDM. Sebagai contoh pimpinan

memberitahukan atau mengumumkan kepada pustakawan, dan memilih diantara pustakawan yang bersedia sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Dengan demikian para informan dalam penelitian ini dalam rangka mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan cara mengikuti berbagai kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- b. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Pernyataan ini mengisyaratkan agar pustakawan sebagai seorang profesional mempunyai kemampuan untuk memperluas akses informasi dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat pemustaka. Untuk itu pustakawan selain harus menguasai teknologi, akses terhadap informasi melalui personal pun diperlukan, yaitu dengan membina pertemanan dengan pustakawan di luar instansi tempat bekerja. Ini diharapkan mampu menciptakan kerjasama antar pustakawan. Pertanyaannya apa yang dilakukan pustakawan untuk menyikapi hal ini?

“Kebetulan teman saya kuliah dulu masih ada yang bisa dihubungi. Termasuk adik tingkat *panjenengan* di UI yang dari UNIBRAW, mbak Endang. Itu kan sampai sekarang masih saling kontak. Maksudnya untuk pertemanan itu salah satu contohnya, kita saling tukar pengalaman.”  
(Arjuna)

Menurut Arjuna terkait dengan kerjasama dengan pustakawan lain dan mengembangkan kompetensi profesional, yaitu dengan menjalin komunikasi, sehingga bisa saling tukar pengalaman dengan sesama pustakawan di berbagai tempat.

“Dalam hal ini saya kan bagian penerbitan majalah. Jadi kerja sama dengan pustakawan lain yang paling nampak ya dalam hal tulisan artikel. Biasanya saya yang aktif minta pada teman-teman yang sudah saya kenal, atau pasif menunggu tulisan yang masuk, lalu saya melakukan *follow up*-nya.”  
(Srikandi)

Menurut Srikandi terkait dengan kerjasama dengan pustakawan lain dan mengembangkan kompetensi profesional ditunjukkan oleh Srikandi dengan melakukan kerjasama dalam hal tulisan artikel yang akan dimuat dalam majalah.

“*Yen* menurut saya ya komunikasi. Jadi teman-teman kita yang dulu pernah kita kenal itu kita ajak komunikasi. Apalagi sekarang e-mail, *face book*. Lha kan nambah gampang buat pertemanan. Ya tentunya harus isi dong, ndak sekedar *chating thok*. Maksudnya ada sharing tentang perkembangan perpustakaan.” (Sembadra)

Menurut Sembadra terkait dengan kerja sama dengan pustakawan lain adalah dengan komunikasi *sharing* tentang perkembangan perpustakaan baik secara langsung maupun melalui media lain seperti e-mail, *face book*, atau yang lainnya.

“Kita kan punya debin ya mas...lha itu sebenarnya juga ajang kerjasama dengan pustakawan lain di daerah. Belum lagi teman-teman pustakawan itu suka ada kegiatan-kegiatan yang mengundang kita.” (Bima)

Menurut Bima terkait dengan kerja sama dengan pustakawan lain, memandang bahwa kerjasama bisa diartikan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan bersama, seperti pembinaan perpustakaan di daerah binaan (debin).

Dengan demikian untuk membina kerjasama ini perlu dikembangkan kesadaran untuk berbagi (*sharing*) ilmu pengetahuan, pengalaman untuk mengetahui berbagai perkembangan dunia kepustakawanan. Adapun media yang digunakan cukup bervariasi mulai dari e-mail sampai *face book*. Di samping itu diperlukan kerjasama dalam suatu bentuk kegiatan untuk membina kebersamaan.

c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan

Interaksi antar pustakawan dalam kehidupan suatu organisasi atau satu instansi adalah sesuatu keharusan. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama (Mondy dan Premeaux, 1995:202). Ini artinya kebersamaan menjadi penting dalam rangka mencapai cita-cita organisasi.

Kebersamaan dengan suasana yang harmonis, kondusif dan menyenangkan adalah satu ciri organisasi yang berkembang dengan baik. Untuk menjaga keseimbangan hubungan ini diperlukan suatu sikap atau tindakan dari masing-masing individu. Penelitian ini mencoba menggali upaya apa untuk yang dilakukan pustakawan dalam menjaga interaksi antar mereka?

“Kalau yang ini jelas, kita mesti sudah lakukan. Untuk nyaman bekerja kan perlu saling *ajeni* (menghormati). Jadi ya otomatislah itu kita lakukan.” (Arjuna).

Menurut Arjuna terkait dengan membina hubungan dengan sesama pustakawan satu instansi, mengatakan bahwa yang terpenting adalah sikap saling menghargai dan membantu sesama rekan agar suasana kerja menjadi nyaman dan kondusif.

“Ya itu tadi mas....saya berusaha sebaik mungkin jangan sampai nyalahi orang lain, komunikasi yang baik dengan teman, itu aja lah. *Suwe-suwe* kan yang lain mengikuti. Kalau memperlakukan teman dengan baik sih sudah dilakukan lah. Lha *wong* tanpa kode etik aja kita punya etika. Apa lagi kita orang jawa ini kan ada *unggah-ungguh*, istilahnya. Intinya ya untuk hal itu kita sudah melakukan.” (Srikandi)

Menurut Srikandi terkait dengan membina hubungan dengan sesama pustakawan satu instansi, mengatakan bahwa memupuk hubungan baik dengan teman dapat dilakukakan dengan menjalin komunikasi dengan baik dan berusaha untuk tidak menimbulkan kesan negatif.

“Lha kalau itu sih tiap hari sudah dilakukan. Selama kita punya agama saya kira itu otomatis ya.” (Sembadra)

Menurut Sembadra terkait dengan membina hubungan dengan sesama pustakawan satu instansi, mengatakan bahwa menghormati sesama rekan kerja sudah biasa dilakukan sejalan dengan ajaran agama.

“Ya apa ya...ini kan sudah kita lakukan setiap hari. Saling menghormati, saling menghargai, toleransi ini kan standar ya yang memang harus dimiliki. Selain itu kan kita punya agama, yang kita semua tahu kalau ajarannya itu *humanis* ya, yang gak boleh menyakiti, harus tolong menolong dan sebagainya. Bener gak?” (Bima)

Menurut Bima terkait dengan menjalin kerjasama dengan rekan sesama satu instansi adalah dengan saling menghormati, menghargai, bergaul berdasar etika agama.

Dengan demikian membina hubungan baik antar pustakawan dalam satu instansi bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: saling menghormati, menghargai, saling tolong, melaksanakan perintah agama, toleransi, patuh adat dengan *unggah-ungguh*-nya, dan lain-lain.

d. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

Kesatuan atau korps pustakawan adalah sekumpulan pustakawan yang berada dalam satu kesatuan. Pemahaman terhadap korps pustakawan terdapat perbedaan karena istilah ini tidak populer di kalangan pustakawan sendiri. Namun demikian jiwa kepustakawanannya terpenggil untuk menjaga keharmonisan hubungan antar pustakawan.

“Waduh... gimana ya. saya kira itu arahnya ke pustakawan secara kelompok ya. Berarti kan kesadaran pustakawan untuk menjaga kewibawaan atau kehormatan kelompok pustakawan. Nah untuk itu ya saya berlaku sebaik-baiknya lah, tidak melanggar komitmen yang disepakati bersama.( Arjuna)

Menurut Arjuna terkait dengan sikap terhadap korps pustakawan, menyatakan bahwa Ia berlaku secara wajar, apa adanya, taat terhadap komitmen bersama dalam rangka menjaga kewibawaan diri atas nama pustakawan.

“Ya kita jadi pustakawan ini kan sadar sesadar-sadarnya. Hehehe... kalau sudah gitu ya sudah jadi konsekuensi saya untuk baik sebagai pustakawan. *Yen gak ngono yo gak munggah-munggah pangkat kan repot* (kalau tidak begitu ya tidak naik pangkat. Hehehe... Tapi gak gitu mas...ya kita loyal lah ya dengan kepustakawanan kita. Ya paling gak kita *gak neko-neko* (tidak macam-macam) sehingga bikin nama baik kita rusah, apalagi kalau sudah nyangkut instansi. Soal itu mas korps pustakawan ki opo ya maskudnya...mungkin gini, korps pustakawan itu ya persatuan pustakawan ini, kaya IPI gitu. Kalau kita jaga nama baik kita ya otomatis lah nama baik korps itu pun terjaga. “ (Srikandi)

Menurut Srikandi, korps pustakawan sendiri tidak dapat dipahami secara jelas, dan terkait dengan sikap terhadap korps pustakawan, harus penuh kesadaran

menjaga nama baik diri sebagai langkah awal menjaga nama baik organisasi pustakawan.

“Kalau itu ya kembali ke individunya. Kalau individu itu baik ya tentunya korps nya juga akan ikut baik. Korps itu kan kesatuan to, artinya terdiri dari individu-individu. Lha kalau korps pustakawan kan berarti kumpulan dari berbagai individu pustakawan.” (Sembadra)

Menurut Sembadra terkait dengan sikap terhadap korps pustakawan, menyatakan bahwa penghargaan terhadap korps bisa dilakukan dengan menjaga nama baik diri sendiri

“Ya gimana ya... korps pustakawan, kok baru dengar ya. Kalau korps pegawai negeri saya tahu. Tapi mungkin gini, korps pustakawan itu kumpulan pustakawan secara umum. Ya intinya semua pustakawan itu korps. Jadi kalau untuk penghargaan saya kira harus menghargai diri sendiri dulu ya, baru sesama pustakawan dalam instansi, seterusnya pustakawan secara umum.” (Bima)

Menurut Bima terkait dengan penghargaan terhadap korps pustakawan, maka yang dilakukan adalah menghargai diri sendiri, sesama pustakawan dalam instansi, seterusnya pustakawan secara umum.

Dengan demikian penghargaan dan kesetiaan terhadap korps sangat bergantung kepada diri sendiri, menjaga nama baik diri, berbuat apa adanya, tidak dibuat-buat, dan seterusnya akan berdampak pada nama baik instansi, kelompok, maupun organisasi yang lebih besar.

e. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Berpikir positif adalah sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama dengan rekan seprofesi. Dengan berfikir positif, kegiatan yang berkecenderungan memikirkan keburukan orang lain akan bisa diminimalisir. Rekan kerja adalah mitra yang membantu keberhasilan yang diraih baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lasa (2009:112) melihat celah untuk menjaga keharmonisan tersebut dengan *Adaptability* atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap suatu kondisi yang

dipadukan dengan sikap bijak, akan membawa dampak positif bagi kebersamaan antar pustakawan.

Persoalannya adalah apa yang dilakukan pustakawan untuk menjaga nama baik dan martabat rekannya?

“Lihat kepentingannya dulu. Kalau memang informasi itu dibutuhkan, misalnya untuk menyelidiki suatu kasus, bisa saja kita ungkapkan. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu buat bahan omong aja ya buat apa dibicarakan, kan gitu. Wah...kalau menurut saya yang ngomong teman sendiri itu sama saja bunuh diri. Gimana tidak coba, jeleknya dia itu kan jeleknya instansi juga. Artinya kita juga ikut jelek kan.” (Arjuna)

“Berkata sopan, santun terhadap pengguna, juga sesama kita, sehingga orang lainpun merasa betah, tidak merasa tersinggung. Dengan gitu kan bergaul dengan kita pun jadi nyaman.” (Srikandi)

“Jadi kalau kita di luar yo sebisa ndak ngomong yang jelek-jelek soal teman juga instansi kitalah, gitu aja. Ya itulah manusia mas....kalau lagi senang ya gak melihat kebaikan teman. Sebaliknya kalau lagi susah, kejelekan teman bisa jadi rahasia umum” (Sembadra)

“Oo itu pasti kita lakukan. Tanpa peduli ada kode etik atau tidak, rasanya selama kita punya nurani pasti kita saling menjaga ya. Wah...gak enak kan kalau nama kita dijelek-jelekan orang. Mungkin salah satu cara meningkatkan citra dalam arti oh di mata orang lain. Ini yang saya lakukan ya, misalnya saya kemarin di tugaskan di SMP X misalnya. Saya berusaha membawa diri saya sendiri yang sekaligus menanamkan bahwa saya ini membawa juga nama lembaga atau instansi tempat saya bekerja. Apa lagi kalau kami sudah ke debin. Ini lebih harus hati-hati lagi, karena yang dihadapi lebih kompleks lagi.” (Bima.)

Dengan demikian terkait dengan kewajiban menjaga nama baik dan martabat rekan adalah dengan menahan diri tidak membicarakan keburukan orang lain, bersikap sopan dan santun, dan lain-lain.

#### **4.2.3.4 Hubungan dengan Perpustakaan**

Pustakawan dan perpustakaan adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Perpustakaan membutuhkan pustakawan sebagai pengelola hidupnya perpustakaan, dan sebaliknya pustakawan membutuhkan perpustakaan sebagai tempat aktualisasi keilmuan yang dimilikinya yang terwujud dalam hubungan pekerja dan tempat kerja.

a. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan

Kebijakan adalah aturan yang diambil oleh pimpinan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah di luar peraturan yang sudah ada. Artinya kebijakan ini akan menjadi aturan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Pertanyaannya apakah pustakawan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan ini?

“Tidak semua kebijakan kita dilibatkan. Tapi untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas, biasanya diajak *rembugan*.” (Arjuna)

“Biasanya untuk pembahasan program saya dilibatkan. misalnya akan ada pameran buku, akan ada pendidikan pemakai, saya diajak bicara. Saya dulu sewaktu masih di UPT malah lebih sering. Kan kalau ada kunjungan dari mana gitu perlu pendampingan. Nah itu juga diputuskan bersama, siapa yang bisa dan siapa yang tidak” (Srikandi)

“Kalau itu sepertinya porsinya pimpinan yo.... Kalau soal rapat-rapat sih saya sering diajak, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya akan ada pendidikan pemakai, diklat, siapa saja yang nanti akan terlibat di dalamnya.” (Sembadra)

“Kalau untuk masalah yang berkaitan dengan layanan AV, misalnya ada penambahan alat, cara layanan di AV, itu saya dilibatkan. tapi kalau untuk perpustakaan secara keseluruhan belum pernah. Itu kan porsinya para *penggede*. Kalau saya kan masih junior termasuknya.” (Bima)

Menurut Arjuna, Srikandi, Sembadra dan Bima, terkait dengan pelibatangannya dalam pengambilan kebijakan, menyatakan bahwa keterlibatangannya sebatas pada bidang kerja masing-masing pustakawan.

b. Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.

Salah satu dari lima hukum perpustakaan Ranganathan, sebagaimana dikutip oleh Hermawan dan Zen (2006), yaitu perpustakaan adalah organisme yang tumbuh. Ini artinya sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang, membutuhkan asupan-asupan kegiatan yang mencerminkan bahwa perpustakaan itu hidup. Pustakawan menjadi tulang punggung dan penopang gerakanya perpustakaan. Untuk itu pustakawan dituntut selalu membina diri, menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta wawasan kepastakawanan yang lebih



luas. Inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan bagi pustakawan di masa yang akan datang.

Kaitannya dengan tanggung jawab ini, Arjuna mengusulkan perbaikan-perbaikan pada fasilitas kerja di bidangnya. Misalnya pengolahan yang manual ditingkatkan menjadi menggunakan alat bantu komputer.

“Ya... kalau melihat bidang kerja saya, saya mencoba untuk mengolah buku dengan cara yang secepat mungkin. Misalnya dulu, saya menggunakan mesin ketik untuk membuat katalog dan label, sekarang sudah menggunakan komputer.” (Arjuna)

Menurut Srikandi terkait dengan tanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan, yang dilakukan adalah melontarkan ide pembuatan profil perpustakaan sebagai media promosi

“Kita kan pernah studi banding ke beberapa perpustakaan. Nah suatu perpustakaan kan bagian dari lembaga induknya to. Di sana itu perpustakaan sudah menciptakan profil yang dibuat seperti film untuk kepentingan promosi atau hal lain, kerjasama dengan perpustakaan lain dan sebagainya. Lha kita kan kantornya menjadi induk dari perpustakaan-perpustakaan di daerah to. Ya, setidaknya lebih maju. Nah ide-ide ini saya lontarkan, karena memang di sini belum ada, waktu itu.” (Srikandi)

Berbeda halnya dengan pendapat Sembadra, Ia lebih sepakat jika bentuk tanggung jawab itu dimunculkan dalam bentuk kerja yang nyata, yang sifatnya memberikan sesuatu yang lain dari yang sudah ada. Misalnya, Sembadra mengusulkan ide perbaikan-perbaikan pada bidang kerjanya yaitu bidang pelayanan. Misalnya pada saat melayani pustakawan dari pemustaka karena lamanya pelayanan, maka penggunaan *barcode reader* menjadi usulan solusinya.

“Menurut hemat saya sih bukan menunjukkan tanggung jawab kali ya, tapi bentuk kerja apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan, gitu. Kalau seperti itu sih saya kerja aja sebaik-baiknya, mengumpulkan ide-ide buat cari solusi. Maksudnya, pada saat kerja ini kan mesti banyak masalah. Sederhananya kan kita identifikasi masalahnya, terus kita cari solusinya. Contoh, kalau pas di layanan kan banyak masalah dari pengunjung tu, ada yang rewel lah, ada yang kesulitan menelusur lah. Nah seperti itu kita cari jalan keluarnya. Kalau dulu kan pakai katalog, terus solusinya pakai OPAC. Dulu proses pinjam kelamaan, sekarang pakai *barcode* yang tinggal klik saja sudah terdata. Jadi kan nanti, istilah kita bisa memberi pelayanan prima.” (Sembadra)

Menurut Bima terkait dengan tanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan, yang dilakukan adalah mengembangkan ide-ide untuk memajukan perpustakaan. Misalnya mengusulkan pengadaan TV, DVD, dan LCD untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemustaka.

“Kuncinya adalah ide. Kalau kita punya ide untuk memajukan perpustakaan, itu artinya kita punya tanggung jawab terhadap tempat kita bekerja. Kan gitu. Hal yang saya lakukan mengusulkan hal-hal mana yang bisa mempermudah saya bekerja. Misalnya kemarin di sini ada komputer saja. Saya mengusulkan adanya televisi, DVD, dan LCD. Maksudnya televisi dibutuhkan untuk memutar film-film dokumenter, LCD bisa untuk presentasi, dan lain-lain.” (Bima)

Dengan demikian menurut para informan, bentuk tanggung jawab terhadap pengembangan ini berawal dari pengembangan-pengembangan ide pustakawan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah didapatnya, yang kemudian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengguna.

- c. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Pelayanan perpustakaan memiliki dua landasan. Pertama, peran pelayanan perpustakaan dalam menyediakan fasilitas akses dokumen. Kedua, misi perpustakaan mendukung misi lembaga induknya atau memenuhi kebutuhan penggunanya. (Purwono, 2009:54). Landasan ini sulit untuk dicapai jika pemahaman tentang perpustakaan itu sendiri tidak maksimal, dengan kata lain pemustaka atau masyarakat pada umumnya perlu diberikan pemahaman jati diri perpustakaan, sehingga dalam benak orang perpustakaan tidak hanya sebagai tempat buku saja, dan pustakawan juga bukan sekedar penjaga buku semata.

Pemahaman itu bisa secara langsung atau tidak langsung, formal maupun non formal., langsung berarti pustakawan berkomunikasi langsung dengan pemustaka. Tidak langsung, bisa melalui media, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan pendidikan formal bisa melalui lembaga pendidikan, dan non formal bisa dilakukan atas inisiatif pustakawan untuk mengadakan bimbingan khusus terhadap pemustaka.

Perpustakaan tidak ada yang lengkap. Sebesar apapun perpustakaan didirikan dengan jumlah koleksi yang besar, masih ada celah untuk tidak terpenuhinya kebutuhan pengguna. Untuk itu perpustakaan memprogramkan adanya kerjasama antar perpustakaan, yang diharapkan dapat saling melengkapi.

Khususnya di Perpustakaan Jawa Tengah, apa yang dilakukan pustakawan untuk hal ini?

“Ya kita sebenarnya kan ada pendidikan pemakai ya. Nah di situ itu sebenarnya ditanamkan pengetahuan sekaligus pemahaman tentang perpustakaan dan bagaimana akses informasinya. Saya juga beberapa kali diikutkan dalam kegiatan semacam ini. Soal kerjasama dengan jenis perpustakaan lain itu kita otomatis ya pak. Misalnya perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, ini kan termasuk perpustakaan di bawah pengawasan kita.” (Arjuna)

“Yo iku mas...kita melakukan pendidikan atau bimbingan pemakai. Lha persoalane sekarang itu *wong-wong sing* (orang-orang yang) punya jabatan aja yang dilibatkan untuk ngajar. Pastinya kita itu mencoba melayani pengguna itu dengan baik, ada yang perlu informasi kita bantu semampunya, gitu. *Yen* kerjasama dengan jenis perpustakaan lain itu ya mesti...wong kita itu perpustakaan yang membina mereka.” (Srikandi)

“Sebenarnya begini.... mengembangkan pemahamann itu kan membuat orang mengerti ya. Kita bisa melakukan itu pas ada orang tanya “gimana to caranya cari ini, gimana to cari itu?” kalau sudah gitu kita tinggal ngasih penjelasan secara langsung. Atau kalau secara terprogram itu pas pendidikan pemakai. Sering kita ada acara pendidikan pemakai ini, lha sekarang kan di UPT sedang ada pendidikan pemakai, salah satu pengajarnya pak Adib. Nah jenengan bisa langsung tanya beliau kalau memang diperlukan. mmmm...soal kerjasama ya itu mesti ada, wong kita sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan kok.” (Sembadra)

“Menurut saya untuk mengembangkan pemahaman ini ya dengan melakukan kunjungan antar perpustakaan, berbagi pengalaman, juga mengikuti kegiatan seperti seminar, *work shop*, diklat dan pendidikan pemakai. Ya kita ini open dengan siapapun termasuk jenis perpustakaan apapun.. kebetulan kita ini kan perpustakaan pusatnya Jawa Tengah. Jadi perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling di bawah pembinaan kita.” (Bima)

Dengan demikian menurut para informan terkait dengan pemahaman dan kerjasama dengan jenis perpustakaan lain adalah dengan melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan pemakai, mengunjungi berbagai perpustakaan, berbagi pengalaman, mengikuti kegiatan *workshop*, seminar, diklat dan lain-lain, serta

dalam rangka kerjasama dengan jenis perpustakaan lain membuka diri untuk melakukan jasa layanan bersama dengan unsur perpustakaan lain.

#### 4.2.3.5 Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan (UU No.43 Tahun 2007). Artinya bahwa pustakawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi profesinya. Hidup dan berkembangnya organisasi profesi (baca: IPI) bergantung pada pustakawan sebagai pendiri dan anggotanya.

##### a. Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin

Salah satu bentuk tanggung jawab anggota profesi kepada organisasinya adalah disiplin membayar iuran yang telah ditetapkan. Besarnya iuran dan tata cara pembayarannya telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IPI, terhitung sejak menjadi anggota. (IPI,2006).

Persoalannya adalah apakah pustakawan membayar secara rutin iuran yang telah ditetapkan tersebut?

Menurut Arjuna terkait dengan iuran rutin, ia berpendapat bahwa iuran rutin IPI tidak berjalan dengan baik. Arjuna dan pustakawan anggota IPI lainnya yang bekerja di Perpustakaan sudah berusaha untuk rutin, tetapi IPI tidak aktif mengontrol iuran tersebut.

**“Untuk kami anggota IPI di sini sudah berusaha membayar iuran rutin, lha tapi kalau IPI nya sendiri pasif gimana?” (Arjuna)**

Srikandi menanggapi bahwa iuran tidak berjalan rutin sebagaimana yang seharusnya.

**“Maunya sih ya iuran lah, meskipun ada telatnya kan yang penting nilai tanggung jawabnya itu ada. Itu nek saya...gak tahu lho ya kalau orang lain. Masalahnya IPI sendiri juga pasif ya. Misalnya ada anggota yang gak bayar berapa bulan gitu, ya gak ada tagihan tu.” (Srikandi)**

Sembadra melakukan pembayaran iuran yang dikelola secara intern, dan digunakan untuk kegiatan intern. Iuran dilakukan dengan wadah tersendiri, tidak

langsung ke IPI, sebagai cadangan jika sewaktu-waktu ada kegiatan, karena IPI sendiri dirasa tidak serius menangani masalah iuran.

“Ooo iya. Kalau kita di kantor ni punya wadah sendiri untuk pustakawan ya. Ya kita iuran untuk jaga-jaga kalau nanti ada kegiatan apa gitu. Tapi ya untuk kepentingan intern kita. Iha sekarang ini keanggotaan juga ndak jelas. Coba tanya pak Tri yang mungkin lebih tahu, apa masih jalan atau ndak, gitu. Dia tahu banyak soal ini.” (Sembadra)

Sejalan dengan pemikiran Arjuna, Srikandi dan Sembadra, Bima menanggapi bahwa iuran rutin anggota IPI tidak dilaksanakan, karena IPI tidak merespon kondisi iuran yang tidak berjalan lancar ini atau dengan kata lain IPI tidak proaktif mengontrol iuran rutin anggotanya.

“Iuran itu kan mesti sudah diatur di AD/ART ya mas, tapi terus terang belum pernah baca itu AD/ARTnya IPI. Walaupun secara.... Begini, saya sebagai pustakawan Perpustakaan, otomatis saya sebagai anggota IPI. Dulu pernah baca sih tapi ya gak tuntas. Artinya tidak sampai habis apalagi paham gitu, belum pernah. Maunya saya ya iuran *wong* itu kan konsekuensi saya sebagai anggota kan. Tapi nyatanya di sini tidak rutin. *Wong* saya belum pernah di tagih juga-e, padahal saya merasa lama gak iuran.” (Bima)

Dengan demikian secara umum para informan sesungguhnya telah berusaha untuk membayar iuran yang telah ditetapkan IPI. Kendala yang dialami adalah tidak aktifnya IPI sebagai organisasi merespon iuran yang tidak berjalan lancar ini.

b. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab

Setiap organisasi memiliki program sebagai indikator hidupnya suatu organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan pengejawantahan ide-ide anggotanya yang telah disepakati demi tercapainya tujuan organisasi. Persoalannya adalah apakah pustakawan secara aktif mengikuti kegiatan IPI sebagai organisasi profesinya?

“Kalau IPI saya kurang aktif ya. Memang IPInya sendiri juga tidak aktif. Yang menjadi lokomotif ya kita sendiri kok pak. IPI tu tidak punya dana. Jadi kegiatannya nunggu kita. Setiap tahun kita ada yang namanya pengembangan profesi...nah itu melibatkan IPI. Iuran di IPI itu juga ndak

jalan pak. Repotnya di situ. Makanya untuk kegiatan IPI nya itu ya *mandeg*. Bisanya ya satu tahun sekali sesuai dengan anggaran dasarnya. Iuran ya iuran tapi sekali waktu masuk jadi anggota thok. Ndak ada tagihan, atau yang bisa bikin rutin iuran gitu ndak ada. Kendalanya ya di situ, karena pengurusnya juga merangkap jabatan di kantor sebagai pegawai barangkali konsentrasinya juga pecah.” (Arjuna)

“Pernah, tapi tidak pas khusus membahas tentang kode etik.” (Srikandi)

“Pernah ikut, tapi sing membahas soal kode etik ini saya belum pernah ikut. Disamping itu IPI sendiri jarang kumpul kok, atau apa saya aja yang jarang denger ada kumpul-kumpul gitu. Yang terakhir saya tahu tu tahun 2001 ada pertemuan di solo” (Sembadra)

“Pernah. Kegiatan seminar di Semarang juga sih. Tapi sudah lama sekali, tahun berapa juga lupa. Mungkin kalau bu Marni bisa sering, beliau kan sekretarisnya IPI Jawa Tengah. Nah *panjenengan* bisa bertanya lebih banyak ke beliau.” (Bima)

Secara umum Arjuna, Srikandi, Sembadra, dan Bima tidak secara rutin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh IPI. Alasan yang paling mendasar adalah IPI sebagai organisasi penggagasnya dalam posisi yang pasif. Khusus kegiatan IPI yang membahas kode etik, informan dalam penelitian ini belum pernah mengikutinya.

c. Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum adalah suatu slogan yang sudah lazim dimengerti oleh masyarakat. Dalam konteks organisasi berarti pustakawan mempunyai kewajiban mementingkan kepentingan organisasi profesi (IPI) di atas kepentingan pribadinya.

“Saya kok gak pernah ada pilihan ya. Tapi idealnya ya milih kepentingan profesi dulu. Saya mengalir aja sih pak, tergantung kepentingan. Kalau misalnya ada kegiatan dari IPI dan saya bisa, ya saya akan ikut. Sebaliknya kalau gak bisa ya tidak berangkat. Kebetulan kan saya hanya anggota biasa, dan kegiatan IPI ini jarang. Kalaupun ada mungkin saya gak diundang, hanya pengurus inti saja yang dilibatkan.” (Arjuna)

“Terus terang kalau saya ya tergantung prioritas kepentingannya. Kalau keluarga bisa ditinggalkan, tentu pilih tugas IPI. Tapi secara jujur saya sebenarnya pilih tugas dulu. Keluarga kan biasanya bisa fleksibel.” (Srikandi)

“Kalau dibilang aktif, ndak juga. Nyatanya ada beberapa kegiatan IPI saya ndak dilibatkan. Yang terakhir kemarin, katanya ada pembentukan cabang IPI di salatiga, itu aja saya ndak ikut. Kartu anggota dulu ada. Tahun 2005-2006-an gitu. Katanya ada pembaruan keanggotaan gitu, tapi kapannya saya belum tahu.” (Sembadra)

“Kalau melihat gejalanya kaya gini ya pilih keluarga. Alasane ya pertama, IPI hidup segan mati tak mau. Kedua, boleh dibilang saya bukan pengurus, tapi anggota biasa yang mungkin ndak ngaruh ada atau tidaknya saya, gitu.” (Sembadra)

“Tergantung kepentingannya. Kalau saya kan masih *single*, jadi gak masalah. Persoalannya itu IPI ini gak aktif ya... saya sebagai anggota IPI belum pernah dapat tugas dari IPI. Ini berandai-andai ya...seandainya ada ya tentu saya pilih menjalankan tugas dulu lah, selama kepentingan keluarga bisa ditunda. Kan biasanya kepentingan keluarga itu bisa diatur jadwalnya.” (Bima)

Menurut Arjuna, Srikandi dan Bima terkait dengan pilihan antara kepentingan profesi dengan kepentingan pribadi, memberikan pendapat yang sama bahwa memang idealnya pustakawan mengutamakan kepentingan profesi di atas kepentingan pribadi. Karenayaa mereka memilih melaksanakan tugas dahulu selama kepentingan keluarga bisa ditunda.

Berbeda pendapat dengan informan lain, Sembadra terkait dengan pilihan antara kegiatan profesi dengan keluarga, menanggapi bahwa Ia lebih memilih kepentingan keluarga dengan pertimbangan: pertama, IPI tidak aktif melakukan kegiatan. Kedua, Sembadra bukan pengurus inti IPI, melainkan hanya sebagai anggota biasa. Namun demikian Sembadra ini tercatat sebagai anggota IPI.

Dengan demikian meski kepentingan organisasi (IPI) ini secara normatif harus lebih diutamakan, ada pertimbangan lain yang bisa dijadikan toleransi untuk mendahulukan kepentingan pribadi.

#### 4.2.3.6 Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat

Perpustakaan merupakan salah satu pusat layanan masyarakat yang menangani mengenai informasi. Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan merupakan bagian dari masyarakat. Posisi masyarakat tidak bisa diabaikan oleh pustakawan. UU No.43 tahun 2007 memberikan batasan bahwa masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu

wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Hubungan pustakawan dengan masyarakat diatur dalam kode etik sebagai berikut:

- a. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya

Pelayanan kepada adalah misi utama perpustakaan. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka pustakawan harus meningkatkan pula mutu pelayanan. Cara menuju ke arah peningkatan mutu ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah bekerjasama dengan komunitas lain yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

“Kerjasama dengan komunitas yang sesuai ya.... Mungkin yang paling dekat arsip ya. Kita kan sekarang jadi satu badan dengan arsip, jadi kerjasama ini pasti terjadi. Ya tentunya kita berdasarkan norma yang kita punya, perpustakaan punya aturan sendiri, arsip juga tentunya punya aturan sendiri.” (Arjuna)

“Kalau bekerja sama ya...saya banyak teman itu dengan orang-orang arsip, pustakawan-pustakawan di daerah yang kebetulan saya kan termasuk seringlah ke daerah untuk pelatihan, seminar...gitu. Sering juga teman-teman memberi masukan, “mestinya Perpusda tu gini, gitu...” ya sebisa mungkin saya jalin pertemanan dengan baiklah. Saya juga kan kebetulah di penerbitan majalah, jadi ya...dengan gitu saya bisa jadi banyak informasi. Tapi kendalanya yang namanya pustakawan dan orangnya banyak ya, dari teman tuh malah “walah sok cari muka, sok *nganeh-anehi*, *mbok ya* nerima aja kerja yang ada, malah bikin repot aja.” jadi temennya tuh malah *mbleret*, *nggembosi* semangat gitu lho. Hehehehe. Ya kadang kita maklumi juga wong mungkin tidak se-level, maksudnya kan ada pustakawan itu yang *impassing* atau masih D3 gitu, yang mereka pikir pekerjaan itu yang ada saja, tidak perlu mencari apalagi mengembangkan ide.” (Srikandi)

“lantas kegiatannya apa?” (Penulis)

“pada waktu beberpa bulan terakhir ini diadakan bimbingan tentang majalah dinding di sekolah. Ya saya juga mengundang guru, juga untuk masalah itu.” (Srikandi)

Srikandi menambahkan lagi :

“Kadang *nek* (kalau) ada kegiatan apa gitu, saya disuruh pegang keuangan nanti ya saya anggarkan, ya itu untuk beli bahan-bahan ajar gitu. Soalnya apa, Coca Cola sudah memberi kepercayaan kepada kita untuk melaksanakan program yang kita buat, tetapi kalau terus gak dilaksanakan,



kan *eman-eman* (sayang) gitu. Kok anunya.....reputasinya jelek nanti. “*woohha bak no kok ngene to* (ooo rupanya kok begini), orang sudah didukung dana kok malah.....”, kan kesannya gak baik to. Kan yang namanya dana sebagai perangsang saja kan sedikit to?... (Srikandi)

Lain halnya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Sembadra, yaitu:

“Kerjasamanya...kadang dengan lingkungan dekat-dekat sini. Kan rata-rata kantor tu. Paling ya mereka butuh apa gitu mereka manggil kita. Atau kalau kita butuh apa dari mereka kita juga manggil mereka. Misalnya, ketika mereka ada masalah dengan perpustakaan yang mereka kelola, mereka meminta kita untuk datang ke sana. Gitu. saya sendiri sering diikutkan dalam pembinaan perpustakaan sekolah, yang kebetulan memang kita punya program perpustakaan binaan, atau kalau pas pameran buku. Pameran buku kan sering di kantor sebelah itu. Jadi kita yang ke sana. Ya...kalau saya kok yang penting taat aturan, jangan sampai melanggar aturan, memberikan pelayanan yang baik. Jadi kan nama baik alias harkat dan martabat tetap terjaga.” (Sembadra)

Demikian pula yang dikemukakan oleh Bima:

“kerja sama yang saya lakukan adalah melalui debin atau daerah binaan. waktu itu tingkat kecamatan ya. jadi sekolah ini ditunjuk sebagai wakil untuk diikutsertakan lomba perpustakaan daerah binaan. lalu kami bantu sebisanya dan ternyata hasilnya dapat juara di lomba tersebut. nah setelah menang, tahun berikutnya menghubungi kami lagi. katanya akan ikut lomba tingkat kota Semarang. Saya bilang kalau perpustakaan hanya segini mungkin kurang. Lalu mereka mengadakan pembenahan-pembenahan. Yang kebetulan juga saya sering diminta jadi juri untuk lomba-lomba seperti itu.

Akhirnya mereka dapat juga juara, tapi saya gak tahu juara berapanya.”

(Bima)

Dengan demikian bentuk kerjasama itu dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah: kerja sama dan dengan orang-orang arsip, kerjasama dengan Coca-cola, melibatkan instansi lain dalam pendidikan pemakai, pameran buku, dan berinteraksi dengan daerah binaan di berbagai daerah.

- b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Pustakawan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki suatu budaya, dituntut untuk memahami nilai-nilai apa yang dikembangkan dalam

masyarakatnya, sehingga mudah untuk beradaptasi dan berbaur dengannya. Hermawan dan Zen (2006) mengemukakan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan ini dapat berupa pentas seni, *story telling*, bedah buku, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pustakawan terkait dengan sumbangsuhnya terhadap kebudayaan di masyarakat tersebut?

“Apa ya.... Kalau mengadakan perayaan 17 Agustus itu termasuk kebudayaan gak ya. Kalau itu bisa masuk kategori saya sering mengadakan lomba-lomba. Malam hiburannya ya ada tari-tarian, ada baca puisi, ada nyanyi, gitu. Kalau untuk di Perpustakaan sendiri, menyediakan ruang bermain yang dapat diakses oleh masyarakat. *Story telling* juga ada, les tari juga ada. Kalau untuk pribadi sebagai pustakawan ya... sumbangannya kerja sebaik-baiknya, mengolah buku, menyajikan informasinya yang nantinya Insya Allah kan bermanfaat bagi perkembangan kebudayaan di masyarakat.”  
(Arjuna)

“Jawabannya satu mas, memunculkan ide baru untuk bisa kreatif membuat hal-hal yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Tidak *nrimo thok* (tidak pasrah saja). Lho kan gitu, ibaratnya kalau mau berbudaya ya harus punya ide. Kan budaya itu hasil dari ide to? Misalnya, kalau pelayanan ini masih manual ya di-ide-kan menjadi pelayanan yang menggunakan komputer, itu misalnya. Jadi dari budaya pelayanan manual ke budaya pelayanan dengan komputer. Lha syukur kalau ide itu memang benar-benar *urgen* bagi perpustakaan. Kan gitu.”(Srikandi)

“Apa ya mas...kok nyumbang yo....yen kita kan nyumbang itu kan kalau ada punya gawe, ngasih amplop, nah itu nyumbang. Hehehehe. Sorry, guyon....hehehe Yo gitu mas, Kalau pengertiannya itu, yang paling kelihatan itu yang ada di rumah pintar itu. Saya dulu pernah di sana juga. Di sana ada les nari. Katanya sih beberapa waktu sempat ndak jalan itu, tapi kelihatannya sudah mulai dirintis lagi.” (Sembadra)

“Kita sebagai pustakawan itu menurut saya memberikan pelayanan yang terbaik itu sudah memberi sumbangan budaya. Maksudnya gini, perpustakaan kan gudangnya kebudayaan tu. Ilmu pengetahuan yang ditulis itu kan hasil dari pemikiran manusia. Lha ini kan budaya. Jadi ya gitu, saya berusaha bekerja sebaik-baiknyalah, melayani orang cari informasi dengan baik. Kalau memang tidak puas dengan pelayanan yang saya berikan, ya....manusiawi lah.” (Bima)

Dengan demikian terkait dengan sumbangan pustakawan terhadap kebudayaan dalam masyarakat berbagai hal dapat dilakukan seperti : mengadakan lomba-lomba, pentas seni pada acara hari kemerdekaan, *story telling*, mengadakan les menari, memunculkan ide-ide baru, mengadakan rumah pintar,

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena perpustakaan adalah tempatnya ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dari berkembangnya suatu kebudayaan.

#### 4.2.4 Kendala-kendala Implementasi Kode Etik Pustakawan

Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat (Bertens, 2004, 280). Artinya bahwa kode etik merupakan aturan, rambu-rambu yang dapat menunjukkan arah ketika dengan sungguh-sungguh digunakan atau diterapkan. Namun demikian penerapan kode etik ini sama halnya dengan menerapkan suatu aturan yang memiliki konsekuensi. Ini mengisyaratkan bahwa kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan tanpa mengalami suatu kendala. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, tersirat beberapa kendala implementasi kode etik, di antaranya adalah:

##### 4.2.4.1 Kode etik tidak populer karena kurangnya sosialisasi

Tidak populer adalah istilah yang menyatakan bahwa sesuatu objek tidak dikenali dengan baik.

“Kode etik pustakawan di sini kayaknya ndak populer ya pak. Ya mungkin karena belum digencarkan oleh pengurus pusatnya atau pengurus daerahnya. Soalnya begini, kalau pengurus daerah yang saya tahu kan “plat merah” gitu ya. Jadi kalau sudah terbentur pekerjaan rutinnya, pekerjaan sampingan kayak gini ya terus terbengkalai atau ya ndak maksimal. (Arjuna)

“Gak...gak pernah tahu. Tahunya ya cuma dengar-dengar aja kalau kode etik pustakawan itu ada. Tapi wujudnya ya mungkin malah baru kali ini setelah bapak beri di sini.” (Sembadra)

Ketidakpopuleran kode etik menjadi hambatan implementasi dapat dipahami, karena sebuah aturan akan dapat dilaksanakan jika objek, yaitu: pustakawan yang dikenai aturan ini, mengenal dengan sebenar-benarnya kode etik tersebut. Persoalannya di Perpustakaan Jateng, kode etik ini sudah dimiliki, akan tetapi tidak semua pustakawan mengerti dengan kode etik ini. Hal ini dapat dimaklumi karena pengurus IPI merangkap sebagai “plat merah” atau pegawai negeri yang memiliki tugas rutin. Jadi pekerjaan di IPI sebagai *second job*.

#### 4.2.4.2 Kode etik kalah dengan kebijakan (birokrasi)

Kode etik dibuat oleh IPI yang merupakan lembaga yang terpisah dari lembaga atau instansi tempat pustakawan bekerja. Artinya bahwa lembaga atau instansi tempat pustakawan bekerja memiliki birokrasi atau sistem kekuasaan sendiri yang juga berwenang atas pengambilan kebijakan untuk kepentingan lembaga atau instansi tersebut.

“Kendalanya ya itu tadi ya pak. Birokrasi. Kalau di birokrasi kan lain. Apapun keputusannya pimpinan, meskipun bertentangan dengan kode etik kan harus tetap dilaksanakan to pak. Jadi kode etik ini masih kalah dengan kebijakan. Contohnya yang tadi tu, kasus PP no.41 tadi tu. Sebenarnya kan kita punya landasan yang kuat, kalau perpustakaan itu begini, arsip itu begini. Menurut keputusan IPI dulu yang pernah saya tahu kalau perpustakaan itu ya perpustakaan bukan arsip. Kata pak Zul waktu kita undang ke sini tu perpustakaan sendiri, arsip ya sendiri. Gak bisa jadi satu. Itu contohnya itu.” (Arjuna)

Dengan memperhatikan ungkapan Arjuna ini dapat dikatakan bahwa birokrasi menjadi salah satu kendala bagi pelaksanaan kode etik ketika kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan semangat yang ada pada kode etik.

#### 4.2.4.3 Tidak meratanya jenjang pendidikan pustakawan

Pendidikan menjadi unsur penting bagi jenjang karir seseorang dalam dunia kerja. Selain itu tingkat pendidikan juga menjadi penting untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu.

“Tidak meratanya jenjang pendidikan, sehingga pemahaman, sikap itu cenderung semaunya, tidak berdasar sikap yang profesional.” (Arjuna)

“SDM kita ini berbeda-beda ya. Kami itu hanya berapa persen yang dari ilmu perpustakaan. Jadi banyak yang *impassing* gitu. Jadi untuk tujuan layanan prima itu kadang tidak sinkron. Ya mungkin karena ilmunya yang tidak sampai ya. Padahal ilmunya, konsumen adalah raja. Perpustakaan kan gitu. Perpustakaan kan layanan publik. Kalau publik meninggalkan kita kan perpustakaan *bubar* tu.” (Srikandi)

Dengan memperhatikan ungkapan informan di atas, tidak meratanya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pustakawan menjadi kendala pelaksanaan kode

etik terkait dengan pemahaman dan penyikapannya terhadap kewajiban yang dituangkan dalam Kode Etik Pustakawan.

#### 4.2.4.4 Pustakawan tidak membaca kode etik karena dianggap tidak penting

Kode etik pustakawan adalah aturan yang dibuat dan diterbitkan secara tertulis. Ini artinya untuk dapat memahami lebih jauh dan mengeti secara tuntas, pustakawan harus membacanya.

“Kendala pelaksanaan kode etik adalah pustakawan tidak membaca dahulu kode etik. (Srikandi)

“kode saya pernah tahu, tapi belum pernah baca tuntas. Ya, wong menurut saya itu kan gak penting, dan memang jujur saya nggak memperhatikan itu. Justru yang saya perhatikan adalah pekerjaan yang dapat menghasilkan angka kredit. Menurut saya, yang penting adalah pokoknya saya sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Ya itu tadi, angka kredit ini kan mendukung profesi saya yang memang untuk dapat naik pangkat harus mengumpulkan angka kredit. Makanya sasaran tembaknya adalah kegiatan yang bisa menghasilkan poin.” (Sembadra)

Kode etik dikenal sebatas nama saja, dan Sembadra tidak memperhatikan substansinya, yang terpenting baginya adalah bekerja sebaik-baiknya untuk kemudian dilakukan penghitungan poin sebagai yang memenuhi standar angka kredit untuk kenaikan pangkat.

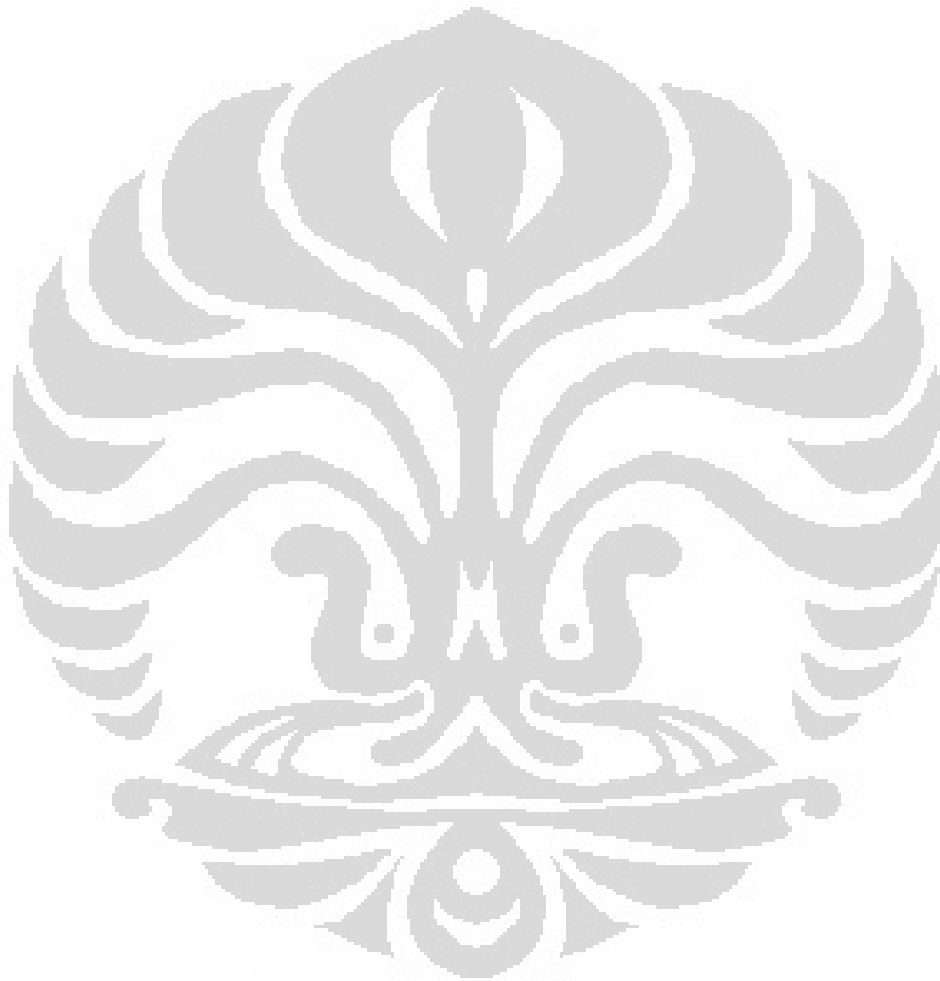
#### 4.2.4.5 Sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak tegas

Suatu peraturan diciptakan untuk dipatuhi oleh orang yang terkait di dalamnya. Pelanggaran terhadapnya berakibat timbulnya sanksi yang harus diterima oleh orang yang melanggar. Demikian pula dengan kode etik yang dibuat untuk dipatuhi oleh pustakawan.

“Kalau sanksi terhadap kode etik itu belum ada ya? Kok saya pikir sanksi ini gak ada efek yang jelas gitu. Lha paling-paling kan orang salah ngasih informasi. Maaf yo mas atau mbak tadi saya salah ngasih informasi. nah paling kan cuma gitu, gak bikin orang meninggal seperti dokter yang salah ngasih obat. Lha kalau orang salah ngasih informasi terus mengakibatkan meninggal kan lain cerita kali ya.... Hehehehe.” (Srikandi)

“Sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum pernah diterapkan, karena mungkin melihat pelanggarannya tidak berakibat fatal, seperti dokter kan risikonya nyawa, .” (Bima)

Srikandi dan Bima mencermati pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum pernah dilaksanakan. Mereka berasumsi bahwa resiko melanggar kode etik bukan merupakan resiko yang berat dan mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang disebabkan kesalahan memberikan informasi, sehingga sikap permisif IPI terhadap pelanggaran ini pun cukup besar.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah mencermati analisis hasil penelitian tentang implementasi Kode Etik Pustakawan, studi kasus di Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia oleh pustakawan Perpustakaan Jawa Tengah dilaksanakan sejalan dengan budaya Jawa yang menjadi tradisi masyarakatnya, khususnya di Jawa Tengah. Kode etik dan budaya ini saling menguatkan, terutama terkait dengan hubungan sosial yang menggunakan *unggah-ungguh* (tata krama) yang saling *ajeni* (menghargai), saling menghormati yang disimbolkan melalui sikap dan bahasa yang digunakan, dan memahami porsi atau posisi masing-masing. Sehingga dapat dikatakan ketika budaya Jawa ini sudah menjadi acuan dalam bekerja, maka sesungguhnya semangat yang terkandung dalam kode etik sudah dijalankan. Sebaliknya, jika substansi kode etik sudah dilakukan, maka sesungguhnya pustakawan sudah hidup berbudaya.

Dengan demikian pemahaman pustakawan terhadap kode etik terbangun lewat pemahamannya terhadap etika yang dimiliki, budaya kerja yang sudah ada, ajaran agama yang diyakini, dan tradisi dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sedangkan nilai-nilai kode etik seperti loyalitas, kebersamaan, motivasi, kerja sama, tenggang rasa, saling menolong, dan solidaritas, dimunculkan bukan dari melihat butir-butir teks satu persatu melainkan menerjemahkan pemahamannya terhadap hal-hal yang biasa dilakukan dalam pekerjaannya, sehingga ketika informan mencermati teks kode etik, ia mengatakan bahwa sebenarnya kode etik sudah dilaksanakan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kode etik adalah berupaya bekerja dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, menaati aturan, loyal terhadap pimpinan, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pemustaka, menghargai sesama teman, dan lain-lain.

Sementara itu kendala pokok dalam pelaksanaan kode etik ini adalah birokrasi (kebijakan) yang tidak sejalan dengan kehendak kode etik, dan

kurangnya sosialisasi ke tingkat yang lebih bawah, sehingga secara umum pustakawan belum mengetahui kode etik ini.

## 5.2 Saran-saran

Penulis melihat ada hal yang menarik dalam penelitian ini yang menstimulasi penulis untuk memberikan saran-saran, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap implementasi Kode Etik Pustakawan di suatu instansi. Saran-saran tersebut adalah:

- a. Agar sosialisasi kode etik lebih digencarkan lagi, untuk meningkatkan pemahaman pustakawan terhadap kode etik, mengingat mayoritas pustakawan belum mengetahui kode etik secara rinci, meskipun ia menjadi anggota IPI.
- b. Agar IPI memberikan jabaran lebih khusus mengenai nilai-nilai yang dikandung dalam kode etik, sehingga ketika pustakawan melaksanakan tugasnya, kode etik menjadi rujukan utamanya.
- c. Agar IPI membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan kode etik, sehingga IPI dapat mengetahui efektifitas kode etik ini ketika diimplementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari.
- d. Penelitian ini dapat dikatakan baru mengungkapkan sebagian kecil fenomena yang terjadi dalam implementasi kode etik, sehingga IPI pada khususnya, perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berbagai permasalahan kode etik pustakawan.



## DAFTAR REFERENSI

- American Library Association (2008). *Code of ethics of the American library association*. 24 Juni 2008.  
<<http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/statementspols/codeofethics/co deethics.cfm>>
- American Psychological Association (2002). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. 28 Oktober 2008.  
<<http://www.apa.org/ethics/code2002.pdf>>.
- American Sociological Association (1999). *Code of ethic and association*. 30 Oktober 2008. <[http://www.asha.org/nr/rdonlyres/f51e46c5-3d87-44af-bfda-46d32f85c60/0/18763\\_4.pdf](http://www.asha.org/nr/rdonlyres/f51e46c5-3d87-44af-bfda-46d32f85c60/0/18763_4.pdf)>.
- Arifin, Popon Sjarif (2006, November). Etika profesi sebagai pengajar, suatu pemikiran ke arah pengembangan profesionalisme staf pengajar (dosen) seni rupa, *Journal Online*. 2 Nopember 2008.  
<<http://students.ukdw.ac.id/~22981938/jurnal11.html>>.
- Baker, Robert (1999). Codes of Ethics: some history, *Perspectives on The Professions*. 19, 28 Oktober 2008. <<http://ethics.iit.edu/perspective>>.
- Bertens, K. (2004). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bjorner, Susan N. (1991). Ethical challenges in dual employment, *Library Trends*. 40(2).
- Bopp, Richard E. and Smith, Linda C. (2001), *Reference and information services: an introduction*. Colorado: Libraries Unlimited
- Dharma, Surya dan Haedar Akib. (2004, 22 March). Budaya organisasi kreatif: mencermati budaya organisasi sebagai faktor determinan kreativitas, *Usahawan*. 33(03), 22-28.
- Dragovich, Pamela (2007). IRC dengan mahasiswa JIP UI angkatan 2007 di IRC Jakarta Pusat, tanggal 18 September 2007.
- Feather, John and Paul Sturges (1997). *International encyclopedia of information and library science*. London: Routledge.
- Gorman, G.E. and Clayton, Peter, (2005). *Qualitative research for the information professional: A practice books*. London: Facet

- Haidt, Jonathan (2006) *The Happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom*, New York: Basic Books, 10 Nopember 2008  
<<http://plato.stanford.edu/entries/morality-definition/>>.
- Harefa, Andreas (2004). *Membangkitkan etos profesionaolisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harold, Leonard Montague (1995). *Harold's librarians glossary and reference Book*. England: Gower Publishing Company Limited.
- Hatch, Mary Jo. (1997). *Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspective*. New York: Oxford University Press.
- Hermawan S, Rachman dan Zen, Zulfikar (2006). *Etika kepastakawanan: Suatu pendekatan terhadap kode etik pustakawan Indonesia*, Jakarta: Sagung Seto.
- Hofman, Kathy (2005, March 25). Professional ethics and librarianship, *Texas library journal*. 30 Oktober 2008.  
<<http://www.txla.org/pubs/tlj81/Ethics.pdf>>.
- Horvart dalam Pert, Kornelija (2002, May 22). Public perception of role and tasks of library and information science professionals in Croatia: An Overview of Recent Ativities, *New Library World*. 103(1181).
- Ikatan Pustakawan Indonesia (2002). *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan pustakawan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.
- (2006). *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan pustakawan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Irawan, Prasetyo (2006). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu social*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Kartosedono, Soekarman (2003, December). Strategi nasional dalam pencapaian profesionalisme pustakawan, *Media Pustakawan*. 10(4), 2-5.
- Koentjaraningrat (2000). *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laksmi (2006). *Tinjauan kulutural terhadap kepastakawanan: Inspirasi dari sebuah karya Umberto Eco*, Jakarta: Sagung Seto.
- Lasa (2009). "Mengembangkan profesi pustakawan" dalam *Peprustakaan dalam dinamika pendidikan dan kemsayarakatan*, Semarang: UNIKA.
- Maister, David H. (1998). *True professionalism*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Martin, William J. (1995). *The global information society*, Hampshire: Aslib Gower.
- Matlin, Margaret W. (1999). *Psychology*. Orlando: Harcourt Brace.
- Mondy, R. Wayne and Premeaux, Shane R (1995). *Management: Concept, practice, and skill*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Passer, Michel W. and Smith, Ronald E. (2007). *Psychology: the science of mind and behavior*, New York: McGraw Hill Companies.
- Poerwandari, E. Kristi. (2007). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*, Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,
- Prasetyo, Djoko Adi (n.d), *Cermin etika dalam hubungan antar manusia: Analisis pada beberapa ornamen candi Sukuh*, 28 Oktober 2008. <<http://journal.unair.ac.id/filepdf/Cerminan%20etika.pdf>>.
- Rowley, Jenifer and Farrow, John (2000). *Organizing knowledge : an introduction to managing access to information*, Hampshire: Gower.
- Purwono (2009). "Visi perpustakaan dan pustakawan menuju era global dalam Perpustakaan dalam dinamika pendidikan dan masyarakat". Semarang, UNIKA.
- Rubin, Richard E. (2004). *Foundation of library and information science*, New York: Neal-Schumen Publisher.
- Said, M. (1996). *Etika masyarakat Indonesia*, Jakarta: Radnya Paramita.
- Searchcrm's, www.definition.(n.d), April 17,2009, <[http://searchcrm.techtargget.com/sDefinition/0,,sid11\\_gci851347,00.html](http://searchcrm.techtargget.com/sDefinition/0,,sid11_gci851347,00.html)>
- Sims, R. (2003). *Ethics and corporate social responsibility - Why giants fall*, C.T.:Greenwood Press. 15 des 2008. <<http://nofeiman.com/2006/10/etika-bisnis-dan-bisnis-beretika/>>.
- Spaeman, Robert (1989). *Basic moral concept*. London: Routledge
- Stueart, Robert D. and Moran, Barbara B (2002). *Library and information centre management*. 6<sup>th</sup> ed, Colorado: Libraries Unlimited.
- Sudarsono, Blasius (2008). "Pendidikan profesional pustakawan dan kebutuhan perpustakaan kita", dalam *Perpustakaan dalam dinamika pendidikan dan masyarakat*. Semarang: UNIKA.

- Sulistyo-Basuki (2001, November). *Etika profesi*. Makalah untuk rapat kerja PB IPI (Jakarta, 5. s.d. 7 November, 2001), 30 Oktober 2008. <<http://www.consal.org.sg/forums/forum.asp?F=165&M=2274>>.
- Sumiati, Opong (2002, Nopember). Pertanggungjawaban etika dan dilema yang dihadapi pustakawan sebagai penyedia informasi, *Media Pustakawan*. 9 (4), 20-24.
- Supriyanto (2003, September). Profesionalisme pustakawan dalam menghadapi otonomi daerah, *Media Pustakawan*. 10(3), 2-7.
- Suwarno, Wiji (2008). *Psikologi perpustakaan*, Jakarta: Sagung Seto
- The Psychological Society of Ireland (1999). *Code of professional ethics*. 30 Oktober 2008. <[http://www.psihq.ie/documents/Code% 20of% 20 Professional % 20Ethics. PDF](http://www.psihq.ie/documents/Code%20of%20Professional%20Ethics.PDF)>.
- Tronto, Joan C. (1994). *Moral boundaries*, New York: Routledge.
- Undang-undang No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Velasquez (1987). What is ethics?, *Issues Ethic*. 1(1). 13 Januari 2009. <<http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/whatisethics.html>>.
- Zubair, Achmad Charris (1995). *Kuliah etika*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Universitas Indonesia

## JADWAL PENELITIAN

No	Macam kegiatan	Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Penyusunan Proposal	****	****					
2	Presentasi proposal			---*				
4	Pengumpulan data		****	****	****			
5	Analisis data				****			
6	Penulisan laporan				---**	****	**_	
7	Penyerahan laporan						---*	
8	Presentasi							_*_

Ket : \* minggu ke- (waktu) yang digunakan  
 - minggu ke- (waktu) yang tidak digunakan

## JADWAL WAWANCARA

Informan	Hari / tanggal	Jam
Arjuna	Rabu, 15 April 2009	09.45 – 10.15 WIB
	Selasa, 21 April 2009	08.30 – 09.00 WIB
	Jum'at, 24 April 2009	10.30 – 11.15 WIB
Srikandi	Rabu, 15 April 2009	12.00 – 12.20 WIB
	Selasa, 21 April 2009	11.00 – 12.00 WIB
	Jum'at, 24 April 2009	09.00 – 09.30 WIB
Sembadra	Rabu, 15 April 2009	14.00 – 14.15 WIB
	Kamis, 23 April 2009	10.00 – 11.15 WIB
Bima	Senin, 27 April 2009	12.00 – 12.30 WIB
	Rabu, 29 April 2009	12.30 – 14.00 WIB

Komunikasi pendukung menggunakan telepon atau *short messege services* (SMS) kepada yang bersangkutan.

## KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA

### MUKADIMAH

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan antara profesi dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Kode etik pustakawan Indonesia merupakan:

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan;
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan Negara.

### BAB II TUJUAN Pasal 2

Kode etik pustakawan mempunyai tujuan:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan;
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;
- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
- d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

**BAB III**  
**SIKAP DASAR PUSTAKAWAN**  
**Pasal 3**

Sikap pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus di pedomani:

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;
- e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.
- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

**HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA**

**Pasal 4**

- (1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan.
- (3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.
- (4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

**HUBUNGAN ANTAR PUSTAKAWAN**

**Pasal 5**

- (1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
- (2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.
- (3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan;
- (4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;



- (5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

### **HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan;
- (2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan;
- (3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

### **HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin;
- (2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab;
- (3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

### **HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
- (2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 9**

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia;
- (2) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan.

- (3) Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

#### **KETENTUAN LAIN**

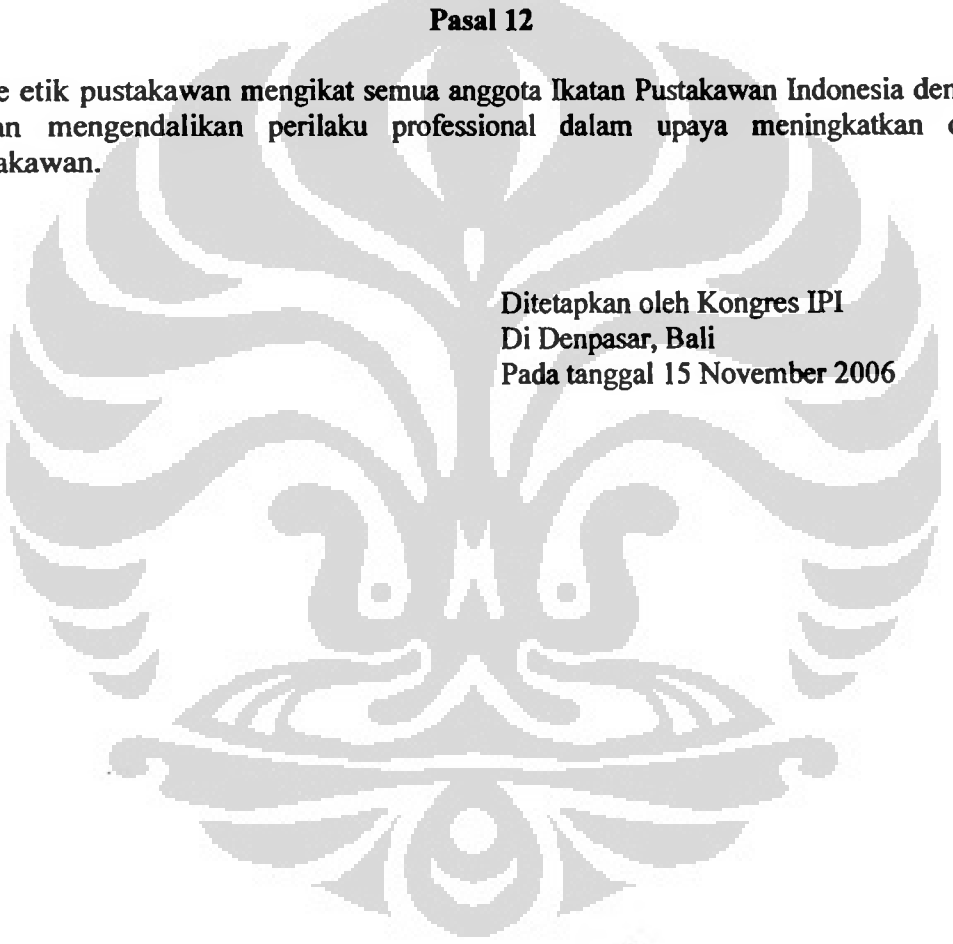
##### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Kode etik pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku professional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.



Ditetapkan oleh Kongres IPI  
Di Denpasar, Bali  
Pada tanggal 15 November 2006

## REDUKSI HASIL WAWANCARA

Tema : Pemahaman tentang kode etik  
 Informan : Informan pertama (Arjuna)

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
KE.1.3	<p>S :            Sebagai pustakawan, apakah bapak mengetahui bahwa di Perpustakaan ini mempunyai kode etik pustakawan.</p> <p>Inf. 1 :            Tahu, tapi kode etik pustakawan di sini kayaknya ndak populer ya pak. Ya mungkin karena belum digencarkan oleh pengurus pusatnya atau pengurus daerahnya.            Soalnya begini, kalau pengurus daerah yang saya tahu kan "plat merah" gitu ya. Jadi kalau sudah terbentur pekerjaan rutinnnya, pekerjaan sampingan kayak gini ya terus terbengkalai atau ya ndak maksimal.</p>	Kode etik di Perpustakaan tidak populer karena belum disosialisasikan secara maksimal.
KE.1.5	<p>S :            Begini pak, paling tidak bapak sudah bisa menangkap konsep kode etik itu apa. Bagaimana menurut bapak?</p> <p>Arjuna :            Ya kalau menurut saya kode etik itu ya rambu-rambu untuk pustakawan. Begini, Profesi itu kan banyak bidangnya ya. Ada dokumentasi, ada arsip, ada perpustakaan. Kan pekerjaannya ini hampir sama. Nah dengan adanya kode etik ini menghindari agar tidak <i>overlap</i>. Jadi kan jelas o... ini pekerjaan arsip, o... ini pekerjaan perpustakaan kan gitu. Apalagi dengan adanya PP no. 41 di daerah ini yang menggabungkan antara arsip dan perpustakaan. PP ini tahun 2007, yang penerapannya tahun 2008. Ya.kode etik ini perlu untuk itu.</p>	Kode etik adalah rambu-rambu pustakawan untuk menghindari agar tugas pustakawan tidak <i>overlap</i> , terutama setelah terbitnya PP no.41 tahun 2007 tentang penggabungan antara arsip dan perpustakaan.
KE.1.6	<p>S:            Jadi bagaimana menurut panjenengan, apa kode etik itu penting?</p> <p>Arjuna:            Ya penting tapi harus disosialisasikan. Harus gencar sosialisasinya. Kalau enggak ya cuma sekedar kode etik saja. Apalagi kalau kita sudah berusaha dapat ISO '99. Jadi kode etik ini kan bisa mengatur sejauh mana pustakawan bekerja kan.</p>	Pentingnya Kode etik adalah untuk mengatur pustakawan dalam bekerja
KE.17	<p>S:            Menurut panjenengan, pustakawan itu yang mana, yang terdaftar sebagai anggota IPI, atau semua yang punya ilmu perpustakaan?</p> <p>Arjuna:            O iya to. Pustakawan yang diatur ini kan yang anggota IPI. Tapi kalau menurut definisi pustakawan dari IPI, pustakawan itu kan bukan yang plat merah aja, swasta juga bisa jadi pustakawan. Pokoke konsen di perpustakaan, punya ilmu kepustakawanan itu sudah masuk dalam jajaran</p>	Pustakawan menurut IPI adalah orang yang konsen di bidang perpustakaan, tidak hanya PNS. Jadi kode etik mengikat seluruh pustakawan, bukan hanya anggota IPI.

	<p>pustakawan.  <i>Ning</i> (tapi) yang terkena aturan ini harusnya yang di IPI ya. Yang dari pemerintah itu mestinya juga ikut kena, wong yang penting kan PNS yang fungsional pustakawan. Tapi lagi-lagi profesi pustakawan itu sendiri ya belum mapan. Sekarang ini prinsipnya ya belum ada lah. Wong yang baru interest, punya latar belakang pendidikan perpustakaan itu saja menurut IPI sudah masuk jadi anggota profesi.          Lain halnya dengan dokter kan. Kalau dokterkan memang profesi yang memang sudah beneran, ya kan. Dia harus punya pendidikan, harus macem-macem.          Lha kalau kita kan, masih berkembanglah... mungkin untuk profesi pustakawan sendiri masih ngambang, gitu ya.</p>	
--	---	--

Informan : Informan kedua(Srikandi)

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
KE.2.9	<p>S: Menurut ibu, apa pengertian kode etik pustakawan?</p> <p>Srikandi: Ya menurut saya kode etik itu aturan-aturan yang diberlakukan untuk pustakawan untuk kelancaran tugas sebagai pustakawan.</p>	Kode etik itu ya aturan-aturan untuk kelancaran tugas pustakawan
KE.2.10	<p>S: Menurut panjenengan seberapa penting kode etik bagi pustakawan?</p> <p>Srikandi : Menurut saya ya perlu, biar pustakawan jelas kerjanya, biar mengatur bagaimana melayani pengguna, hubungan dengan masyarakatnya juga...nah <i>ketoke</i> (kelihatannya) ya memang perlu.</p>	Kode etik penting untuk kejelasan kerja, jelas dalam melayani pengguna dan berinteraksi dengan masyarakat.
KE.2.11	<p>S: Bagaimana menurut ibu, kalau saya bilang kode etik itu ada, tapi pemberlakuannya atau penerapannya tidak signifikan, artinya ada tapi tidak mengikat, begitu.</p> <p>Srikandi : Ya kalau menurut saya sih tergantung IPI nya, lha wong IPI nya aja <i>ra jalan</i> (tidak berjalan) kok. Malah kalau ada pertemuan, kesannya seolah-olah jadi ajang <i>mlaku-mlaku</i> (jalan-jalan), malah kesannya piknik, reunion, ketemu <i>konco lawas</i> (teman lama) gitu. Hehehe .... Eh anu...besok ada acara ke Bali lho, atau gimana gitu....yang jadi oleh-oleh tu malah agenda pertemuan selanjutnya coba, bukan hasilnya. <i>Piye jal</i> (gimana coba)? Hehehe...</p>	Pemberlakuan Kode etik Tergantung IPI
KE.2.12.	<p>S: Kode etik itu kan untuk membuat pustakawan jadi profesional. Menurut ibu gimana tu?</p> <p>Srikandi Menurut saya profesionalisme, itu saya melayani masyarakat dan mereka merasa sudah terlayani ya sudah. Itu <i>nek</i> (kalau) menurut saya, dan juga kan profesionalisme itu melihat pendidikan to? Lha saya sudah melakukannya,</p>	Fungsi kode etik adalah membuat pustakawan menjadi lebih Profesional.

	tapi ya itu tadi gak lihat kode etik dulu baru saya sekolah. Hehehe .... Kebalik ya. Idealnya kan lihat kode etik dulu, apa yang dimau kode etik terus kita lakukan. Lha tugas saya di sini ni menerbitkan majalah, mempersiapkan seminar, pelatihan dan lain-lain, tidak langsung berhadapan dengan pengguna.	
--	---	--

Informan : Informan ketiga (Sembadra)

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
KE.3.1	S: Menurut ibu arti kode etik pustakawan itu apa sih?  Sembadra : Sebenarnya kita sudah melaksanakan kode etik itu lho. Kita kan punya etika. Jadi menurut saya tanpa kode etik pun kita sudah bekerja berdasarkan etika kok. <i>Aku ra ngerti tapi bareng moco yo wis ngono</i> (aku tidak mengerti tapi setelah baca ya, seperti itu) berarti saya sudah melakukan.	Pelaksanaan kode etik sesungguhnya berdasar etika yang telah dimiliki.
KE.3.1	S: Jadi apa tidak perlu kode etik saja?  Sembadra : Ya tetap perlu lah selama bekerja biar kerja kita tetap teratur. Tapi toh seandainya kode etik itu tidak ada pun kita sudah melaksanakan kok. Malah <i>ketoke</i> (kelihatannya) 100% sudah saya lakukan. Lha wong aturannya seperti itu, tak pikir yang gimana gitu?	Kode etik diperlukan untuk mengatur pustakawan dalam bekerja.
KE.3.4	S: Jadi kode etik itu menurut panjenengan apa?  Sembadra : Ya aturan-aturan kepustakawanan yang harus dilaksanakan oleh pustakawan	Kode etik adalah aturan-aturan kepustakawanan yang harus dilaksanakan oleh pustakawan.
KE.3.5	S: Kalau begitu kan melaksanakan dulu baru ada aturan, gitu?  Sembadra : Yo aturan dulu mungkin hehehehe, ya karena kesalahan kita tu kan gak pernah membaca. Yang salah tu mungkin Perpunas ya wong sudah ada kok gak disebarkan.....	Kendala pelaksanaan KE adalah pustakawan tidak membaca dahulu kode etik.

Informan : Informan keempat (Bima)

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
KE.4.1	S: Maaf ni, apa yang panjenengan ketahui tentang kode etik?  Bima : Secara teori kan saya baru dapat dari panjenengan kemarin itu, tapi secara professional dan porposional, dalam konteks pustakawan ya, saya gak mau tu kalau melakukan sesuatu itu <i>letter lux</i> gitu. Saya pikir kode etik itu juga akan berubah secara proporsional dan professional, sesuai dengan tuntutan jaman. Jadi kalau saya fleksibel ajalah menyikapi kode etik itu. Secara teori kan saya baru dapat	Kode etik akan berubah sesuai dengan tuntutan zaman.

	dari panjenengan kemarin itu, tapi secara professional dan porposional, dalam konteks pustakawan ya, saya gak mau tu kalau melakukan sesuatu itu <i>letter lux</i> gitu. Saya pikir kode etik itu juga akan berubah secara proporsional dan professional, sesuai dengan tuntutan jaman. Jadi kalau saya fleksibel ajalah menyikapi kode etik itu. Lagian "Sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum pernah diterapkan, karena mungkin melihat pelanggarannya tidak berakibat fatal, seperti dokter kan resikonya nyawa,."	
KE.4.5	<p>S: ya...misalnya definisi kode etik pustakawan adalah titik-titik gitu, berdasarkan dengan apa yang panjenengan pahami.</p> <p>Bima : Ooo gitu. Kode etik ini sebenarnya.... Ya kalau menurut saya sih....istilahnya semacam aturan atau rambu ya yang ditujukan pada pustakawan, mungkin...pekerjaannya sesuai dengan jabatan mereka yang proporsional dan profesional itu, dan mereka juga harus bisa menjaga nama baik mereka. Dalam arti, menjaga nama baik pustakawan yang selama ini...mungkin...masih belum banyak orang tahu ataupun kenal lah, atau mungkin orang tahu apa sih pustakawan, nah sedikit demi sedikit bisa mengangkat citra pustakawan itu melalui beberapa pengembangan-pengembangan tugas kerja di perpustakaan, dan pustakawan yang tahu itu.</p>	Kode etik adalah aturan atau rambu-rambu yang diperuntukkan bagi pustakawan agar tugas yang dibebankan dilaksanakan dengan proporsional dan profesional.

Tema : Nilai-nilai Kode Etik Pustakawan Indonesia  
Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
NL.1.8	<p>S: Menurut panjenengan, nilai-nilai yang ada dalam kode etik itu apa pak?</p> <p>Arjuna : Apa ya...saya belum pernah baca tuntas. Maksudnya nilai nilai yang bagaimana tu?</p>	Kode etik belum dicermati secara seksama
NL.1.9	<p>S: Nilai-nilai di sini ya kaitannya dengan etika, moral gitu...</p> <p>Arjuna : Ya kalau itu mungkin ada unsur loyalitas, kerjasama, karena kan ada kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, profesi..... Kalau di pemerintahan ya loyalnya kepada pimpinan, instansi, ada lagi mungkin solidaritas...soalnya kita kan dituntut saling menghormati antar pustakawan. Kendalanya ya itu tadi ya pak. Birokrasi. Kalau di birokrasi kan lain. Apapun keputusannya pimpinan, meskipun bertentangan dengan kode etik kan harus tetap dilaksanakan to pak. Jadi kode etik ini masih kalah dengan kebijakan.</p>	<p>Nilai-nilai dalam kode etik diantaranya loyal terhadap pimpinan adan atau instansi, kerjasama, solidaritas.</p> <p>Kode etik di bawah kebijakan.</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
NL.2.12	<p>S: Sejauh ini nilai-nilai apa saja yang <i>panjenengan</i> tangkap dari kode etik itu?</p> <p>Srikandi : Kalau nilai-nilai kelihatannya campur sih ya... ada kerjasamanya, tu yang di kewajiban terhadap rekan sejawat, ada motivasinya juga yang di kewajiban ....mhhh itu lho yang harus meningkatkan kemampuan diri, termasuk kategori mana?</p>	<p>Nilai-nilai kode etik cukup kompleks, diantaranya kerjasama, motivasi, peningkatan kemampuan diri.</p>
NL.2.13	<p>S: Sikap dasar pustakawan?</p> <p>Srikandi : Nah...iya itu. Kan ada motivasinya to itu. Kan seolah-olah menyemangati pustakawan untuk selalu maju.</p>	<p>Nilai motivasi dilihat dari makna teks dalam kode etik.</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
NL.3.7	<p>S: Nilai-nilai apa yang ibu tangkap dari kode etik?</p> <p>Sembadra : O gitu. Tinggal kita yang menjalankannya itu, sudah merasa pas atau belum gitu. Loyalitas ada, kebersamaan juga ada. Sebenarnya tergantung bagaimana kita menerjemahkan.</p>	<p>Nilai-nilai dalam kode etik: loyalitas, kebersamaan.</p>
NL.3.8	<p>S: Jadi ini ada kode etik, terus kita baca dan diterjemahkan sendiri maksudnya, gitu?</p> <p>Sembadra : Iya... oooo ternyata ini yang harus kita laksanakan, gitu. Lha setelah saya baca, ternyata malah lebih dari bisa saya lakukan. Yang penting kan tidak melanggar. Gitu, misalnya. Umpama ada aturan buku tidak boleh dipinjam, terus dia nego karena memang penting banget. Lalu mau dipinjam sebentar untuk di foto copy, kalau nulis di sini waktunya tidak memungkinkan, tambah lagi rumahnya jauh. Itu kan kemudian pertimbangan nurani. Lha nek menurut saya kalau itu benar, ya kenapa tidak? Kan gitu</p>	<p>Nilai sosial: Pelaksanaan kode etik tidak lepas dari pertimbangan nurani, sehingga tidak kaku karena diterjemahkan secara tekstual</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
NL.4.6	<p>S: Sebagaimana kita tahu bahwa Kode etik itu merupakan panduan etika. Menurut bapak, nilai-nilai apa yang <i>panjenengan</i> tangkap dari sana?</p> <p>Bima : Di sini yang saya tangkap ya...dalam arti seperti saya <i>matur panjenengan</i>, bahwa aturan-aturan itu kan kita pakai</p>	<p>Nilai-nilai kode etik diantaranya adalah kerjasama, saling menolong, tenggang</p>

	<p>tapi gak kaku ya....bisa fleksibel selama tidak melanggar isi kode etik tersebut. Mungkin kita juga bisa kerjasama antar perpustakaan satu dengan yang lain, atau dalam segala hal lah yang berhubungan dengan ilmu perpustakaan dan informasi atau kepustakawanan.</p> <p>Kita juga bisa... dalam arti saling. Dalam arti saling, artinya kalau dibutuhkan baik kapasitasnya sebagai pustakawan maupun bukan, ketika dimintai bantuan oleh siapa saja, sebisa mungkin kita bantu, atau boleh dibilang ini harus tenggang rasa, gitu.</p>	<p>rasa, dan lain-lain</p>
--	--	----------------------------

**Sikap Dasar Pustakawan**

a. Tema : Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.1.11.3/a	<p>S: Di kantor panjenengan kan sudah sibuk dengan pekerjaan rutin, sementara sebagai seorang pustakawan harus memperhatikan kepentingan pemustaka. Apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi hal tersebut?</p> <p>Arjuna : Sesungguhnya pekerjaan pokok ini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna. Misalnya saya. Saya kan di bagian pengolahan ini berusaha mengolah buku atau koleksi lain secepat dan setepat mungkin, sehingga nanti memudahkan pengguna untuk mengaksesnya.</p>	<p>Melaksanakan tugas rutin adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pemustaka</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.2.13.3/a	<p>S: Di kantor panjenengan kan sudah sibuk dengan pekerjaan rutin, sementara sebagai seorang pustakawan harus memperhatikan kepentingan pemustaka. Apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi hal tersebut?</p> <p>Srikandi : Kalau pekerjaan rutin ya memang tiap hari di lakukan, karena itu tugas pokok ya. Ini kan juga untuk pengguna. Coba kalau kita gak kerja ya, ... kebetulan saya kan di penerbitan majalah. Kalau majalah gak terbit gimana coba, padahal majalah ini juga dibuat untuk pengguna. Ya gitum tugas saya ya mengumpulkan naskah atau malah cari naskah,kaya panjenengan saya mintai, kan siapa tahu panjenengan punya tulisan yang bisa ikut meramaikan majalah Visi Pustakawan ini.</p>	<p>Pekerjaan rutin tetap dilakukan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada pengguna.</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.3.15.3/a	<p>S: Di kantor panjenengan kan sudah sibuk dengan pekerjaan rutin, sementara sebagai seorang pustakawan harus memperhatikan kepentingan pemustaka. Apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi hal tersebut?</p>	<p>Dalam bekerja yang terpenting adalah melaksanakan tugas</p>



	<p>Sembadra : Kalau saya, kerjakan yang di depan mata dulu. Soalnya kalau sudah di tunda-tunda biasanya gak selesai-selesai. Cuma memang pada prinsipnya pemustaka lebih harus diperhatikan ketimbang aspek lain. Itu idealnya....misale begini, kalau kelihatan ada pengguna yang bingung kita tanya, "<i>mas atau mbak...ada yang bisa saya Bantu</i>", misalnya. Atau kalau dia tanya ya kita jawab. Biasanya itu nanya posisi bukunya.</p> <p>S: Apa pernah ada komplain dari pemustaka bu?</p> <p>Sembadra : Ooo gak pernah....., gak pernah tidak maksudnya. Hehehe...Tapi sejak ada OPAC komplain sudah jarang. Ya kadang memang komplain langsung ke kita, atau mereka menulis saran-saran di kotak saran.</p>	<p>sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan pengguna</p>
--	--	---

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.4.1.3/a	<p>S: Di kantor panjenengan kan sudah sibuk dengan pekerjaan rutin, sementara sebagai seorang pustakawan harus memperhatikan kepentingan pemustaka. Apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi hal tersebut?</p> <p>Bima : Nah tugas saya di sini kan membantu kepala badan, lebih dekat lagi adalah kepala UPT atau pimpinan di sini, dan tentu membantu tugas-tugas lain yang bisa saya kerjakan. Misalnya, tugas pokok saya kan di Audio Visual, tapi saya juga harus membantu menata buku di rak, mengajar, dan lain-lain, dan juga saya tetap berusaha melaksanakan tugas apapun yang dibebankan pada saya. Jadi itu, selama ini ya saya berusaha untuk selalu dalam koridor pustakawan, berusaha tidak melampaui batas atau porsi tugas saya, dan berusaha semampu saya untuk tetap dalam tugas-tugas pustakawan. Itu semua kan demi kepentingan pengguna juga kan?</p>	<p>Melaksanakan tugas penuh tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya dan membantu pekerjaan yang lain demi kepentingan pemustaka.</p>
Sidas.4.1.3/a	<p>S: Di Audio Visual ini, bagaimana bentuk layanannya?</p> <p>Bima : Ya...di sini melayani CD-CD yang <i>include</i> dalam buku. Kan sekarang ini lagi trend buku yang disertai CD. Nah...biasanya mereka mencari ke sini dan mereka kalau menemukan bisa cek atau lihat dengan menggunakan fasilitas yang ada di sini. itu yang kita layankan, <i>free</i>, gak dipungut biaya sedikitpun. Jadi dengan menggunakan sarana yang ada di sini, tv, CD, CD/DVD player, komputer dan lain sebagainya. Tadinya saya juga komputer ni nol, tapi lama-lama karena biasa jadi lebih banyak tahu. Umpama memang gak bisa ya ngasih-ngasih masukan pada mereka gitu.</p>	<p>Tugas di layanan AV berupa layanan CD, <i>free</i>, tidak dipungut biaya. Sarana yang digunakan komputer, CD/VCD player, TV dan lain-lain.</p>

- b. Tema : Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.  
Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.1.35.3/b	<p>S: Apa yang panjenengan lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan?</p> <p>Arjuna : Untuk saya ya yang paling kelihatan ya seminar. Tapi seminarnya macem-macem. Kadang ada yang berhubungan dengan TI, internet, bahasa, macem-macem. Rata-rata itu. Ya mungkin lihat diinternet ada seminar, saya ikut gitu. Untuk mengikuti perkembangan ya baca-baca artikel, tulisan tentang perpustakaan, browsing di internet.</p>	Untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan, dilakukan melalui seminar, <i>browsing</i> di internet, dan lain-lain

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepri,2.45.3/b	<p>S: Pustakawan berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Srikandi : Ya ikut-ikut seminar, kadang kalau ada bedah buku ya saya ikut, gitu.</p>	Meningkatkan kompetensi dengan ikut seminar, bedah buku, dan lain-lain
Sidas.2.46.3/b	<p>S: Untuk pemerataan untuk putusan siapa yang dikirim, gitu bagaimana bu, apa mengabaikan jenjang pendidikan?</p> <p>Srikandi : Ya gantian. Di sini di buat jurnal kok mas. Siapa saja yang belum. Tapi ya disesuaikan dengan kompetensinya dan syarat-syaratnya. Jadi gak kok cuma <i>wong kuwi-kuwi terus</i> (orang itu-itu terus) to. Sampai-sampai peserta lain Tanya "lho yang lain pada kemana kok sampeyan terus yang berangkat?"lha kan juga gak enak to. Terus kalau di sini siapa yang berangkat itu mempertanggungjawabkan hasilnya kok. Dia presentasikan hasil yang didapat. Menurut saya di sini teratur kok untuk urusan itu.</p>	Untuk pemerataan: dibuatkan jurnal yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing pustakawan.

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.3.49.3/b	<p>S: Untuk meningkatkan kompetensi yang sekarang panjenengan miliki, apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Sembadra : Lho nek itu ya paling ikut seminar, diklat atau malah baca-baca sendiri kan lebih manfaat. Enak lho kalau sering ikut seminar tu. Ikut tapi yo kudu <i>tenanan</i> (serius) gitu. Lumayan kan bisa jadi obat jenuh kerja tapi juga dapat ilmu. Jadi ndak Cuma <i>melo-melo thok</i></p>	Untuk meningkatkan kompetensi: serius dalam mengikuti berbagai seminar, atau belajar sendiri, atau diklat, dan lain-lain.

	<p>(sekedar ikut aja). Nek aku mangkat ya harus dengerin benar-benar. Lah kan percuma kalau udah berangkat kok cuma ngantuk. Apa yang didapat coba?, lha nek aku mendingan ndak usah berangkat aja.</p> <p>Lho ada lho orang yang cuma titip tanda tangan aja. Maksudnya dia itu sudah ditugaskan berangkat, tapi dia ndak berangkat. Dia malah titip tanda tangan sama temennya yang berangkat. Tapi untungya aku ndak pernah nitip juga belum pernah dititipi kok.</p>	
--	--	--

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.4.36.3/b	<p>S: Pustakawan meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan. Apa yang panjengan lakukan?</p> <p>Bima : Kalau kuliah gak ya, terus terang saya sudah jenuh. Mungkin bisa saja kuliah tapi nanti lah. Sekarang itu saya berusaha ikut seminar, TOT, loka karya dan lain-lain. Dengan saya ikut itu kan saya bisa ngomong ya, terutama pada saat mengajar. Dulu saya itu untuk komputer nol sama sekali. Kemudian saya belajar yang akhirnya bisa saya manfaatkan untuk ngajari orang lain juga. Jelas ini kan menambah pengetahuan.</p>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan, Bima mengikuti berbagai seminar, TOT, loka karya, dan lain-lain</p>

c. Tema : Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.1.12.3/c	<p>S: Umpama ada saudara atau teman dekat yang meminta dipinjamkan buku tanpa melalui prosedur, apa yang bapak lakukan?</p> <p>Arjuna : Kalau saya tentunya harus sesuai prosedur lah. Kalau umpamane kepepet ya pakai kartu saya atau gimana gitu, tapi yang penting prosedural.</p>	<p>Membedakan sikap hidup pribadi dengan profesi dapat dilihat dari kesesuaian perilaku dengan aturan</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.2.28.3/c	<p>S: Umpama ada saudara atau teman dekat yang meminta dipinjamkan buku tanpa melalui prosedur, apa yang bapak lakukan?</p> <p>Srikandi Saya kan tidak dibagian layanan. Ya dulu sempat di layanan, tapi hanya 2 (dua) tahun, yang setelah itu saya dipindah ke Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah, sampai sekarang ngurusi soal penerbitan majalah. Nah kalau saya yang di pelayanan boleh lah pinjam tapi atas nama saya, atau pada intinya peminjaman ini terkontrol. Kita berusaha gak membedakan apakah itu saudara, teman atau bukan, yang</p>	<p>Tanggung jawab sebagai bentuk sikap membedakan kepentingan pribadi dengan profesi, diantaranya adalah tidak memberikan prioritas kepada pengguna karena masalah kedekatan, maupun hubungan keluarga.</p>

	kita lihat itu adalah mereka yang butuh informasi di perpustakaan itu adalah <i>user</i> kita. Gitu aja.	
--	--	--

Informasi : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.3.30.3/c	<p>S: Pernah gak, ibu dihadapkan dengan suatu pilihan antara kerja dengan kepentingan pribadi?</p> <p>Sembadra : Pernah. Yang paling sering itu kalau pas piket hari minggu. Namanya piket, kan tidak semua masuk kantor kan. Lha enaknya piket ini dihitung lembur, dan itu digilir kok, artinya bisa juga pas bagian kita tapi ada kepentingan, bisa juga digantikan orang lain. Ya namanya tugas ya tetap harus mau, meski kadang-kadang itu bareng dengan agenda keluarga, sing <i>jagong</i> (menghadiri undangan) lah, sing ke tempat mbahe lah. Ya...saya pilih piket dulu. Kan tidak setiap minggu piket.</p>	Sembadra memilih melaksanakan tugas dahulu dibanding dengan kepentingan pribadinya.
Sidas.3.31.3/c	<p>S: Apa gak digilir?</p> <p>Bima : Ya giliran juga. Ada jadwalnya, tapi kalau berhalangan ya bisa minta digantikan teman. Pokoke dari semua pegawai sudah ditawari, siapa saja yang mau, termasuk saya Setelah tahu orang-orangnya yang bersedia, terus dijadwal. Satpam wae juga begitu. Nah kebetulan satpam di sini ini ngambil orang sekitar sini. Di samping memberikan pekerjaan, juga kantor biar aman.</p>	

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.4.9.3/c	<p>S: Umpama ada saudara atau teman dekat yang meminta dipinjamkan buku tanpa melalui prosedur, apa yang bapak/ibu lakukan?</p> <p>Bima: Sumpah mas, aku belum pernah kok yang namanya pinjam itu hanya via telephon, atau yang lainnya, kalau pinjam ya ke perpustakaan. Kan ada kartu pinjamnya. Ya misalnya itu terjadi ya kita kasih penjelasan dulu lah ke saudara atau teman kita tadi, bahwa itu gak benar. Paling tidak kita minimalisir lah kesalahan-kesalahan itu, sehingga tidak jadi beban pikiran. Kalau saya merasa punya beban, saya selalu omongkan. Misalnya saya disuruh ini, tapi saya gak bisa, ya saya terus terang gak bisa.</p>	Bersikap tegas berdasarkan aturan yang berlaku dengan memberikan penjelasan seperlunya untuk menjaga agartidak terjadi kesalahpahaman.

- d. Tema :Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional.  
Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.1.36.3/d	<p>S: Apakah bapak merasa bahwa setiap kegiatan kerja yang bapak lakukan mencerminkan profesionalisme?</p> <p>Arjuna : Walah....hahaha gimana ya? Kalau profesionalismenya tentang kerjaan ya mestinya begitu. Seperti saya mengolah buku kan mesti punya pengalaman, pendidikan, ada ilmu tentang klasifikasi gitu, lha tanpa itu kan tidak bisa. Kalau semua sikap yang ditanyakan ya...susah jawabnya. Lha apa kira-kira guyon (bercanda) itu juga di nilai professional tidaknya?</p>	Sikap professional terbatas pada pelaksanaan kerja.

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.2.47.3/d	<p>S: Apakah ibu merasa bahwa setiap kegiatan kerja yang ibu lakukan mencerminkan profesionalisme?</p> <p>Srikandi : Yang pasti saya bekerja sebaik-baiknya dan semampu saya lah. Soal profesional tidaknya biar orang yang menilai.</p>	Sikap professional ditunjukkan dengan bekerja sebaik-baiknya dan sesuai kemampuan.

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.1.54.3/d	<p>S: Apakah ibu merasa bahwa setiap kegiatan kerja yang ibu lakukan mencerminkan profesionalisme?</p> <p>Sembadra : Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Soalnya kan kita kerja yang penting kerja. Soal professional atau ndaknya kan belakangan. Seperti kata saya tadi, yang penting kan pengguna merasa terlayani dengan baik, itu sudah profesional.</p>	Sikap professional bidang layanan, dapat dilihat dari puas tidaknya pengguna setelah mendapat pelayanan dari pustakawan.

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.4.18.3/d	<p>S: Apakah bapak merasa bahwa setiap kegiatan kerja yang bapak lakukan mencerminkan profesionalisme?</p> <p>Bima : Nah itu dia. Profesionalisme itu kan gampangnya ngomong adalah tindakan yang sesuai aturan kan. Jadi ya saya berusaha untuk taat aturan lah. Biar dikata orang saya sombong gak apa-apa lah yang penting saya gak menyalahi aturan. Ada contoh gini mas: ada koleksi yang terpinjam satu atau dua hari, bahkan sampai berhari-hari itu ada, kita gak munafik itu ada. Tapi selaku petugas referens ya saya hanya bisa</p>	Salah satu ciri bersikap profesional adalah Taat aturan dan tidak sewenang-wenang memberikan keputusan, kecuali diberikan mandat untuk memutuskan

	menghimbau, tidak memaksa, karena saya memang tidak punya wewenang untuk memaksa. Lha kecuali ada hitam di atas putih dari pimpinan untuk segala sesuatunya, maka saya baru bisa berbuat itu. Tapi saya sebagai pegawai yang sambil kuliah, sambil apa kan... kadang saya pinjam buat saya sendiri, dan mungkin teman lain juga ada yang seperti itu.	
--	---	--

e. Tema : Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.1.34.3/e	<p>S: Pustakawan berusaha menghindarkan diri untuk memanfaatkan posisi untuk mengambil keuntungan pribadi. Apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Arjuna : Untuk kepentingan saya pribadi tidaklah. Belum...belum pernah lah. Tapi ya kalau memanfaatkan komputer, ngetik makalah ya saya pakai. tapi ya itu untuk kepentingan kantordlah. Kalau saya ngajar terus makalah dibuat disini kan juga untuk kepentingan lembaga to. Singkatnya gini lah, selama tidak mengganggu kelancaran kerja pokok di kantor, gak apa-apalah ya. Lha kalau mengganggu ya tidaklah.</p>	Bisa saja memanfaatkan fasilitas kantor selama tidak mengganggu kelancaran tugas pokok.

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.2.44.3/e	<p>S: Dalam kode etik dikatakan bahwa pustakawan tidak menyalahgunakan posisi atau memanfaatkan fasilitas untuk keuntungan pribadi. Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Srikandi : Kalau memang fasilitas itu dipakai tapi tidak mengganggu aktivitas sih ya gak apa-apa.. tapi kalau sangat mengganggu kepentingan pekerjaan pokok ya gak usah dipakai. Tapi memang ada, temen saya tu gitu. Dia kan kuliah, kantor juga dekat kampus. Itu lho yang UNDIP jalan Hayam Wuruk itu, kan dekat dengan Sriwijaya. Malam dia di sini. Lha kebetulan dia di rumah gak punya komputer... tapi ya lama-lama ketahuan juga, lha wong sebagian file-nya ada yang hilang. Lha kemudian kan jadi bahan pembicaraan teman. Kan gak enak kayak gitu kan. Ya menjaga diri sendiri lah. Lha kalau cuma minta kertas 5 atau 10 lembar ya gak apa-apalah. "Dari pada gak ada kerja aku tak nyelesaikan tugas kuliahku" gitu gak apa-apa, asal memang tidak mengganggu kelancaran pekerjaan.</p>	Memanfaatkan fasilitas diperkenankan selama tidak mengganggu aktivitas kerja pokok, dan melalui prosedur yang telah ditentukan, dengan catatan bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.3.44.3/e	<p>S: Pernah gak ibu memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan panjenengan sendiri?</p>	Pernah memanfaatkan fasilitas kantor

	<p>Sembadra : Ya dikit-dikit pernah lah. Misale bawa buku ke rumah. <i>Buku-bukune dinggo dhewe</i> (buku-bukunya dipakai sendiri), terus ngembalikannya lama, itu <i>kerep</i> (sering). Hehehehe...</p>	
Sidas.3.45.3/e	<p>S: Kalau saya kan lagi kuliah ni, kan saya bisa saja pakai printer, kertas, komputer atau yang lainnya, alasannya ya nanti kan untuk kepentingan lembaga juga. Hehehe</p> <p>Sembadra : Lho kalau gitu saya malah dulu ditawari, "Mbak sampeyan butuh apa, catat aja, nanti saya carikan". Lha saya kan seneng. Jadi buku yang baru diolah dan belum dilayankan itu sudah saya pinjam dulu. Kembali ya tetep kembali, tapi <i>yo rodo suwe</i> (agak lama), yang penting kan kembali. Hehehe</p>	<p>Memanfaatkan fasilitas kantor tetapi bertanggung jawab dan prosedural</p>
Sidas.3.46.3/e	<p>S: lha kalau ini bu...bagaimana kalau mobil kantor dipakai untuk kepentingan pribadi, misalnya?</p> <p>Sembadra : Lha kebetulan pustakawan di sini ndak punya mobil dinas. Jadi ndak masalah. Tapi kalau untuk pakai mobil rame-rame, mau ada kepentingan <i>jagong</i> misalnya, nah itu sering. Artinya bukan untuk pribadi kan... Lha kalau mau pinjam untuk kepentingan pribadi kan banyak mobil rental, sekarang paling 160 an ribu gitu. Lumayan murah kan? Selain itu juga memang ada aturan kalau mau pinjam mobil kantor harus dengan <i>drivernya</i>, pakai surat...malah <i>kakean</i> (kebanyakan) kerjaan.</p>	<p>Tidak pernah memanfaatkan fasilitas mobil kecuali untuk kepentingan bersama</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.4.34.3/e	<p>S: Ini kalau bapak melihat suatu kasus, ada pegawai yang memanfaatkan posisinya untuk memanfaatkan fasilitas kantor, misalnya atau pendek kata mengambil keuntungan dari posisinya. Kalau bapak bagaimana?</p> <p>Bima : Selama itu masih dalam tugas kantor, saya menggunakan fasilitas kantor. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi Lha misalnya saya ngajar, ini kan juga untuk kepentingan kantor. Walaupun saya materi bikin sendiri, saya anggap saya masih dalam koridor tugas kantor. Kalau untuk kepentingan pribadi sih saya berusaha untuk meminimalisir. Contohnya mobil kantor ya. Selama ini juga gak pernah jalan-jalan sendiri gitu. kalau ada kepentingan ya bareng-bareng sama teman-teman itu. Selama saya bisa mengatasi sendiri saya berusaha untuk tidak menggunakan fasilitas kantor ya.</p>	<p>Bima berusaha tidak memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.</p>

- f. Tema : Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.  
Informasi : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas. 1.23.3/f	<p>S: Begini pak, pustakawan itu dituntut untuk melayani pengguna dengan santun, tulus, sesuai dengan prosedur. Apa yang bapak lakukan?</p> <p>Arjuna : Kalau itu sih sudah dilakukan ya. Kita kan punya etika, jadi paling tidak kita melayani berdasarkan etika yang kita punya. Jadi kalau itu sih sudah dilaksanakanlah.</p>	Pelayanan terhadap pengguna berdasar etika individu pustakawan
Kdl Sidas.1.24.3/f	<p>S: kendalanya pak?</p> <p>Arjuna : Kendalanya.....ya mungkin malah penggunanya yang ndak santun. Hehehe... kalau tugasnya sih berusah santun ya. Tapi kadang ada pengguna yang ... apa ya...mungkin secara tidak sengaja membawa makanan di ruangan atau apa. Kan ada rambu-rambunya. Mungkin juga cara menegurnya yang salah ya. Karena merasa sudah diingatkan tapi masih <i>ngeyel</i> misalnya, jadi nada memperingatkannya tuh keras atau gimana gitu. Jadi menurut saya sih ya komunikasinya itu sebenarnya.</p>	Kendala untuk selalu bersikap santun, komunikasi dengan pemustaka tidak berjalan dengan baik.

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.2.2.3/f	<p>S: Bagaimana kiat panjenengan untuk bisa melayani pemustaka dengan santun dan tulus?</p> <p>Srikandi : Anu mas....sebenarnya kan kode etik ini kalau saya lihat sudah dilaksanakan semua. Cuma saya sendiri gak sadar bahwa saya sudah melaksanakan kode etik. Wong yang penting itu kan bekerja sebaik-baiknya, bergaul dengan teman juga yang baik, melayani pengguna dengan baik, ya itu aja. Ya to....asal gak menyakiti orang, merugikan orang, kita hidup nyaman dan aman ya sudah. Kan gitu to..?</p>	Bidang layanan yang terpenting adalah menghargai orang lain, tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain.

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.3.36.3/f	<p>S: Selanjutnya bu, putakawan melaksanakan pelayanan dengan sopan, tulus, dan santun. Apa yang ibu lakukan?</p>	Berusaha melaksanakan pelayanan di



	<p>Sembadra : Ya...melayani saja sesuai dengan prosedur, terus kita anggap pemustaka itu sahabat, jadi kan bisa lebih terbuka. Kalau ada orang pinjam atau ngembalikan atau ngopi buku, kan ada aturannya, ya ... kita taati, gitu aja. Tapi ada repotnya juga, misal buku itu sudah tersebar di luar sana, tapi kita belum punya, dan ada pengguna yang nyari. Walah <i>isin tenan iku</i> (sangat malu). Seperti kemarin itu. Jan pengalaman tenan itu. Yang difilmkan itu lho, siapa...karyanya anu...siapa...hirata-hirata gitu.</p> <p>S: Andrea Hirata...Lakar pelangi.</p> <p>Sembadra: Ya itu. Masa di luar sana sudah heboh di sini belum punya bukunya.</p>	<p>perpustakaan dengan baik</p>
--	---	---------------------------------

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Sidas.4.10.3/f	<p>S: Untuk yang ini pak, panjenengan kan sibuk, kalau tiba-tiba ada yang meminta bantuan, apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Bima : Selama ini kebetulan saya ditugaskan di layanan mas. Mungkin sebelum dibuka layanan AV ini saya di layanan selama dua tahun. Kebetulan juga di sini memang tidak seramai yang disirkulasi. Kita sebagai orang Jawa khususnya, ya ada <i>unggah-ungguhnya</i>. Pengguna kan senang kalau kita sopan, menghargai mereka. Gitu kan. Ya itu yang berusaha saya lakukan, dan saya berusaha untuk selalu memberikan layanan yang sebaik mungkin.</p>	<p>Melayani pengguna dengan santun, berusaha memberikan layanan yang sebaik-baiknya.</p>

Hubungan dengan pengguna

- a. Tema : Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.1.42.4/1	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan dalam rangka menjunjung tinggi hak pemustaka atas informasi?</p> <p>Arjuna : Informasi di perpustakaan itu kan pada prinsipnya bebas akses ya. Jadi sesuai dengan prinsip itu, bagi saya siapapun itu berhak atas informasi yang ada di perpustakaan, terlepas untuk apa informasi itu akan dipergunakan.</p>	<p>Pada prinsipnya informasi di perpustakaan adalah bebas akses, sehingga setiap pengunjung berhak mendapatkan informasi apa saja yang ada di perpustakaan.</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.2.35.4/1	<p>S: Soal menjunjung tinggi hak pengguna terhadap informasi, usaha apa yang pernah panjenengan lakukan?</p> <p>Srikandi : Orang kan punya hak azasi ya mas... kalau di perpustakaan haknya mendapatkan informasi. Kalau ada yang tanya yo tak jawab, kalau ada yang baru yo diinformasikan. Contohnya kan kalau ada buku baru kita pasang di rak <i>display</i>. Terus, kita yo anu kok mas...kita gak peduli orang mau cari informasi yang gimana gitu, yang kita batasi kan jumlah buku yang dipinjam.</p> <p>Bebaskan...hehehe. Maksudnya, pengguna itu bebas cari informasi, kita gak usah membatasi, tur memang kita juga kan gak bisa ngasih batasan "<i>eh.mbak sampeyan gak usah cari itu ya.hehehe</i>", kan gak gitu to. Jadi ya bebas ajalah. Tugas kita kan melayani, menjawab kalau ada yang bertanya.</p>	<p>Hubungan dengan pengguna: tidak membatasi akses terhadap informasi, memberikan informasi secukupnya.</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.3.23.4/1	<p>S: Kemudian ini bu, pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi dan menjunjung tinggi hak pengguna terhadap informasi, usaha apa yang pernah panjenengan lakukan?</p> <p>Sembadra : Informasi apa? Lha kalau perpustakaan, menurut saya ndak ada rahasia. Berbeda kalau dengan arsip kali ya. Kalau arsip kan ada dokumen-dokumen resmi yang hanya boleh diakses oleh orang tertentu, ndak semua orang bisa tahu. Tapi kalau perpus kan semua bisa akses, atau mungkin saya pribadi yang ndak tahu di mana rahasianya ya, hehehe... Tapi menurut saya kok ndak ada yang rahasia di perpustakaan, semua bisa dilayankan kok. Apalagi sekarang sudah ada komputer. Pada prinsipnya kalau sudah dilayankan itu kan menjadi hak akses masyarakat to</p>	<p>Prinsip perpustakaan adalah melayani informasi. Hak akses pengguna atas informasi di perpustakaan tidak dibatasi, dan tidak ada rahasia pada informasi yang dilayankan di perpustakaan.</p>
Kegun.3.28.4/1	<p>S: Gini bu, misalnya ada orang yang datang itu orang asing, boleh dibilang gaya teroris gitu. Apa tetap diijinkan masuk?</p> <p>Sembadra : Lho informasi itu kan untuk siapa aja. Apalagi perpustakaan daerah. Kita ini kan perpustakaan umum to... <i>yo sopo wae</i> (siapa saja) boleh masuk. Tapi kan tentunya pakai aturan, prosedur, gitu. Lha <i>yen</i> (kalau)</p>	<p>Pustakawan memberikan pelayanan kepada pemustaka tanpa kecuali.</p>

	di tempate panjenengan kan ndak gitu, penggunaanya jelas mahasiswa. Tapi pastinya sebelum masuk, kalau dia orang asing alias belum pernah ke sini, mestinya tanya-tanya dulu, kecuali kalau ada gaetnya.	
--	--	--

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.4.11.4/1	<p>S: Apa yang bapak lakukan dalam rangka menjunjung tinggi hak pemustaka atas informasi?</p> <p>Bima : Ya....membantu pengguna yang kesulitan mencari informasi. Kan ada itu pengguna yang bingung cara menelusur, nah yang begitu kita bantu. Tapi selama ini, seperti yang pernah saya bilang, saya akan bekerja semaksimal mungkin sebagai pelayan masyarakat</p>	Membantu pemustaka yang kesulitan mengakses informasi

b. Tema : Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.I.14.4/2	<p>S: Kalau misalnya ada informasi yang disalahgunakan, bagaimana pak?</p> <p>Arjuna : Ya itu diluar tanggung jawab perusahaan... hehehe... Lha itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kita hanya menyajikan. Wong informasi yang diperoleh aja kita gak tahu.</p>	Pemanfaatan informasi yang diperoleh pemustaka di luar tanggung jawab pustakawan.
Kegun.I.15.4/2	<p>S: nah untuk yang ini, pustakawan menjaga kerahasiaan menyangkut bahan pustaka yang dicari atau dipinjam. Apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Arjuna : Kalau ini boleh saja diketahui. Kita sendiri di OPACnya juga tunjukkan buku ini dipinjam siapa, gitu. Mau diselidiki ini rumahnya mana, pinjamannya berapa, terserah. hehehe. Soalnya untuk pemakai kan ini perlu. Sampai kapan koleksi ini dipinjam. Kan untuk antisipasi koleksi itu agar pada waktunya bisa ganti orang lain yang meminjam.</p>	Pemustaka diperkenankan mengetahui bahan pustaka yang dipinjam oleh pemustaka lain

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.2.36.4/2	<p>S: Kalau informasi itu dimanfaatkan untuk hal yang menyimpang, bagaimana? misalnya pengguna mendapat informasi cara membuat bom, kebetulan dia itu teroris. Kita kan gak tahu siapa dia kan?</p> <p>Srikandi : Ooo itu, yang penting kan bukan kita yang ngasih informasinya. Kalau dia yang mendapatkan sendiri informasi itu kan seperti tak bilang tadi kita gak membatasi akses pengguna nyari informasi. Ya itu di luar tanggung jawab kita.</p>	Pustakawan tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang didapatkan oleh pemustaka terkait dengan informasi yang diaksesnya.

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.3.27.4/2	<p>S: Kalau misalnya informasi yang didapat itu untuk digunakan untuk kriminal gimana bu? Misalnya dia jadi hacker gitu. Kan pernah kejadian tu data KPU di iseng orang.</p> <p>Sembadra : Ya itu mah diluar tanggung jawab kita dong. Masa tiap pengguna mau ditanya "kamu tadi dapat informasi apa?" lha kalau penggunanya cuma satu atau dua orang, bisa aja. Padahal di Perpustakaan ini penggunanya kan ratusan, <i>walah kok kurang emen gawean</i> (kok seperti orang yang kurang kerjaan). Hehehe gitu to?</p>	Pustakawan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang diperoleh pemustaka.

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.4.33.4/1	<p>S: Apa yang bapak lakukan ketika pengguna mendapatkan informasi ....ya barangkali dianggap tabu, atau membahayakan stabilitas nasional atau gimana yang ketika orang baca akan berpengaruh negatif terhadap pembacanya.</p> <p>Bima: Selama ini mungkin gini mas...mungkin lebih pas kalau diarahkan ke seleksi ya. Jadi ketika seleksi kita sudah memilih buku baik yang dari katalog penerbit maupun browsing internet atau dari sumber yang lainnya. Kalau kira-kira ada buku yang melanggar norma-norma, kita berusaha menghindar untuk tidak kita beli.</p>	Sensor biasanya lebih pada saat pengadaan. Yaitu menyeleksi koleksi yang pantas layan

c. Tema : Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.1.13.4/3	<p>S: Ini pak, misalnya ada pengguna yang ingin tahu informasi apa yang diperoleh pengguna lain, bagaimana. Apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Arjuna : Belum ada yang gitu tu pak. Tapi umpama ada ya tergantung informasi yang kita tahu itu apa. Kalau informasinya bahaya ya tentu tidak diberitahu. Tapi kalau informasi sifatnya umum, ya saya kira gak apa-apa.</p>	Pustakawan tidak memberitahukan informasi yang telah diperoleh pustakawan

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.2.37.4/3	<p>S: Begini bu, apa pernah pengguna memberi tahu informasi apa yang dia dapatkan, dan ibu merahasiakan?</p> <p>Srikandi : Pas saya di pelayanan dulu ya kadang-kadang, terutama yang sudah pada kenal. Ya <i>akeh-akehe karo guyon</i> (kebanyakan disampaikan dengan bercanda) "<i>Aku mau golek tentang KB kok malah entuk reproduksi to</i> (saya tadi mencari informasi tentang KB kok yang saya dapat malah tentang reproduksi). Hehehe.. ya gitulah kadang-kadang yo lucu yen dipikir. Tapi ya yang gitu-gitu itu biasanya mereka. Bener enggakya yo gak tahu. tapi pada prinsipnya yen rahasia yo kita gak sebar. Ning opo enek sing rahasia to...sejauh saya tahu yo di perpus gak ada yang rahasia.</p>	Pada prinsipnya kerahasiaan tetap dijaga, tetapi perpustakaan tidak merahasiakan informasi yang dikelolanya.

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.3.24.4/3	<p>S: misalnya begini, ada si A mencari buku di rak tapi tidak ada. Terus, dia tanya ke pustakawan siapa meminjamnya. Nah, itu bagaimana?</p> <p>Sembadra : Ndak apa-apa, kita kasih tahu saja siapa yang pinjam dan kapan tanggal kembalinya. Lha ini kan baik. Si A tadi bisa antisipasi atau menyusun strategi untuk bisa meminjam buku yang dimaksud.</p>	Memberikan informasi yang sifatnya membantu pengguna
Kdl Kegun.3.25.4/3	<p>S: untuk menjaga rahasia ini kendalanya apa bu?</p> <p>Sembadra : Nek menurut saya kok ndak ada kendala. Lha wong ndak ada yang perlu dirahasiakan. Selama bisa kasih informasi ya kita beritahu.</p>	Kendala: Informasi diperpustakaan tidak ada yang perlu dirahasiakan.

	Untuk cari informasi atau koleksi kan kalau dulu kan masih pakai kartu, sekarang kan tinggal lihat dikomputer kan sudah bisa dan lebih gampang	
Kegun.3.26.4/3	<p>S: Kalau misalkan itu dilakukan, berarti kan melanggar kode etik dong, iya kan?</p> <p>Sembadra : Sebenarnya kan ini ndak prinsip amat lho. Kalau cuma tahu siapa peminjamnya kan ndak mengganggu to. Yang perlu dirahasiakan kalau menurut saya ya isi informasinya. Itupun kalau pengguna ngasih tahu ke kita. Tapi kan jarang ya yang begitu itu.</p>	Informasi yang dilindungi adalah substansi informasi yang telah diperoleh

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.4.22.4/3	<p>S: Maksudnya, mungkinkah ada di Perpusta ini, misalnya, ada informasi yang memang harus dirahasiakan oleh pustakawan?</p> <p>Bima : Selama saya menjadi pustakawan, apalagi di Perpusta ini, saya belum pernah menemukan sesuatu yang rahasia, gitu. Lha gak tahu kalau di luar pustakawan ya, rasanya belum ada yang rahasia, dalam arti "informasi ini jangan sampai keluar lho" ini belum pernah ada. Jadi selama informasi ini yang saya tahu bukan dirahasiakan, emmmm.... Ya saya akan memberikannya kepada mereka yang butuh. Kalau memang di Perpusta ini ada yang rahasia, saya secara pribadi saya belum pernah tahu. Tapi sebentar, yang dimaksud informasi rahasia itu maksudnya apa?</p>	Pada prinsipnya tidak ada Informasi Rahasia di perpustakaan, sebagaimana bidang kearsipan.
Kegun.4.23.4/3	<p>S: Kalau begini pak, ada si A yang sudah mencari informasi di perpus. Lalu ada si B yang bertanya tentang informasi yang diperoleh si A. gimana tu pak?</p> <p>Inf. 4 : Kalau saya, informasi di sini masih multi tafsir. Tetapi kalau konteksnya perpustakaan, tidak ada yang rahasia sih saya pikir. Kan prinsipnya perpustakaan itu menyajikan informasi yang dikelola, kan gitu. Lha tetapi kalau pustakawan itu ditanya tentang informasi apa yang diperoleh orang, ya...jarang orang yang bilang, "ini lho pak informasi yang saya dapat". Umpama ada yang bilang, ya teman-teman kita aja. Selama ini belum ada sih yang tanya ke saya seperti itu. Tapi umpama ada yang tanya, ya tentunya saya gak lah...gak ngasih tahu, wong itu sudah jadi privasi orang itu kan.</p>	Informasi di perpus bebas diakses, tetapi jika sudah diakses seseorang, informasi itu menjadi privasi bagi orang yang memperolehnya.
	<p>S: Kalau begitu panjenengan mengartikan rahasia itu</p>	

Kegun.4.24.4/3	<p>seperti apa?</p> <p>Bima : Ya begitu itu. Informasi bebas diakses orang, tetapi sudah rahasia kalau informasi yang ada di perpustakaan itu sudah diperoleh oleh pengguna.</p>	
----------------	--	--

- d. Tema : Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.  
Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.1.25.4/4	<p>S: Selanjutnya pak, Kode etik menghendaki agar pustakawan itu mengakui dan menghargai hak milik intelektual Apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Arjuna: Menghormati dan menghargai ya...kalau saya ya melayani tadi itu kan sudah menghormati dan menghargai to. Kalau gak menghargai ya gak usah diproses dan dilayanan. Saya kan di bagian pengolahan, jadi buku ya diolah sebagaimana mestinya sehingga bisa dilayanan, juga membatasi akses terhadap koleksi, gitu. Pernah sih dulu kita tidak melayani suatu jenis buku. Itu waktu jamannya pak Harto itu. kan buku merahnya Soekarno, apa itu...di bawah bendera revolusi atau apa gitu, itu ndak boleh beredar. Nah fungsi kode etik ini kan ya untuk memfilter itu tadi kan. Jadi sekiranya informasi itu ndak layak ya tidak kita layankan.</p>	<p>Bentuk mengakui dan menghargai hak milik intelektual adalah dengan mengelola suatu karya dengan baik sehingga siap akses.</p>
Kdl Kegun.1.26.4/4	<p>S: Apa panjenengan melihat ada kendala dalam menghormati dan menghargai hak milik intelektual ini?</p> <p>Arjuna : Mmm... sejauh ini gak ada kendala tu...apa ya? O ya pada saat pengadaan kan ada seleksi, jadi di sana sudah ada sensor barangkali ya. Jadi buku yang datang di pengolahan ini ya <i>fine-fine</i> saja. ya karena tidak ada buku yang harus di sensor. Sekarang ini kan buku dari penerbit. Malah sangat mungkin sekali buku ini sudah diberi sensor oleh penerbit sebelum diterbitkan. Atau mungkin perpunas juga melakukan sensor terhadap buku yang sebelumnya sudah mengajukan KDT. Kita yang di daerah ini kan malah tinggal pakai. Misal ada penerbit yang memberikan buku-buku ke kita, ya kita lihat dulu ISBN nya ada atau tidak. Jadi kalau tidak ada ISBN nya ya berarti kan tidak melalui sensor alias belum dimintakan KDT ke Perpunas kan. Nah buku-buku semacam itu tidak kita beli atau tidak kita terima.</p>	<p>Tidak ada kendala dalam menghormati dan menghargai hak intelektual</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.2.38.4/4	<p>S: Apa ada pengguna yang menggandakan buku, tesis, skripsi atau disertasi?</p> <p>Srikandi : Tergantung mas....maksudnya tergantung keperluan. Kalau foto kopi buku, artikel, boleh, tapi gak berupa buku kaya aslinya. Paling kan lembaran-lembaran gitu. Ya kita anu mas.... Kita kan juga harus mempertimbangkan hak cipta. Jadi yo...paling fotocopy gitu itu. Lha soal nanti dia mau plagiat itu ya allahu a'lam. Skripsi, tesis di sini juga gak banyak, malah belum diolah ya'e. .</p>	<p>Pustakawan mengakui hasil karya orang lain dengan tidak memberikan foto copy yang sama seperti bentuk aslinya.</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
kegun.3.9.4/4	<p>S: Perpustakaan memiliki dileman, satu sisi harus menjaga informasi ini dengan baik, tapi sisi lain perpustakaan memang harus menyebarkan informasi. Ini kan terkait dengan hak intelektual. Nah apa yang ibu lakukan untuk menjaga hak intelektual ini?</p> <p>Sembadra : Nah itu urusannya dengan hak cipta kali ya. Tapi kalau menggandakan untuk pribadi, pendidikan itu kan ndak apa-apa. Pokoke kan tidak untuk bisnis. Nah kalau untuk bisnis kan sudah lain urusannya to.</p>	<p>Menggandakan untuk kepentingan pendidikan tetap diperkenankan.</p>
Kdl Kegun.3.10.4/4	<p>S: Tapi diaturan ini kan tidak boleh ya?</p> <p>Sembadra : Betul...diaturan itu kan ndak boleh. Sekarang kan tergantung kebijakan. Kebijakannya kan orang boleh copy tapi identitasnya harus lengkap, seperti dimintai fotocopy KTP, isi formulir, dan sebagainya.</p>	<p>Kendala: Kebijakan dapat mentolelir aturan yang sudah ditetapkan</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kegun.4.31.4/4	<p>S: Kode etik menghendaki agar pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual. Nah, apa yang bapak lakukan untuk hal ini?</p> <p>Bima : Selama ini yang saya tahu. Saya kan di referens ya. Koleksi referens ini kan tidak bisa dibawa pulang. Sesuai arahan dari pimpinan juga, koleksi referens hanya untuk pengguna yang datang dan untuk copy ya di persilahkan. Untuk fotocopy data ini kan tidak satu buku gitu. Lha kan gak mungkin to kalau satu atau dua</p>	<p>Kebebasan atas informasi terkait dengan Hak cipta</p>



	<p>lembar itu kemudian di jual.</p> <p>Lha kita ini punya suatu kebijakan, dalam arti misal ada orang mau fotocopy satu buku gitu, ya kita tidak iijinkan.</p> <p>Kemudian sekarang ini kalau untuk fotocopy di kita sudah ada prosedurnya, harus sudah ada ijin dari kepala, ada hitam di atas putih untuk tidak memanfaatkan koleksi yang di copy itu untuk komersil, hanya untuk kepentingan pribadi.</p> <p>Jadi kita punya data pernyataan dari pengguna, kalau sekarang disebut pemustaka itu.</p>	
--	--	--

Hubungan antar pustakawan

a. Tema : Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Informan : Arjuna

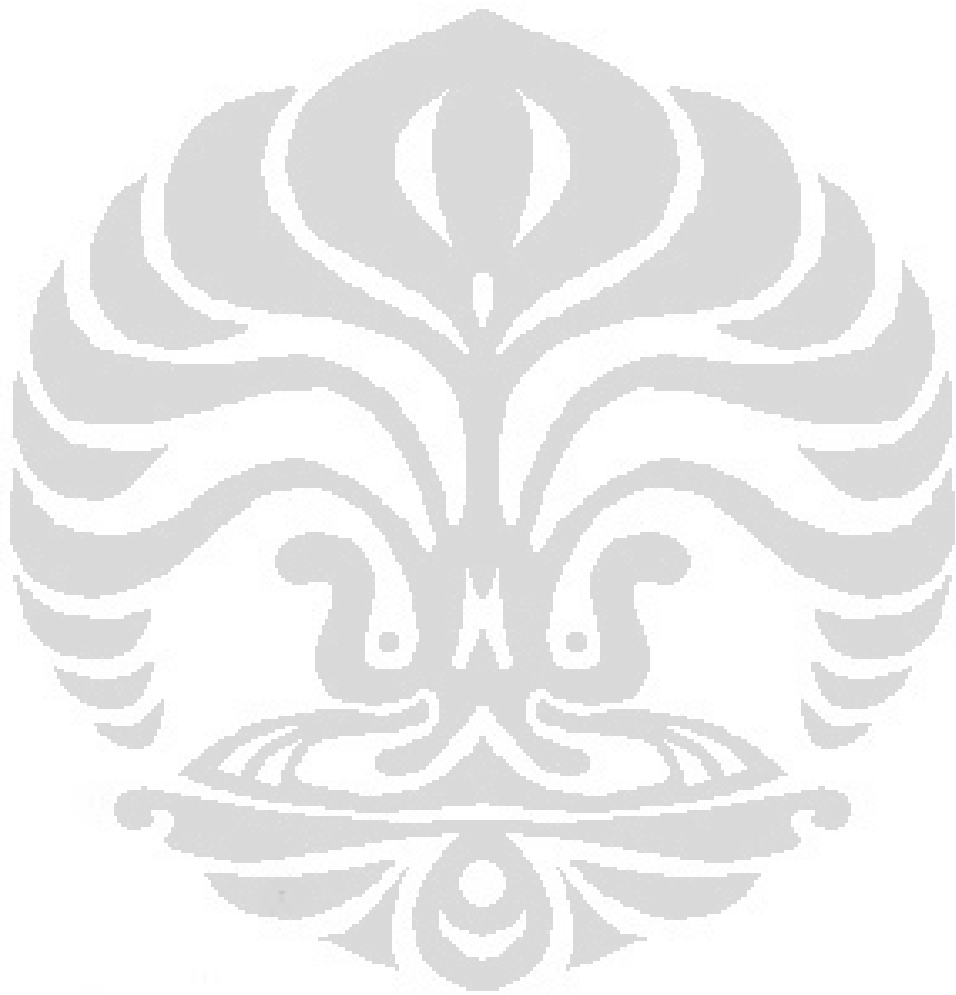
Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.1.5.5/1	<p>S: Apa yang bpk/ibu lakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang, dan apa ada stimulus dari pimpinan untuk hal itu?</p> <p>Arjuna : Kalau stimulus untuk itu ada. Biasanya pimpinan menyodorkan pemberitahuan atau pengumuman kalau ada diklat atau seminar atau sejenisnya kepada kita melalui kepala bagian masing-masing. Seperti misalnya di sini kepada pak Jatmo, kemudian pak Adib yang nanti diteruskan ke pustakawan. Kalau ada mau ya dipertimbangkan siapa yang paling sesuai dengan kompetensinya. Itu kalau kegiatannya memang untuk pustakawan. Tapi kalau yang sifatnya administrasi ya ndak mungkin untuk kita to pak. Misalnya kalau ada penelitian di bidang kepustakawan gitu, pasti ditawarkan.</p>	<p>Untuk mengembangkan kemampuan pustakawan yaitu dengan seminar, diklat, dan sejenisnya</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.2.45.5/1	<p>S: Apa yang bpk/ibu lakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang, dan apa ada stimulus dari pimpinan untuk hal itu?</p> <p>Srikandi : Ya ikut-ikut seminar, kadang kalau ada bedah buku ya saya ikut, gitu. Kalau pimpinan sih oke-oke aja sih kelihatannya. Malah kadang ada penunjukan dari pimpinan buat yang berangkat.</p>	<p>Meningkatkan kompetensi dengan ikut seminar, bedah buku, dan lain-lain</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.3.49.5/1	<p>S: Apa yang bpk/ibu lakukan dalam rangka</p>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi: serius</p>



	<p>mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang, dan apa ada stimulus dari pimpinan untuk hal itu?</p> <p>Sembadra : Lho nek itu ya paling ikut seminar, diklat atau malah baca-baca sendiri kan lebih manfaat. Enak lho kalau sering ikut seminar tu. Ikut tapi yo kudu <i>tenanan</i> (serius) gitu. Lumayan kan bisa jadi obat jenuh kerja tapi juga dapat ilmu.</p>	<p>dalam mengikuti berbagai seminar, atau belajar sendiri, atau diklat, dan lain-lain.</p>
--	---	--

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.4.13.5/1	<p>S: Apa yang bpk/ibu lakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang, dan apa ada stimulus dari pimpinan untuk hal itu?</p> <p>Sembadra : Diantaranya ya dengan mengikuti pelatihan bidang tenaga teknis perpustakaan, seminar, diklat, dan lain-lain. Lha saya kan lulusan S1 perpustakaan. Di sini pustakawan ini rata-rata <i>empasing</i> kok. Yang punya Ijazah S1 perpustakaan itu paling cuma 5 (lima) orang waktu itu. Nah yang terakhir itu ada mbak Nugrahaeni, kelihatannya sudah selesai, cuma wisuda atau belumnya saya belum tahu. Lha saya juga matur sama pimpinan, kalau memang nanti saya ikut pelatihan dan hasilnya tidak memuaskan, mungkin pimpinan akan mempertimbangkan lagi untuk kesempatan berikutnya. Kan gitu konsekuensi logisnya. Nah sampai sekarang saya tetap berusaha di koridor perpustakaan.</p>	<p>Mengembangkan kompetensi profesional, melalui pelatihan, bidang tenaga teknis perpustakaan, seminar, diklat, dan lain-lain.</p>

- b. Tema : Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.4.43.5/2	<p>S: Apa yang panjenengan lakukan dalam menjalin kerjasama dengan pustakawan lain di luar instansi?</p> <p>Arjuna : Kebetulan teman saya kufiah dulu masih ada yang bisa dihubungi. Termasuk adik tingkat panjenengan di UI yang dari UNIBRAW, mbak Endang. Itu kan sampai sekarang masih saling kontak. Maksudnya untuk pertemanan itu salah satu contohnya, kita saling tukar pengalaman.</p>	<p>Menjalin komunikasi dengan teman, salah satu cara dalam menjalin kerjasama dengan pustakawan lain</p>

Informan Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.4.43.5/2	<p>S: Apa yang panjenengan lakukan dalam menjalin kerjasama dengan pustakawan lain di luar instansi?</p> <p>Srikandi : Dalam hal ini saya kan bagian penerbitan majalah. Jadi kerja sama dengan pustakawan lain yang paling nampak ya dalam hal tulisan artikel. Biasanya saya yang aktif minta pada teman-teman yang sudah saya kenal, atau pasif menunggu tulisan yang masuk, lalu saya melakukan <i>follow up</i>-nya.</p>	Kerjasama dengan pustakawan lain dalam hal tulisan artikel.

Informan Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.3.53.5/2	<p>S: Apa yang panjenengan lakukan dalam menjalin kerjasama dengan pustakawan lain di luar instansi?</p> <p>Arjuna : Yen menurut saya ya komunikasi. Jadi teman-teman kita yang dulu pernah kita kenal itu kita ajak komunikasi. Apalagi sekarang ada face book. Lha kan nambah gampang buat pertemanan. Ya tentunya harus isi dong, ndak sekedar chating thok. Maksudnya ada sharing tentang perkembangan perpustakaan.</p>	Kerjasama dengan pustakawan lain komunikasi, <i>sharing</i> tentang perkembangan perpustakaan.

Informan Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.4.37.5/2	<p>S: Apa yang panjenengan lakukan dalam menjalin kerjasama dengan pustakawan lain di luar instansi?</p> <p>Bima : Kita kan punya debin ya mas...lha itu sebenarnya juga ajang kerjasama dengan pustakawan lain di daerah. Belum lagi teman-teman pustakawan itu suka ada kegiatan-kegiatan yang mengundang kita.</p>	Kerja sama. Mengadakan kegiatan kepustakawanan secara bersama-sama

c. Tema : Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.1.27.5/3	<p>S: Selanjutnya pak, pustakwan membina hubungan baik dan bekerjasama dengan rekan. Apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Arjuna : Kalau yang ini jelas, kita mesti sudah lakukan. Untuk nyaman bekerja kan perlu saling <i>ajeni</i> (menghormati). Jadi ya otomatislah itu kita lakukan.</p>	Untuk melaksanakan tugas, perlu adanya sikap saling menghargai dan membantu sesama rekan agar suasana kerja menjadi nyaman dan kondusif.

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.2.42.5/3	<p>S: Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan. Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Srikandi : Ya itu tadi mas....saya berusaha sebaik mungkin jangan sampai nyalahi orang lain, komunikasi yang baik dengan teman, itu aja lah. <i>Suwe-suwe</i> kan yang lain mengikuti. Kalau memperlakukan teman dengan baik sih sudah dilakukan lah. Lha wong tanpa kode etik aja kita punya etika. Apa lagi kita orang jawa ini kan ada <i>unggah-ungguh</i>, istilahnya. Intinya ya untuk hal itu kita sudah melakukan.</p>	<p>Memupuk hubungan baik dengan teman: melakukan komunikasi dengan baik dan berusaha untuk tidak menimbulkan kesan negatif kepada kita.</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.3.42.5/3	<p>S: Selanjutnya bu, pustakawan selalu menjaga sikap saling menghormati sesama rekan kerja, apa yang ibu lakukan?</p> <p>Sembadra : Lha kalau itu sih tiap hari sudah dilakukan. Selama kita punya agama saya kira itu otomatis ya.</p>	<p>Menghormati sesama rekan kerja sudah biasa dilakukan sejalan dengan ajaran agama.</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.4.38.5/3	<p>S: Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan. Apa yang bapak lakukan?</p> <p>Bima: Ya apa ya...ini kan sudah kita lakukan setiap hari. Saling menghormati, saling menghargai, toleransi ini kan standar ya yang memang harus dimiliki. Selain itu kan kita punya agama, yang kita semua tahu kalau ajarannya itu humanis ya, yang gak boleh menyakiti, harus tolong menolong dan sebagainya. Bener gak?</p>	<p>Menjalin kerjasama dengan rekan sesama satu instansi adalah dengan saling menghormati, menghargai, bergaul berdasar etika agama.</p>

- d. Tema : Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.1.44.5/4	<p>S: Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar. Apa yang bapak lakukan?</p> <p>Arjuna : Waduh...gimana ya. saya kira itu arahnya ke pustakawan secara kelompok ya. Berarti kan kesadaran pustakawan untuk menjaga kewibawaan atau kehormatan kelompok pustakawan. Nah untuk itu ya</p>	<p>Berlaku secara wajar dalam rangka menjaga kewibawaan diri atas nama pustakawan</p>

	saya berlaku sebaik-baiknya lah, tidak melanggar komitmen yang disepakati bersama.	
--	--	--

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.2.41.5/4	<p>S: Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan. Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Srikandi : Ya kita jadi pustakawan ini kan sadar sesadar-sadarnya. Hehehe... kalau sudah gitu ya sudah jadi konsekuensi saya untuk baik sebagai pustakawan. <i>Yen gak ngono yo gak munggah-munggah pangkat kan repot</i> (kalau tidak begitu ya tidak naik pangkat. Hehehe... Tapi gak gitu mas...ya kita loyal lah ya dengan kepustakawanan kita. Ya paling gak kita <i>gak neko-neko</i> (tidak macam-macam) sehingga bikin nama baik kita rusah, apalagi kalau sudah nyangkut instansi. Soal itu mas korps pustakawan ki opo ya maskudnya...mungkin gini, korps pustakawan itu ya persatuan pustakawan ini, kaya IPI gitu. Kalau kita jaga nama baik kita ya otomatis lah nama baik korps itu pun terjaga.</p>	<p>Tindakan terhadap korps: Secara sadar menjadi pustakawan, menjaga nama baik diri sebagai langkah awal menjaga nama baik organisasi pustakawan.</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.3.54.5/4	<p>S: Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan. Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Sembadra : Kalau itu ya kembali ke individunya. Kalau individu itu baik ya tentunya korps nya juga akan ikut baik. Korps itu kan kesatuan to, artinya terdiri dari individu-individu. Lha kalau korps pustakawan kan berarti kumpulan dari berbagai individu pustakawan.</p>	<p>Penghargaan terhadap korps bisa dilakukan dengan menjaga nama baik diri sendiri</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.3.54.5/4	<p>S: Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan. Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Bima : Ya gimana ya... korps pustakawan, kok baru dengar ya. Kalau korps pegawai negeri saya tahu. Tapi mungkin gini, korps pustakawan itu kumpulan pustakawan secara umum. Ya intinya semua pustakawan itu korps.</p>	<p>Penghargaan terhadap korps bisa dilakukan menghargai diri sendiri, sesama pustakawan dalam instansi, seterusnya pustakawan secara umum.</p>

	Jadi kalau untuk penghargaan saya kira harus menghargai diri sendiri dulu ya, baru sesama pustakawan dalam instansi, seterusnya pustakawan secara umum.	
--	---	--

e. Tema : Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.1.19.5/5	<p>S: Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Apa yang panjenengan lakukan ?</p> <p>Arjuna : Lihat kepentingannya dulu pak. Kalau memang informasi itu dibutuhkan, misalnya untuk penyelidikan suatu kasus, bisa saja kita ungkapkan. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu buat bahan omong aja ya buat apa dibicarakan, kan gitu. Wah...kalau menurut saya yang ngomongi teman sendiri itu sama saja bunuh diri. Gimana tidak coba, jeleknya dia itu kan jeleknya instansi juga. Artinya kita juga ikut jelek kan.</p>	<p>Untuk menjaga citra sesama rekan, perlu dihindari membicarakan keburukan orang lain baik di dalam maupun di luar instansi.</p>
Kdl Kerek.1.20.5/5	<p>S: kendalanya pak?</p> <p>Arjuna: Kalau kendalanya ya karena SDM kita ini berbeda-beda ya. Kami itu hanya berapa persen yang dari ilmu perpustakaan. Jadi banyak yang <i>impasing</i> gitu. Jadi untuk tujuan layanan prima itu kadang tidak sinkron. Ya mungkin karena ilmunya yang tidak sampai ya. Padahal ilmunya, konsumen adalah raja. Perpustakaan kan gitu. Perpustakaan kan layanan publik. Kalau publik meninggalkan kita kan perpustakaan <i>bubar</i> tu.</p>	<p>Kendala: Tidak meratanya jenjang pendidikan, sehingga pemahaman, sikap itu cenderung semauanya, tidak berdasar sikap yang professional.</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.2.39.5/5	<p>S: Apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan martabat pustakawan?</p> <p>Srikandi: Kalau menurut saya ya melayani saja dengan baik lah. Soalnya pintu pertama interaksi kan di layanan, jadi harus supel, sehingga pengguna itu berkesan bahwa perpustakaan ini baik. Berkata sopan, santun terhadap pengguna, juga sesama kita, sehingga orang lainpun merasa betah, tidak merasa tersinggung. Dengan gitu kan bergaul dengan kita pun jadi nyaman.</p>	<p>Menjaga martabat pustakawan, yaitu dengan melayani sebaik-baiknya, menghargai teman, sehingga pengguna maupun teman pustakawan lain merasa nyaman jika bergaul dengan kita.</p>
Kdl. Kerek.2.39.5/5	<p>S: lalu apa kendalanya untuk menciptakan martabat itu?</p>	<p>Kendala: faktor kepribadian</p>

	<p>Srikandi: Kalau citra itu kaitannya dengan watak kali ya...kepribadian manusianya. Kita gak tahu sih ya ukurannya, tapi justru terlihat dari masukan-masukan dari pengguna. Nah...akhirnya kan perpustakaan melakukan <i>rolling</i> untuk tidak memasang si A yang dianggap tidak menjaga citra. Lha gimana coba, pengunjung di sini kan beda-beda ya. Ketika minta bantuan mencari informasi, masa diteriaki "dasar gak berpendidikan, gitu aja gak tahu" hehehe ... kan orang jadi tersinggung. Dia kurang bisa <i>nyrateni</i> (memahami) pengguna. Mbok ya kalau gak tahu tu ngomong yang sopan, lembut, jadi pengguna juga merasa <i>diwongke</i> (dihargai).</p>	<p>manusianya yang tidak humanis, tidak mudah menghargai orang lain.  Tidak bisa langsung mengingatkan dengan pertimbangan hubungan baik. Tetapi jika masukan datang dari pengguna, akan lebih bisa diterima.</p>
--	--	---

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.3.34.5/5	<p>S: lha sekarang banyak yang kebalik tu, rumah tangga kalau di dalam baik-baik aja, tapi kalau di luar.....nah...hehehe</p> <p>Sembadara : Wo itu wis ndak normal...hehehe Tapi emang fakta lho mas itu. Jadi kalau kita di luar yo sebisanya ndak ngomong yang jelek-jelek soal instansi kitalah, gitu aja. Ya itulah manusia mas....</p>	<p>Pustakawan tidak membicarakan keburukan instansi terutama dengan masyarakat di luar instansi</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kerek.4.29.5/5	<p>S: Selanjutnya pak. Pustakawan berusaha menciptakan citra atau nama baik atau martabat rekan-rekan . Apa yang bapak lakukan?</p> <p>Bima: Oo itu pasti kita lakukan. Tanpa peduli ada kode etik atau tidak, rasanya selama kita punya nurani pasti kita saling menjaga ya. Wah...gak enak kan kalau nama kita dijelek-jelekan orang. Mungkin salah satu cara meningkatkan citra dalam arti oh di mata orang lain. Ini yang saya lakukan ya, misalnya saya kemarin di tugaskan di SMP X misalnya. Saya berusaha membawa diri saya sendiri yang sekaligus menanamkan bahwa saya ini membawa juga nama lembaga atau instansi tempat saya bekerja. Apa lagi kalau kami sudah ke debin. Ini lebih harus hati-hati lagi, karena yang dihadapi lebih kompleks lagi.</p>	<p>Untuk menjaga martabat, baik ada kode etik atau tidak, sudah dilaksanakan berdasar nurani pribadi masing-masing.</p>



Hubungan dengan perpustakaan

a. Tema : Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.1.45.6/1	<p>S: Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan. Apa panjenengan selalu aktif di dalamnya?</p> <p>Arjuna : Tidak semua kebijakan kita dilibatkan. Tapi untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas, biasanya diajak <i>rembugan</i>.</p>	Pustakawan dilibatkan pada pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan bidang kerjanya.

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.2.48.6/1	<p>S: Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan. Apa panjenengan selalu aktif di dalamnya?</p> <p>Srikandi : Biasanya untuk pembahasan program saya dilibatkan. misalnya akan ada pameran buku, akan ada pendidikan pemakai, saya diajak bicara. Saya dulu sewaktu masih di UPT malah lebih sering. Kan kalau ada kunjungan dari mana gitu perlu pendampingan. Nah itu juga diputuskan bersama, siapa yang bisa dan siapa yang tidak.</p>	Dilibatkan sesuai dengan bidang kerja

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.3.54.6/1	<p>S: Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan. Apa panjenengan selalu aktif di dalamnya?</p> <p>Sembadra : Kalau itu sepertinya porsinya pimpinan yo.... Kalau soal rapat-rapat sih saya sering diajak, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya akan ada pendidikan pemakai, diklat, siapa saja yang nanti akan terlibat di dalamnya.</p>	Kebijakan merupakan porsi pimpinan bukan pustakawan biasa.

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.4.39.6/1	<p>S: Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan. Apa panjenengan selalu aktif di dalamnya?</p> <p>Bima : Kalau untuk masalah yang berkaitan dengan layanan</p>	Pelibatan pustakawan dalam pengambilan kebijakan sebatas pada bidang kerja masing-masing pustakawan.

	AV, misalnya ada penambahan alat, cara layanan di AV, itu saya dilibatkan. tapi kalau untuk perpustakaan secara keseluruhan belum pernah. Itu kan porsinya para <i>penggede</i> . Kalau saya kan masih junior termasuknya.	
--	--	--

- b. Tema : Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan.  
Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.1.46.6/2	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan untuk menunjukkan bahwa bapak/ ibu bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan?</p> <p>Arjuna : Ya... kalau melihat bidang kerja saya, saya mencoba untuk mengolah buku dengan cara yang secepat mungkin. Misalnya dulu, saya menggunakan mesin ketik untuk membuat katalog dan label, sekarang sudah menggunakan komputer.</p>	Mengusulkan perbaikan-perbaikan pada fasilitas kerja di bidangnya

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.2.16.6/2	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan untuk menunjukkan bahwa bapak/ ibu bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan?</p> <p>Srikandi : Kita kan pernah studi banding ke beberapa perpustakaan. Nah suatu perpustakaan kan bagian dari lembaga induknya to. Di sana itu perpustakaan sudah menciptakan profil yang dibuat seperti film untuk kepentingan promosi atau hal lain, kerjasama dengan perpustakaan lain dan sebagainya. Lha kita kan kantornya menjadi induk dari perpustakaan-perpustakaan di daerah to. Ya, setidaknya lebih maju. Nah ide-ide ini saya lontarkan, karena memang di sini belum ada, waktu itu.</p>	Tindakan hubungannya dengan perpustakaan: Melontarkan ide pembuatan profil perpustakaan sebagai media promosi

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.3.55.6/2	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan untuk menunjukkan bahwa bapak/ ibu bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan?</p> <p>Sembadra : Menurut hemat saya sih bukan menunjukkan tanggung jawab kali ya, tapi bentuk kerja apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan, gitu. Kalau seperti itu sih saya kerja aja sebaik-baiknya, mengumpulkan ide-ide buat cari solusi. Maksudnya,</p>	Bentuk tanggung jawab ditunjukkan dengan ide perbaikan-perbaikan pada bidang kerjanya

	<p>pada saat kerja ini kan mesti banyak masalah. Sederhananya kan kita identifikasi masalahnya, terus kita cari solusinya. Contoh, kalau pas di layanan kan banyak masalah dari pengunjung tu, ada yang rewel lah, ada yang kesulitan menelusur lah. Nah seperti itu kita cari jalan keluarnya. Kalau dulu kan pakai katalog, terus solusinya pakai OPAC. Dulu proses pinjam kelamaan, sekarang pakai <i>barcode</i> yang tinggal klik saja sudah terdata. Jadi kan nanti, istilah kita bisa memberi pelayanan prima.</p>	
--	---	--

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.3.55.6/2	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan untuk menunjukkan bahwa bapak/ ibu bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan?</p> <p>Bima : Kuncinya adalah ide. Kalau kita punya ide untuk memajukan perpustakaan, itu artinya kita punya tanggung jawab terhadap tempat kita bekerja. Kan gitu. Hal yang saya lakukan mengusulkan hal-hal mana yang bisa mempermudah saya bekerja. Misalnya kemarin di sini ada komputer saja. Saya mengusulkan adanya televisi, DVD, dan LCD. Maksudnya televisi dibutuhkan untuk memutar film-film dokumenter, LCD bisa untuk presentasi, dan lain-lain.</p>	Mengembangkan ide-ide untuk memajukan perpustakaan.

c. Tema : Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.1.47.6/3	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan dalam rangka membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama dengan jenis perpustakaan lain?</p> <p>Arjuna : Ya kita sebenarnya kan ada pendidikan pemakai ya. Nah di situ itu sebenarnya ditanamkan pengetahuan sekaligus pemahaman tentang perpustakaan dan bagaimana akses informasinya. Saya juga beberapa kali diikutkan dalam kegiatan semacam ini. Soal kerjasama dengan jenis perpustakaan lain itu kita otomatis ya pak. Misalnya perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, ini kan termasuk perpustakaan di bawah pengawasan kita.</p>	Pemahaman bisa dilakukan pada saat pendidikan pemakai, dan kerjasama dengan jenis perpustakaan lain otomatis dilakukan karena termasuk dalam pengawasan perpustakaan

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.2.48.6/3	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan dalam rangka membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama dengan jenis perpustakaan lain?</p>	Pemahaman dilakukan melalui pendidikan,

	<p>Srikandi : Yo iku mas...kita melakukan pendidikan atau bimbingan pemakai. Lha persoalane sekarang itu <i>wong-wong sing</i> (orang-orang yang) punya jabatan aja yang dilibatkan untuk ngajar. Pastinya kita itu mencoba melayani pengguna itu dengan baik, ada yang perlu informasi kita bantu semampunya, gitu. <i>Yen</i> kerjasama dengan jenis perpustakaan lain itu ya mesti...wong kita itu perpustakaan yang membina mereka</p>	<p>bimbingan pemakai, kerjasama dilakukan melalui pembinaan perpustakaan di bawahnya</p>
--	--	--

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.3.40 .6/3	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan dalam rangka membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama dengan jenis perpustakaan lain?</p> <p>Sembadra : Sebenarnya begini.... mengembangkan pemahamann itu kan membuat orang mengerti ya. Kita bisa melakukan itu pas ada orang tanya "gimana to caranya cari ini, gimana to cari itu?" kalau sudah gitu kita tinggal ngasih penjelasan secara langsung. Atau kalau secara terprogram itu pas pendidikan pemakai. Sering kita ada acara pendidikan pemakai ini, lha sekarang kan di UPT sedang ada pendidikan pemakai, salah satu pengajarnya pak Adib. Nah jenengan bisa langsung tanya beliau kalau memang diperlukan. mmmm...soal kerjasama ya itu mesti ada, wong kita menaungi berbagai jenis perpustakaan kok.</p>	<p>Pustakawan mengadakan pendidikan pemakai untuk mengembangkan pemahaman dan perpustakaan secara otomatis mengadakan kerjasama dengan perpustakaan lain karena Perpustakaan menaungi jenis perpustakaan.</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kepus.4.40.6/3	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan dalam rangka membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama dengan jenis perpustakaan lain?</p> <p>Bima : Menurut saya untuk mengembangkan pemahaman ini ya dengan melakukan kunjungan antar perpustakaan, berbagi pengalaman, juga mengikuti kegiatan seperti seminar, <i>work shop</i>, diklat dan pendidikan pemakai. Ya kita ini open dengan siapapun termasuk jenis perpustakaan apapun.. kebetulan kita ini kan perpustakaan pusatnya Jawa Tengah. Jadi perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling di bawah pembinaan kita.</p>	<p>Pengembangan pemahaman bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan, seminar, workshop, diklat, atau pendidikan pemakai. Sementara kerjasama secara langsung atau tidak langsung terjadi di Perpustakaan sebagai perpustakaan Pembina di provinsi Jawa Tengah.</p>

Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi

a. Tema : Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin;

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.1.4.7/1	<p>S: Jadi menurut panjenengan harus jadi pekerjaan pokok</p>	<p>luran dan pertemuan rutin tidak berjalan</p>

	<p>gitu, dalam arti bukan sampingan ya?</p> <p>Arjuna : Bisa jadi begitu ya. Apalagi kalau yang menjabat punya jabatan di struktural. Jadi adanya kegiatan ya kalau ada macem-macamnya gitu. Kalau ndak ya ndak jalan. Karena dari birokrasinya iuran anggota sendiri itu saja saja ndak bisa terkumpul. Pertemuan rutin ya gak ada. Nah kalau mungkin bapak nanya yang lainnya mungkin juga pada belum paham. hehehe</p>	<p>dengan baik</p>
--	---	--------------------

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
<p>Keprof.2.23.7/1</p>	<p>S: IPI kan menetapkan iuran rutin. Apa panjenengan rutin membayar iuran itu?</p> <p>Srikandi : Enggak. Maunya sih ya iuran lah, meskipun ada telatnya kan yang penting nilai tanggung jawabnya itu ada. Itu nek saya...gak tahu lho ya kalau orang lain. Masalahnya IPI sendiri juga pasif ya. Misalnya ada anggota yang gak bayar berapa bulan gitu, ya gak ada tagihan tu.</p>	<p>Membayar iuran yang ditetapkan IPI</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
<p>Keprof.3.21.7/1</p>	<p>S: yang paling kelihatan kan iuran rutin anggota, misalnya.</p> <p>Sembadra : Ooo iya. Kalau kita di kantor ni punya wadah sendiri untuk pustakawan ya. Ya kita iuran untuk jaga-jaga kalau nanti ada kegiatan apa gitu. Tapi ya untuk kepentingan intern kita. Kita tu masalah kok mas...lha sekarang ini keanggotaan juga ndak jelas. Coba tanya pak Tri yang mungkin lebih tahu, apa masih jalan atau ndak, gitu. Dia tahu banyak soal ini.</p> <p>Lha kalau saya, <i>sing penting aku kerjo...wis beres, hehehe... tidak peduli aturan gitu, malah ribet. Makanya saya sering ditaro di layanan. Mungkin orang mikir, yo wis dia aja dilayanan, wong pinter omonge (yo sudah dia saja yang di layanan, orang dia pandai bicaranya), hehehe...</i></p>	<p>Iuran dilakukan dengan wadah tersendiri, tidak langsung ke IPI, sebagai cadangan jika sewaktu-waktu ada kegiatan. Karena IPI sendiri dirasa tidak serius menangani masalah iuran.</p> <p>Pelayanan sering diidentikkan dengan kesupelan orang dalam menghadapi orang.</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
<p>Keprof.4.19.7/1</p>	<p>S: IPI kan sudah menetapkan iuran untuk pendanaan kegiatan, apa panjenengan atau umumnya pustakawan di sini melakukan iuran itu secara rutin?</p>	<p>Iuran rutin anggota</p>

	<p>Bima : Iuran itu kan mesti sudah diatur di AD/ART yam as, tapi terus terang belum pernah baca itu AD/ARTnya IPI. Walaupun secara.... Begini, saya sebagai pustakawan Perpusda, otomatis saya sebagai anggota IPI. Dulu pernah baca sih tapi ya gak tuntas. Artinya tidak sampai habis apalagi paham gitu, belum pernah. Maunya saya ya iuran wong itu kan konsekuensi saya sebagai anggota kan. Tapi nyatanya di sini gak rutin. Wong saya belum pernah di tagih juga-e, padahal saya merasa lama gak iuran.</p>	<p>IPI tidak dilaksanakan.  IPI tidak proaktif mengontrol iuran rutin anggotanya.</p>
--	---	---

b. Tema : Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab  
Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.1.30.7/2	<p>S: Selama ini panjenengan sudah berapa kali ikut kegiatan kepustakawanan ini, misalnya ikut kegiatan di IPI gitu?</p> <p>Arjuna : Kalau IPI saya kurang aktif ya. Memang IPInya sendiri juga tidak aktif. Yang menjadi lokomotif ya kita sendiri kok pak. IPI tu tidak punya dana. Jadi kegiatannya nunggu kita. Setiap tahun kita ada yang namanya pengembangan profesi...nah itu melibatkan IPI. Iuran di IPI itu juga ndak jalan pak. Repotnya di situ. Makanya untuk kegiatan IPI nya itu ya <i>mandeg</i>. Bisanya ya satu tahun sekali sesuai dengan anggaran dasarnya. Iuran ya iuran tapi sekali waktu masuk jadi anggota thok. Ndak ada tagihan, atau yang bisa bikin rutin iuran gitu ndak ada. Kendalanya ya di situ , karena pengurusnya juga merangkap jabatan di kantor sebagai pegawai barangkali konsentrasinya juga pecah.</p>	<p>Ikut mengikuti kegiatan IPI dan melaksanakan iuran per bulan sesuai dengan yang telah disepakai, meskipun secara fakta jarang terjadi.</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.2.33.7/2	<p>S: Pernah ikut kegiatan IPI?</p> <p>Srikandi : Pernah, tapi tidak bukan membahas tentang kode etik..</p>	<p>Mengikuti kegiatan IPI</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.3.19.7/2	<p>S: Panjenengan pernah ikut kegiatan IPI yang salah satu materinya, mungkin, membahas soal kode etik pustakawan?</p> <p>Sembadra : Pernah ikut, tapi sing membahas soal kode etik ini saya belum pernah ikut. Disamping itu IPI sendiri jarang kumpul kok, atau apa saya aja yang jarang denger ada kumpul-kumpul gitu. Yang terakhir saya tahu tu tahun 2001 ada pertemuan di solo</p>	<p>Terakhir kegiatan IPI yang pernah diikuti tahun 2001 di Solo. Setiap kegiatan yang diikuti belum ada pembahasan mengenai kode etik pustakawan.</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.3.19.7/2	<p>S: Panjenengan pernah ikut kegiatan IPI yang salah satu materinya, mungkin, membahas soal kode etik pustakawan?</p> <p>Bima : Pernah ikut, tapi sing membahas soal kode etik ini saya belum pernah ikut. Disamping itu IPI sendiri jarang kumpul kok, atau apa saya aja yang jarang denger ada kumpul-kumpul gitu. Yang terakhir saya tahu tu tahun 2001 ada pertemuan di solo</p>	<p>Terakhir kegiatan IPI yang pernah diikuti tahun 2001 di Solo. Setiap kegiatan yang diikuti belum ada pembahasan mengenai kode etik pustakawan.</p>

c. Tema : Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.1.32.7/3	<p>S: Selanjutnya pak, kode etik juga menghendaki agar pustakawan mengutamakan kepentingan organisasi profesi dibanding kepentingan pribadi. Apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Arjuna : Saya kok gak pernah ada pilihan ya. Tapi idealnya ya milih kepentingan profesi dulu. Saya mengalir aja sih pak, tergantung kepentingan. Kalau misalnya ada kegiatan dari IPI dan saya bisa, ya saya akan ikut. Sebaliknya kalau gak bisa ya tidak berangkat. Kebetulan kan saya hanya anggota biasa, dan kegiatan IPI ini jarang. Kalaupun ada mungkin saya gak diundang, hanya pengurus inti saja yang dilibatkan.</p>	<p>Idealnya pustakawan mengutamakan kepentingan profesi di atas kepentingan pribadi. Arjuna ikut kegiatan berdasarkan kepentingan.</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.2.49.7/3	<p>S: Jika diminta untuk memilih, misalnya bapak/ ibu diberi tugas oleh IPI yang kebetulan bersamaan waktunya dengan kegiatan keluarga. Mana yang diprioritaskan?</p> <p>Srikandi : Terus terang kalau saya ya tergantung prioritas kepentingannya. Kalau keluarga bisa ditinggalkan, tentu pilih tugas IPI. Tapi secara jujur saya sebenarnya pilih tugas dulu, keluarga bisa fleksibel.</p>	<p>Jika kepentingan keluarga bisa ditunda, maka tugas lebih utama</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.3.18.7/3	<p>S: Ibu aktif dalam keanggotaan IPI, atau ibu ada kartu anggota IPI?</p> <p>Sembadra : Kalau dibilang aktif, ndak juga. Nyatanya ada</p>	<p>Sembadra tercatat sebagai anggota IPI, tetapi tidak selalu aktif dalam berbagai</p>

	<p>beberapa kegiatan IPI saya ndak dilibatkan. Yang terakhir kemarin, katanya ada pembentukan cabang IPI di salatiga, itu aja saya ndak ikut. Kartu anggota dulu ada. Tahun 2005-2006 an gitu. Katanya ada pembaruan keanggotaan gitu, tapi kapannya saya belum tahu.</p>	<p>kegiatan IPI.  Keanggotaan IPI dibuktikan dengan kartu anggota IPI.</p>
--	---	--

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Keprof.4.40.7/3	<p>S: Jika diminta untuk memilih, misalnya bapak/ ibu diberi tugas oleh IPI yang kebetulan bersamaan waktunya dengan kegiatan keluarga. Mana yang diprioritaskan?</p> <p>Bima : Tergantung kepentingannya. Kalau saya kan masih <i>single</i>, jadi gak masalah. Persoalannya itu IPI ini gak aktif ya... saya sebagai anggota IPI belum pernah dapat tugas dari IPI. Seandainya ada ya tentu saya pilih menjalankan tugas dulu lah, selama kepentingan keluarga bisa ditunda. Kan biasanya kepentingan keluarga itu bisa diatur jadwalnya.</p>	<p>Selama kepentingan keluarga bisa diatur jadwalnya, tugas lebih dulu dilaksanakan</p>

Hubungan pustakawan dengan masyarakat

- a. Tema : Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya

Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Arjuna.48.8/1	<p>S: Apa yang panjenengan lakukan dalam rangka bekerja sama dengan komunitas yang sesuai dan menjaga harkat dan martabat kemanusiaan serta pemustaka. ?</p> <p>Bima : Kerjasama dengan komunitas sejenis ya.... Mungkin yang paling dekat arsip ya. Kita kan sekarang jadi satu badan dengan arsip, jadi kerjasama ini pasti terjadi. Ya tentunya kita berdasarkan norma yang kita punyai, perpustakaan punya aturan sendiri, arsip juga tentunya punya aturan sendiri.</p>	<p>Kerjasama dengan komunitas lain ditunjukkan dengan bergabungnya perpustakaan dengan arsip</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kemas.2.14.8/1	<p>S: Di kode etik itu kan ada yang berbunyi bekerja sama dengan komunitas yang sesuai dan menjaga harkat dan martabat kemanusiaan serta pemustaka. Nah apa yang sudah atau akan <i>panjenengan</i> lakukan untuk itu?</p> <p>Srikandi : Kalau bekerja sama ya...saya banyak teman itu dengan orang-orang arsip, pustakawan-pustakawan di daerah yang kebetulan saya kan termasuk seringlah ke daerah untuk pelatihan, seminar...gitu. Sering juga teman-teman memberi masukan, "mestinya Perpusda tu gini,</p>	<p>Tindakan: Bekerja sama dan berteman dengan pustakawan lain juga orang-orang arsip, penerbitan dan lain-lain.</p>



<p>Kemas.2.14.8/1</p> <p>Kdl. Kemas.2.14.8/1</p>	<p>gitu..." ya sebisa mungkin saya jalin pertemanan dengan baiklah. Saya juga kan kebetulah di penerbitan majalah, jadi ya...dengan gitu saya bias jadi banyak informasi.</p> <p>Untuk menjaga martabat ya bagi saya yang penting bekerja taat sama aturan-aturan yang ada, kalau bisa sih memunculkan ide-ide yang baru....tidak monoton terus.</p> <p>Tapi kendalanya yang namanya pustakawan dan orangnya banyak ya, dari teman tuh malah "walah sok cari muka, sok <i>nganeh-anehi</i>, <i>mbok</i> ya nerima aja kerja yang ada, malah bikin repot aja.." jadi temennya tuh malah <i>mblereti</i>, <i>nggembosi</i> semangat gitu lho. Hehehehe.</p> <p>Ya kadang kita maklumi juga wong mungkin tidak se-level, maksudnya kan ada pustakawan itu yang <i>impassing</i> atau masih D3 gitu, yang mereka pikir pekerjaan itu yang ada saja, tidak perlu mencari apalagi mengembangkan ide.</p>	<p>Menjaga harkat dan martabat dengan bekerja taat aturan dan menciptakan ide-ide yang baru.</p> <p>Kendala: Pesimistis dan pengembosan motivasi.</p> <p>Pendidikan rekan yang tidak memadai.</p> <p>Rekan menganggap pekerjaan hanya yang biasa dilakukan</p>
<p>Kdl. Kemas.2.15.8/1</p>	<p>S: Barangkali anu bu...pesimistis terhadap dirinya gitu?</p> <p>Srikandi : Iya....lha wong malah ada juga yang bilang, "<i>yen</i> (kalau) gitu ya saya kebagian apa?" maksudnya, kalau kita punya ide, kita yang nantinya dapat <i>reward</i> kan, entah berupa apa kan kita gak tahu. Jadi mereka merasa terpinggirkan gitu. Tapi saya pikir, "lah yang bikin kamu terpinggirkan kan <i>awalmu dhewe</i> (kamu sendiri) tapi kamu tidak sadar", iya kan?... lha orang-orang yang begini ini yang sulit untuk maju, itu kalau menurut saya.... Dia di suruh <i>mlaku</i> (jalan), <i>emoh</i> (tidak mau),...tapi giliran orang yang jalan, <i>nyrimpeti</i> (menghambat)... walah kan repot.</p> <p>Sering juga kan disarankan, misalnya: "<i>bu lha mbok</i> ya sampeyan itu gini atau gitu biar berkembang...!". Malah jawabnya apa, "walah lha kok repot, mendingan gini aja....ngrumpi aja enak kok!" hehehehe....Lha kan gimanaaaa... gitu. Malah kaya selebriti (sambil tertawa kecil)... gossip! Hehehe..</p>	<p>Kendala: Rekan yg tidak mau repot</p> <p>Rekan yg merasa terpinggirkan</p>
<p>Kemas.2.19.8/1</p>	<p>S: lantas?</p> <p>Srikandi : Ya sudah, harus cari cara lain. Sewaktu di sana saya coba membaca jadwal akademik mereka yang pernah bergabung untuk memberikan bimbingan tentang majalah dinding di sekolah.</p> <p>Ya saya juga mengundang guru, juga untuk masalah itu.</p>	<p>Pelayanan terhadap pengguna: memberikan bimbingan tentang majalah dinding sekolah.</p>
<p>Kemas.2.20.8/1 Sidas.2.60.6/2</p>	<p>S: Apa selalu mau bu gurunya?</p> <p>Srikandi : Mau...ya dikasih transport sekitar seratus ribu gitu. Paling berapa jam, dan bahannya pun kan sudah</p>	<p>Pelayanan terhadap pengguna: Melaksanakan program berorientasi</p>

	<p>disediakan di sini. Ya memang agak tombok-tombok sedikit bagi saya gak apa-apa, maksud saya biar program ini bisa berjalan, gitu lho mas... Gurunya juga kadang-kadang mengucapkan terimakasih wong ternyata juga banyak yang gak tahu apa itu majalah dinding. Padahal juga penting to, bisa jadi saluran ekspresi anak-anak. Makanya mereka itu kita panggil, gak apa-apalah satu sekolahan itu ada 3 atau 4 orang gitu.</p>	<p>pengguna  Bekersama dengan pihak terkait (guru, siswa).</p>
Kemas.2.23.8/1	<p>S: apa itu sebagai bentuk promosi dia ya?</p> <p>Srikandi : Iya... dan di Perpustakaan ini kan butuh mainan anak-anak, nah mereka juga bantu dana untuk pengadaan mainan anak-anak. Jadi waktu pertemuan dia kan nulis di papan tulis itu to, layanan kurang ini-itu, dananya harus untuk ini-itu....begitu. pinter itu Coca Cola sana, anu... begitu tanggap dia, dan memang dia punya alokasi dana khusus untuk pengembangan masyarakat itu.</p> <p>Ya memang untuk iklannya ya yang seperti spanduk yang ada di depan itu to. Dia juga bilang, "ini lho ada dana pengembangan dari <i>Coca Cola Foundation</i>", gitu. "Tapi di sini tidak dikasih produk Coca Cola ya", kata saya. Hehehe ...</p>	<p>Coca-cola memberikan bantuan pengadaan mainan anak dan bantuan dana dari <i>Coca Cola Foundation</i></p>
Kemas.2.26.8/1	<p>S: evaluasinya per apa?</p> <p>Srikandi : Biasanya per-semester. Nanti dia mewawancarai kita, pengunjung, ya anak-anak, atau pengunjung yang lain yang mengajak anak ke situ, untuk memantau perkembangannya. Dia kasih bullpen, atau souvenir lain. Dengan wawancara itu kan ketahuan dilaksanakan atau tidaknya programnya kan gitu kan. Nanti kalau berlanjut ya dikasih lagi. Hasilnya kan untuk beli film, TV, itu lho TV segede....32 inc apa berapa itu.....yang ada di ruang bermain anak itu.</p>	<p>Evaluasi dari Kerjasama diadakan per-semester dengan mengadakan wawancara kepada pemustaka, pustakawan</p>
Kemas.2.27.8/1	<p>S: itu turun uang apa barang ya bu?</p> <p>Srikandi : Turun uang. Lalu kita buat laporan ke Coca Cola ke Jakarta. Makanya kwitansi pembelian juga kita harus punya untuk lampiran. Lapornya pakai dokumentasinya juga, misalkan kita bercerita pada anak, itu kita potret gitu, terus... menyaksikan film ilmu pengetahuan, diskusi, yo didokumentasikan. Nanti terus dikirim ke Jakarta itu... tapi gak tahu setelah saya dirolling itu gak aktif atau bagaimana... kalau sampeyan sudah ke sana, siapa yang jadi pengelolanya?</p>	<p>Laporan kegiatan berupa dokumentasi kegiatan, misalnya: bercerita kepada anak, pemutaran film, diskusi, dll disertai catatan data-data kegiatan</p>
Kemas.2.29.8/1	<p>S: Tapi untuk gurunya kan ada anggarannya to bu?</p>	<p>Tanggung jawab:</p>

	<p>Srikandi : Ada...meski gak banyak tapi yo lumayan. Guru-gurunya kan diambilkan dari mahasiswa. Tiap bulan ya tanda tangan waktu terima honorinya. Lha kalau misalnya gurunya dikasih Rp. 100.000, iurannya Cuma Rp. 70.000 kan tombok to mas....hehehe baru tahu dia...! Emangnya kerjanya di sini cuma <i>thenguk-thenguk enak</i> (duduk-duduk manis) gitu po... Kadang <i>nek</i> (kalau) ada kegiatan apa gitu, saya disuruh pegang keuangan nanti ya saya anggarkan, ya itu untuk beli bahan-bahan ajar gitu. Soalnya apa, sudah dikasih kepercayaan Coca Cola terus gak dilaksanakan, kan <i>eman-eman</i> (sayang) gitu. Kok anunya.....reputasinya jelek nanti. "<i>woo lha bak no kok ngene to</i> (ooo rupanya kok begini), orang sudah didukung dana kok malah.....", kan kesannya gak baik to. Kan yang namanya dana sebagai perangsang saja kan sedikit to?...</p>	<p>Berusaha menjaga kepercayaan rekanan dengan konsisten melaksanakan program kerja yang telah dicanangkan.</p>
--	--	---

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kemas.3.16.8/1	<p>S: Di kode etik itu kan ada yang berbunyi bekerja sama dengan komunitas yang sesuai dan menjaga harkat dan martabat kemanusiaan serta pemustaka. Nah apa yang sudah atau akan <i>panjenengan</i> lakukan untuk itu?</p> <p>Sembadra : Kerjasamanya...kadang dengan lingkungan dekat-dekat sini. Kan rata-rata kantor tu. Paling ya mereka butuh apa gitu mereka panggil kita. Atau kalau kita butuh apa dari mereka kita juga panggil mereka. Misalnya, ketika mereka ada masalah dengan perpustakaan yang mereka kelola, mereka meminta kita untuk datang ke sana. Gitu. saya sendiri sering diikutkan dalam pembinaan perpustakaan sekolah, yang kebetulan memang kita punya program perpustakaan binaan, atau kalau pas pameran buku. Pameran buku kan sering di kantor sebelah itu. Jadi kita yang ke sana. Ya...kalau saya kok yang penting taat aturan, jangan sampai melanggar aturan, memberikan pelayanan yang baik. Jadi kan nama baik alias harkat dan martabat tetap terjaga.</p>	<p>Bekerja sama: melibatkan instansi lain dalam pendidikan pemakai, pameran buku.</p> <p>Menjaga martabat, dengan taat aturan, dan memberikan pelayanan maksimal.</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kemas.4.30.8/1	<p>S: Debin itu apa pak?</p> <p>Bima : ooo debin itu daerah binaan. waktu itu tingkat kecamatan ya. jadi sekolah ini ditunjuk sebagai wakil untuk diikutsertakan lomba perpustakaan daerah binaan.</p>	<p>Bentuk kerjasama dengan pihak lain, diantaranya dengan berinteraksi dengan daerah binaan di berbagai daerah.</p>

	<p>lalu kami bantu sebisanya dan ternyata hasilnya dapat juara di lomba tersebut. nah setelah menang, tahun berikutnya menghubungi kami lagi. katanya akan ikut lomba tingkat kota Semarang. Saya bilang kalau perpustakaan hanya segini mungkin kurang. Lalu mereka mengadakan pembehan-pembenahan. Yang kebetulan juga saya sering diminta jadi juri untuk lomba-lomba seperti itu. Akhirnya mereka dapat juga juara, tapi saya gak tahu juara berapanya. Itu makanya kita berusaha untuk menjaga citra. Misal saya bisa ya saya minta bantuan teman-teman yang lain. Jadi saya tidak bisa terus memaksakan bisa, gitu, tidak. Lha kan malah kacau kalau dipaksakan.</p>	
--	--	--

- b. Tema : Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.  
Informan : Arjuna

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kemas.1.. 8/2	<p>S: Apa yang bapak/ ibu lakukan dalam rangka memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat?</p> <p>Arjuna : Apa ya.... Kalau mengadakan perayaan 17 Agustus itu termasuk kebudayaan gak ya. Kalau itu bisa masuk kategori saya sering mengadakan lomba-lomba. Malam hiburannya ya ada tari-tarian, ada baca puisi, ada nyanyi, gitu. Kalau untuk di Perpustakaan sendiri, menyediakan ruang bermain yang dapat diakses oleh masyarakat. <i>Story telling</i> juga ada, les tari juga ada. Kalau untuk pribadi sebagai pustakawan ya... sumbangannya kerja sebaik-baiknya, mengolah buku, menyajikan informasinya yang nantinya Insya Allah kan bermanfaat bagi perkembangan kebudayaan di masyarakat.</p>	<p>Sumbangan terhadap kebudayaan di masyarakat, yaitu dengan mengolah dan menyajikan informasi yang dapat mengembangkan kebudayaan di masyarakat</p>

Informan : Srikandi

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kemas.2.15.8/2	<p>S: Kalau soal sumbangan pustakawan terhadap perkembangan kebudayaan di masyarakat, Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Srikandi : Lha ya itu tadi maksudnya. Memunculkan ide baru itu ya, kreatif membuat hal-hal yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Tidak <i>nrimo thok</i> (tidak pasrah saja). Lho kan gitu, ibaratnya kalau mau berbudaya ya harus punya ide. Kan budaya itu hasil dari ide to? Misalnya, kalau pelayanan ini masih manual ya diidekan menjadi pelayanan yang menggunakan komputer, itu misalnya. Jadi dari budaya</p>	<p>Pengembangan kebudayaan bisa dilakukan dengan cara pengembangan ide dari yang sudah ada kepada ide yang lebih inovatif. Misalnya dari manual ke komputerisasi.</p>

	<p>pelayanan manual ke budaya pelayanan dengan komputer. Lha syukur kalau ide itu memang benar-benar <i>urgen</i> bagi perpustakaan. Kan gitu.</p>	
Kepus.2.18.6/2	<p>S: lha itu ide bagus bu..! Srikandi : Lagi lagi ya dapat komentar juga, lha nanti gurunya siapa, apa gak bayar? Wah...pokoke ki banyak komentar-komentar yang berseberangan. <i>Aku dhewe yo gumun kok</i> (aku sendiri ya heran kok), Sampai jengkel saya tu mas...! Ya Allah ha <i>mung ngono ae kok yo ra gelem</i> (Cuma gitu aja kok tidak mau), "<i>lha mengko gurune sopo</i> (lha nanti gurunya siapa)?"</p>	<p>Kendala: Mendapat tantangan rekan yang tidak sepaham.</p>
Kemas.2.18.8/2	<p>Ya saya jawab, <i>golek to yo</i> ( ya mencari), kan gampang itu. Ambil saja mahasiswa. Disamping murah, kita kan bisa memberdayakan potensi dari mahasiswa yang bersangkutan. Kan gak mahal-mahal amat, lha kecuali les privat.... iya kan.</p> <p>Ini pun sebenarnya sempat berjalan juga. Tempatnya di ruang multimedia itu lho mas,yang di lantai 1 tempat anak-anak bermain itu. Lha karena dananya sudah <i>mandeg</i> (berhenti) ya akhirnya malah tempatnya digunakan untuk tempat bermain anak itu. Tempat saya atau meja saya dulu kan sebelah ruangan itu.</p>	<p>Sumbangan terhdp pengemb kebudayaan, diantaranya adalah mengadakan les menari.</p>

Informan : Sembadra

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kemas.3.17.8/2	<p>S: Kalau soal sumbangan pustakawan terhadap perkembangan kebudayaan di masyarakat, Apa yang ibu lakukan?</p> <p>Sembadra : Apa ya mas...kok nyumbang yo....yen kita kan nyumbang itu kan kalau ada punya gawe, ngasih amplop, nah itu nyumbang. Hehehehe. Sory, guyon.....hehehe Yo gitu mas, Kalau pengertiannya itu, yang paling kelihatan itu yang ada di rumah pintar itu. Saya dulu pernah di sana juga. Di sana ada les nari. Katanya sih beberapa waktu sempat ndak jalan itu, tapi kelihatannya sudah mulai dirintis lagi.</p>	<p>Sumbangan pustakawan terhadap kebudayaan di masyarakat yaitu dengan menyediakan rumah pintar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satu kegiatan rutinnnya adalah les menari.</p>

Informan : Bima

Kode	Pertanyaan/ Kegiatan/Jawaban	Interpretasi
Kemas.4.25.8/2	<p>S: Pustakawan turut memberikan sumbangan terhadap kebudayaan masyarakat. Apa yang panjenengan lakukan?</p> <p>Bima : Kita sebagai pustakawan itu menurut saya memberikan</p>	<p>Sumbangan pustakawan terhadap kebudayaan, salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, sebab perpustakaan</p>

	<p>pelayanan yang terbaik itu sudah memberi sumbangan budaya. Maksudnya gini, perpustakaan kan gudangnya kebudayaan tu. Ilmu pengetahuan yang ditulis itu kan hasil dari pemikiran manusia. Lha ini kan budaya. Jadi ya gitu, saya berusaha bekerja sebaik-baiknyalah, melayani orang cari informasi dengan baik. Kalau memang tidak puas dengan pelayanan yang saya berikan, ya....manusiawi lah.</p>	<p>mengelola hasil pemikiran manusia.</p>
--	--	---

**Keterangan :**

- Sidas : Sikap dasar pustakawan
- Kegun : Hubungan dengan pengguna (pemustaka)
- Kerek : Hubungan dengan rekan sejawat (antar pustakawan)
- Kepus : Hubungan dengan perpustakaan
- Keprof: Hubungan dengan profesi
- Kemas : Hubungan dengan masyarakat



## Observasi penelitian

Kode	Kegiatan
Obs.1	<p>Waktu itu hari Rabu tanggal 15 April 2009 pukul 09.45. Sewaktu masuk ruangan Arjuna, S melihat Arjuna sedang sibuk dengan pekerjaannya di depan komputer.</p> <p>S dipersilahkan masuk, tetapi S diminta untuk menunggu beberapa saat sambil Arjuna membereskan meja kerja, merapikan susunan buku yang sedang diolah.</p> <p>Arjuna mempersilahkan S duduk dengan bahasa yang sopan dan sikap yang bersahabat. Arjuna merespon baik percakapan ini, dan S merasa lebih akrab.</p>
Obs.1	<p>Ketika pembicaraan terjadi, terpotong karena ada petugas lain yang mengantar surat ke Arjuna ini. Arjuna menyambut dengan baik menggunakan bahasa jawa halus.</p>
Obs.1	<p>Pengamatan penulis dalam masa penelitian ini tidak melihat Arjuna menggunakan komputer untuk kerja lain selain pengolahan. Ada 3 komputer di ruangan Arjuna, yang difungsikan untuk alat bantu klasifikasi yang terhubung dengan internet, input data, dan proses pelabelan.</p>
Obs.2	<p>S telah mengadakan kesepakatan bertemu hari Selasa, tanggal 21 setelah jam 12. S datang ke kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah jam 10. selama 2 jam S mengamati kondisi ruangan tempat Srikandi biasa melakukan aktivitasnya. Sepi. Srikandi tidak ada di tempat. Ternyata Srikandi sedang ada pertemuan di UPT perpustakaan. S bertanya kepada rekan beliau, ternyata Srikandi dari rumah langsung menuju UPT, tidak menuju kantor terlebih dahulu.</p> <p>Jam 11.3 WIB, Srikandi datang dan langsung menyapa.</p> <p>Kurang lebih 15 menit, ada seseorang yang mencari Srikandi. S tidak tahu apa keperluannya, tetapi yang S lihat Srikandi menerima dengan wajah yang ceria, ramah dan menggunakan bahasa Jawa yang halus</p> <p>Setelah menunggu beberapa waktu. sambil berjalan menghampiri S, Srikandi yang sebelumnya sudah diberi tahu kisi-kisi pertanyaan pada saat wawancara pertama, langsung berbicara tanpa terlebih dahulu di tanya.</p>
Obs.2	<p>Selasa, tanggal 15 dan 21 April 2009 pukul 11.35 WIB – 14.00 WIB</p> <p>S melihat dimana di atas meja belajar Srikandi terdapat tumpukan kertas yang ketika S bertanya kepada yang bersangkutan, beliau membenarkan.</p>
Obs.2	<p>Selasa tanggal 28 April, kurang lebih jam 11.00 WIB, Srikandi pernah mengizinkan S menggunakan kertas untuk print out artikel yang akan S kirimkan untuk majalah Visi Pustakawan, walaupun akhirnya S tidak jadi menggunakannya karena file makalah tersebut tidak bisa dibuka di komputer kantor tersebut.</p>
Obs.3	<p>Pagi itu hari 24 April 2009 pukul 9.30 WIB. S datang ke ruangan tempat Sembadra bekerja. Sembadra sudah menunggu S sesuai kesepakatan bertatap muka satu hari sebelumnya via telepon. Tidak ada komputer atau mesin ketik di atas meja Sembadra tempat S diterima. Kurang lebih 5 menit lamanya S dan Sembadra bercakap-cakap sebelum pada inti pertanyaan-pertanyaan.</p>

Obs.3	pembicaraan ini disela oleh rekan Sembadra yang konfirmasi tentang kegiatan kantor. Setelah beberapa saat dilanjut kembali) Sembadra menanggapi rekannya tersebut dengan baik, ramah dan santun. Mereka menggunakan bahasa Jawa yang halus.
Obs.3	Pada saat wawancara dengan sembadra, sempat terjadi interaksi dengan pihak lain, karena memang tempat duduk kami berdekatan, bahkan sesekali pembicaraan beralih pada pihak yang dimaksud. Yang terjadi adalah muncul keakraban antara saya dengan orang selain informan.
Obs.4	Hari Rabu tanggal 29 April 2009, Jam 09.00 WIB S datang ke lokasi penelitian untuk bertemu Bima yang sudah sepakat untuk bisa bertemu pada jam 13.00. Di ruang Bima terdapat beberapa pengunjung yang ada di depan komputer. Bima melayani pengunjung, memberikan arahan kepada beberapa orang pemustaka di ruangan tersebut. Bima adalah pustakawan yang ditugaskan pada ruang layanan Audio Visual. S ditemui sejenak dan memberi pengertian pada S untuk menunggu beberapa waktu sampai tugasnya selesai dikerjakan, yaitu membimbing pengguna untuk layanan Audio Visual. Jam 12.30 S berkesempatan menemui Bima untuk wawancara. Kedatangan S disambut baik, dan setelah bicara beberapa saat, S baru menemukan momen untuk masuk kedalam pertanyaan seputar kode etik)
Obs.4	tepat jam 12.25, tiba-tiba teman Bima dari ruangan sebelah mendekati kami. Bima mengenalkan S kepada rekannya tersebut. Rekan itu bermaksud mengajak keluar makan. Pembicaraan terhenti sejenak
Obs.4	Pada saat melakukan tanya jawab yang sudah berlangsung kurang lebih 45 menit, melintas pegawai lain yang membuat kami harus berinteraksi sejenak dengan beliau, dan kemudian dilanjutkan lagi
Obs.4	Rabu tanggal 29 April 2009 S melihat Bima sedang melayani pengunjung yang pada saat itu adalah mahasiswa UNDIP yang sedang mencari data untuk penyelesaian tugas. Bima memberikan pelayanan kepada pemustaka, sesuai dengan bidang tugasnya, karena menurut S yang berkapasitas sebagai peneliti sekaligus pemustaka, mendapat pelayanan dengan baik, merespon kebutuhan S dengan baik, dan menunjukkan sikap yang humanis.
Obs.4	Hari Rabu 29 April, Saat itu kurang lebih jam 14.00 WIB Penulis menyelesaikan wawancara dengan Bima dan langsung berkeliling ke berbagai ruangan dan terakhir transit di ruang sirkulasi dan penulis diperkenalkan kepada petugas/ pustakawan yang ada di sana, dan mengadakan pengamatan terhadap pelayanan di sana.



## CATATAN-CATATAN DAN REKOMENDASI

Catatan-catatan ini merupakan temuan berdasarkan asumsi penulis yang dicatat pada saat penelitian. Catatan-catatan itu diantaranya adalah:

1. Terdapatnya pasal yang mempunyai makna yang sama

Pasal 3 ayat b sama dengan pasal 5 ayat 1, yang berbunyi:

*" Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan"*

**Sama maknanya dengan**

Pasal 5 ayat 1 lebih cocok untuk pasal 3 ayat b, yang berbunyi:

*" Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan"*

**Rekomendasi :** Agar pasal ini ditinjau ulang agar tidak terjadi tumpang tindih penafsiran dan pelaksanaannya.

2. Melihat dari kode etik sebelumnya (kode etik tahun 2002), ditemukan hal yang berbeda, yaitu dihapusnya item kewajiban terhadap negara dan munculnya item hubungan dengan perpustakaan

**Rekomendasi:** Agar pasal kewajiban terhadap negara dimunculkan kembali sebagai cermin kepedulian IPI terhadap rasa berbangsa dan bernegara.

3. Ditemukannya redaksi bermakna pasif, yaitu pada pasal 4 ayat 2

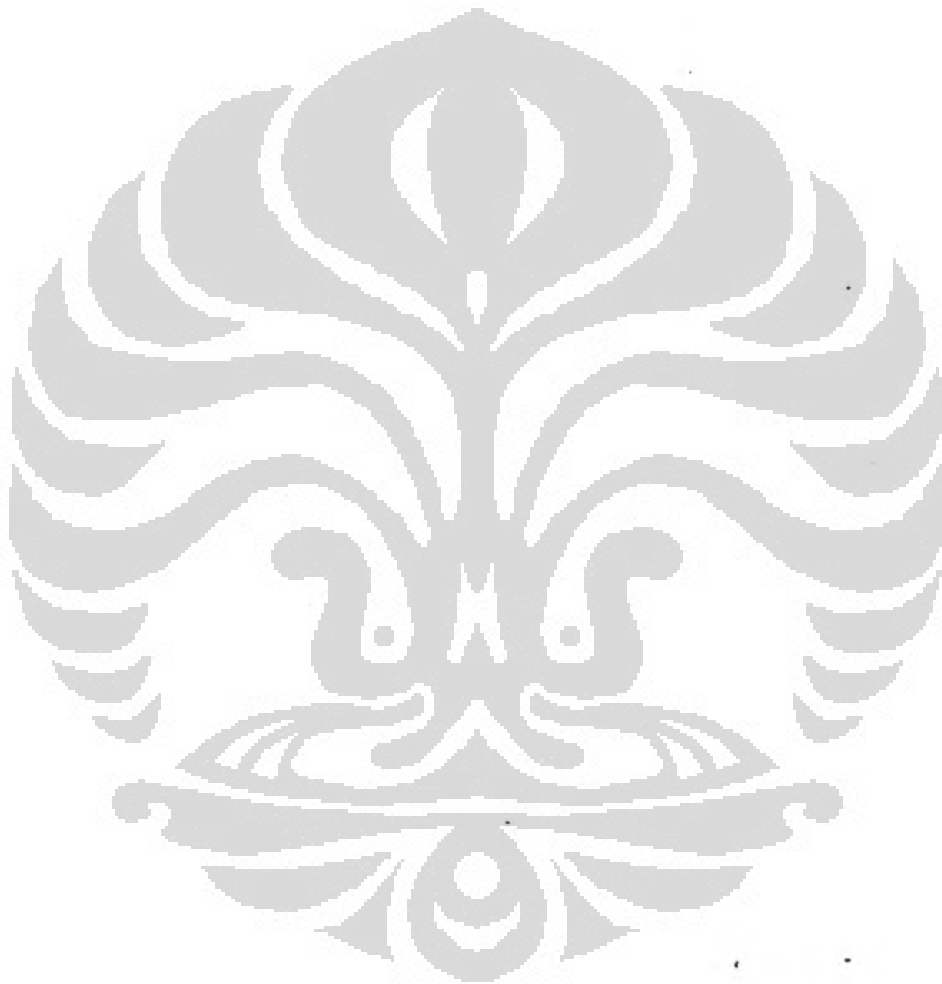
*"Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh di perpustakaan"*

**Rekomendasi:** Kode etik adalah kewajiban yang bentuk kalimatnya sebaiknya kalimat aktif, karena harus dilaksanakan oleh pustakawan, untuk itu agar redaksi dirubah menjadi kalimat aktif.

4. Pasal 6 ayat 3, redaksi memiliki dua pengertian yang berbeda tetapi berada dalam satu item.

**” Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.”**

**Rekomendasi :** Agar kalimat ini tidak dalam satu ayat, melainkan dibuat menjadi dua ayat.



**Cuplikan Peraturan Gubernur**

**PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERPUSTAKAAN DAERAH SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA  
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah
2. Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
4. Badan adalah Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Badan adalah kepala Badan Arsip Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah
6. Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut Perpusda adalah Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah
7. Kepala perpustakaan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Perpusda adalah kepala Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai UPT pada Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

Perpusda merupakan UPT pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpusda dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang perpustakaan.

**Pasal 4**

Perpusda mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang perpustakaan.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional jasa teknis perpustakaan dan deposit;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional jasa teknis perpustakaan dan deposit;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan jasa teknis perpustakaan dan deposit;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Perpusda, terdiri dari:
  - a. Kepala Perpustakaan
  - b. Subbagian Tata Usaha
  - c. Seksi Jasa Teknis Perpustakaan
  - d. Seksi Deposit
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpusda.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpusda
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpusda.
- (5) Bagan Organisasi Perpusda sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V  
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian pertama  
Kepala Perpustakaan**

**Pasal 7**

Kepala Perpustakaan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

**Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

**Bagian Ketiga  
Seksi Jasa Teknis Perpustakaan**

**Pasal 9**

Seksi Jasa Teknis Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan jasa teknis perpustakaan.

**Bagian Keempat  
Seksi Deposit**

**Pasal 10**

Seksi Deposit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan deposit di bidang perpustakaan.

**Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 20 Juni 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ALI MUFIZ**